



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengacu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sistematika Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 ini memberikan informasi tentang Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purworejo selama Tahun 2024. Melalui buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 ini

KATA PENGANTAR

diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran capaian kinerja kepada semua pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan dan kewenangannya selama tahun anggaran 2024.

Purworejo, Maret 2025

BUPATI PURWOREJO



YULI HASTUTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1. PENJELASAN UMUM	I-1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I-1
b. Data Geografis Wilayah	I-1
c. Informasi Umum Data Kependudukan	I-3
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	I-5
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	I-6
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	I-7
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-10
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.....	I-15
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	I-22
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-22
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-28
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I--28
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan	

DAFTAR ISI

Dokumen Perencanaan Tahunan	I-39
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	I-86
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-93
2.1. Capaian Kinerja Makro	II-93
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	II-93
2.1.2. Angka Kemiskinan	II-95
2.1.3. Angka Pengangguran	II-96
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	II-97
2.1.5. Pendapatan Perkapita	II-98
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	II-99
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-100
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-100
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-112
2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-114
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	II-114
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	II-121
c. Analisa Capaian Kinerja dibanding tahun sebelumnya	II-124
d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	II-126
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai	II-128
f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	II-131
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	III-149
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-150
4.1 Urusan Pendidikan	IV-150
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-150

DAFTAR ISI

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-150
4.1.3 Realisasi	IV-153
4.1.4 Alokasi Anggaran	IV-159
4.1.5 Dukungan Personil	IV-159
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	IV-159
4.2 Urusan Kesehatan	IV-160
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-160
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-162
4.2.3 Realisasi	IV-168
4.2.4 Alokasi Anggaran	IV-183
4.2.5 Dukungan Personil	IV-184
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	IV-186
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	IV-187
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-187
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-188
4.3.3 Realisasi	IV-191
4.3.4 Alokasi Anggaran	IV-197
4.3.5 Dukungan Personil	IV-197
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	IV-198
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	IV-200
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-200
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-201
4.4.3 Realisasi	IV-202
4.4.4 Alokasi Anggaran	IV-207
4.4.5 Dukungan Personil	IV-208
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	IV-208
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-209
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-210
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-212

DAFTAR ISI

4.5.3	Realisasi	IV-220
4.5.4	Alokasi Anggaran	IV-229
4.5.5	Dukungan Personil	IV-230
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV-232
4.6	Urusan Sosial	IV-235
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-235
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-236
4.6.3	Realisasi	IV-238
4.6.4	Alokasi Anggaran	IV-251
4.6.5	Dukungan Personil	IV-251
4.6.7	Permasalahan dan Solusi	IV-252
4.7	Program dan Kegiatan	IV-253
4.7.1	Urusan Pendidikan	IV-253
4.7.2	Urusan Kesehatan	IV-257
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV-258
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-259
4.7.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-260
4.7.6	Urusan Sosial	IV-263
BAB V	PENUTUP	V-265
	Kesimpulan	V-265
	Saran	V-266

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2024	I-4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2024	I-4
Tabel 1.3	Jumlah Desa dan Luas Kecamatan Kabupaten Purworejo	I-5
Tabel 1-4	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Dasar Hukum di Pemerintah Kabupaten Purworejo	I-6
Tabel 1-5	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan ...	I-8
Tabel 1-6	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	I-10
Tabel 1-7	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	I-12
Tabel 1.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	I-13
Tabel 1.9	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	I-15
Tabel 1.10	Rincian Program berdasarkan urusan.....	I-15
Tabel 1.11	Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.....	I-29
Tabel 1.12	Target kinerja indikator Program Pembangunan Daerah pada tahun 2024	I-36
Tabel 1.13	Target penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	I-89
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	II-93
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome / Hasil Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	II-100
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome / Hasil Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	II-112
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024	II-115
Tabel 2.5	Belanja program dalam rangka mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2024	II-117
Tabel 2.6	Kriteria Penilaian Kinerja	II-121
Tabel 4.1	Target dan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-151
Tabel 4.2	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-154
Tabel 4.3	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Purworejo Tahun	

DAFTAR TABEL

	2024	IV-154
Tabel 4.4	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo Tahun 2024 .	IV-155
Tabel 4.5	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-157
Tabel 4.6	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-158
Tabel 4.7	Alokasi anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-159
Tabel 4.8	Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-159
Tabel 4.9	Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-159
Tabel 4.10	Target Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-162
Tabel 4.11	Realisasi Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-168
Tabel 4.12	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-169
Tabel 4. 13	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-170
Tabel 4.14	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-171
Tabel 4.15	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-172
Tabel 4.16	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-173
Tabel 4.17	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-175
Tabel 4.18	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-176
Tabel 4.19	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-177

DAFTAR TABEL

Tabel 4.20	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-178
Tabel 4.21	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-179
Tabel 4.22	Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis berat Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-180
Tabel 4.23	Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-181
Tabel 4.24	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-182
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-183
Tabel 4.26	Sumber Daya Personil Pelaksana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-184
Tabel 4.27	Permasalahan Dan Alternatif Solusi Pelaksana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-186
Tabel 4.28	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ..	IV-188
Tabel 4.29	Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-191
Tabel 4.30	Rekapitulasi Layanan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-191
Tabel 4.31	Rekapitulasi Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-192
Tabel 4.32	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-193
Tabel 4.33	Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ...	IV-195
Tabel 4.34	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-196
Tabel 4.35	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-197
Tabel 4.36	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ..	IV-197

DAFTAR TABEL

Tabel 4.37	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ..	IV-198
Tabel 4.38	Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	IV-201
Tabel 4.39	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-203
Tabel 4.40	Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-204
Tabel 4.41	Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-205
Tabel 4.42	Capaian IP SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-206
Tabel 4.43	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	IV-207
Tabel 4.44	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-208
Tabel 4.45	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-208
Tabel 4.46	Target Indikator Kinerja Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-213
Tabel 4.47	Target Pencapaian Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Sub Urusan Kebencanaan di Kabupaten Purworejo tahun 2024	IV-218
Tabel 4.48	Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-220
Tabel 4.49	Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-221
Tabel 4.50	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Trantibum Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-221
Tabel 4.51	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Kebakaaran Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-223
Tabel 4.52	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-225

DAFTAR TABEL

Tabel 4.53	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-226
Tabel 4.54	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-227
Tabel 4.55	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ...	IV-228
Tabel 4.56	Alokasi Anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024	IV-229
Tabel 4.57	Alokasi Anggaran BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-229
Tabel 4.58	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-230
Tabel 4.59	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-231
Tabel 4.60	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-231
Tabel 4.61	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Berdasarkan Jabatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-231
Tabel 4.62	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-232
Tabel 4.63	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-235
Tabel 4.64	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-237
Tabel 4.65	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024	IV-238
Tabel 4.66	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-239
Tabel 4.67	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-241
Tabel 4.68	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-243
Tabel 4.69	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan	

DAFTAR TABEL

	Pengemis di Luar Panti	IV-246
Tabel 4.70	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-248
Tabel 4.71	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-250
Tabel 4.72	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024	IV-251
Tabel 4.73	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-251
Tabel 4.74	Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024	IV-252
Tabel 4.75	Indek Pencapaian SPM pada masing-masing Bidang di Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-252
Tabel 4.76	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024	IV-254
Tabel 4.77	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 .	IV-257
Tabel 4.78	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	IV-258
Tabel 4.79	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2024	IV-259
Tabel 4.80	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-260
Tabel 4.81	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Sub urusan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-262
Tabel 4.82	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	IV-264

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Purworejo	I-2
Gambar 1.2	Peta Pola Ruang Kabupaten Purworejo	I-3
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2024	I-5
Gambar 2.1	Capaian IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	II-94
Gambar 2.2	Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	II-95
Gambar 2.3	Tingkat Pengangguran Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	II-96
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	II-98
Gambar 2.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II-99
Gambar 2.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	II-124
Gambar 4.1	Persentase Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	IV-207

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8);
- 6) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62.

b. Data Geografis Wilayah

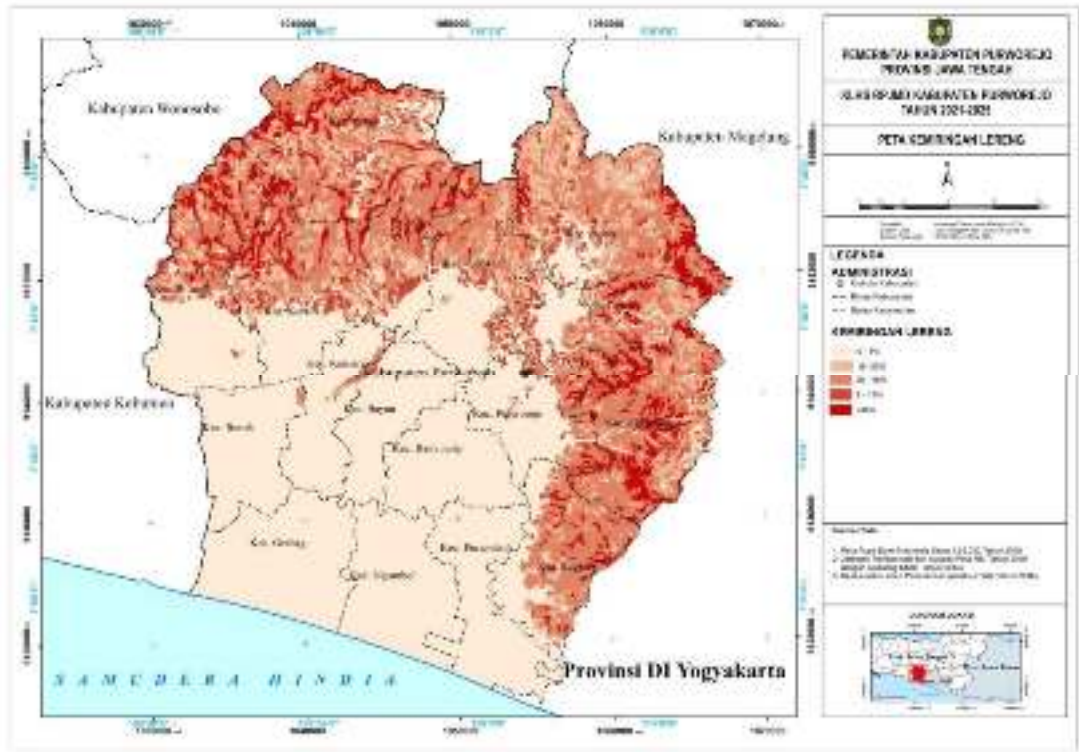
Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 16 kecamatan, terdiri atas 469 desa dan 25 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purworejo.

BAB I

Secara geografis, Kabupaten Purworejo terletak pada posisi antara 109⁰ 47' 28" - 110⁰ 8' 20" Bujur Timur dan 7⁰ 32' – 7⁰ 54" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.081,45 km². yang terdiri dari ± 2/5 daerah dataran dan ± 3/5 daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
- Sebelah selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Kebumen
- Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Purworejo



Sumber : DPUPR Kab.Purworejo, Tahun 2024

- Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:
- 1) Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo;
 - 2) Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
 - 3) Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;

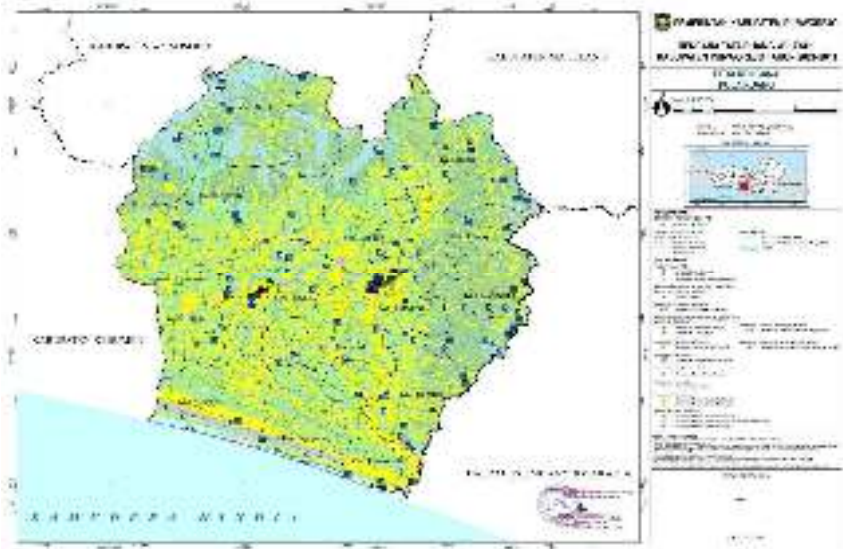
- 4) Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- 2) Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi curah hujan intensitas relatif tinggi sering menyebabkan di beberapa daerah berpotensi banjir dan longsor.

Gambar 1.2
Peta Pola Ruang Kabupaten Purworejo



Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 berjumlah 809,651 jiwa dengan komposisi 50,15% penduduk pria dan 49,85% penduduk wanita. Kabupaten Purworejo

dengan luas wilayah 1.081,45 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 749 jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	GRABAG	26,397	25,988	52,385
2.	NGOMBOL	18,109	18,171	36,280
3.	PURWODADI	21,190	21,477	42,667
4.	BAGELEN	15,670	15,763	31,433
5.	KALIGESING	16,341	16,223	32,564
6.	PURWOREJO	44,274	44,916	89,190
7.	BANYUURIP	22,090	22,409	44,499
8.	BAYAN	26,872	27,068	53,940
9.	KUTOARJO	31,797	31,746	63,543
10.	BUTUH	21,803	21,958	43,761
11.	PITURUH	27,615	27,444	55,059
12.	KEMIRI	31,021	30,504	61,525
13.	BRUNO	29,438	27,872	57,310
14.	GEBANG	22,893	22,624	45,517
15.	LOANO	20,094	19,748	39,842
16.	BENER	30,420	29,716	60,136
	JUMLAH	406,024	403,627	809,651

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Purworejo 2024

Struktur usia penduduk Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

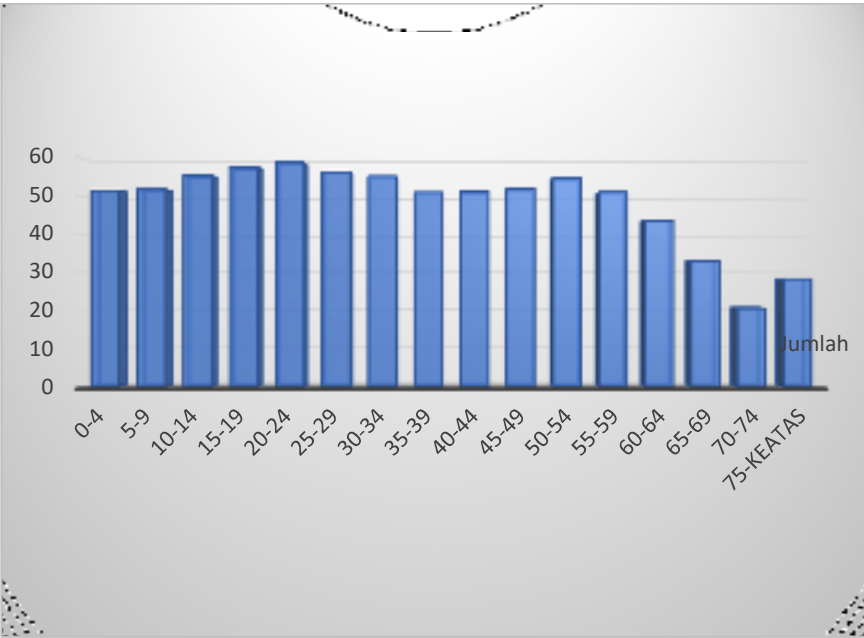
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	24.714	22.959	47.673
5-9	28.277	26.788	55.065
10-14	30.394	28.843	59.237
15-19	30.596	28.980	59.576
20-24	31.731	29.858	61.589
25-29	31.389	28.831	60.220
30-34	28.869	26.943	55.812
35-39	27.602	26.996	54.598
40-44	28.044	27.270	55.314
45-49	26.647	26.474	53.121
50-54	25.113	26.582	51.695
55-59	26.299	28.616	54.915
60-64	23.545	25.336	48.881
65-69	18.164	19.188	37.352
70-74	11.788	12.697	24.485
75 keatas	12.852	17.266	30.118
Jumlah	406.024	403.627	809.651

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Purworejo 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prosentase penduduk terbesar berada pada rentang usia 20-24 tahun dengan persentase sebesar 7,61%. Kemudian sebesar 68,64% Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun. Artinya bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 berada pada rentang usia produktif.

Gambar 1.3.
Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2024



Sumber : Bag. Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, 2025

Laju pertumbuhan dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah sebesar 0.23%. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2024 berjumlah 807,790 jiwa, mengalami kenaikan pada sepanjang tahun 2024 hingga per 31 Desember 2024 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menjadi 809.651 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah desa dan luas menurut kecamatan sebagaimana pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Desa dan Luas Kecamatan
Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	Jml Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
1.	Grabag	32	67,80
2.	Ngombol	57	59,33
3.	Purwodadi	40	56,15
4.	Bagelen	17	63,44

No.	Kecamatan	Jml Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
5.	Kaligesing	21	78,33
6.	Purworejo	25	53,25
7.	Banyuurip	27	47,78
8.	Bayan	26	44,66
9.	Kutoarjo	27	39,20
10.	Butuh	41	47,21
11.	Pituruh	49	89,01
12.	Kemiri	40	103,15
13.	Bruno	18	105,68
14.	Gebang	25	70,51
15.	Loano	21	53,51
16.	Bener	28	102,44
	Jumlah	494	1.081,45

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Dasar Hukum pembentukannya di Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.4

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Dasar Hukum di Pemerintah Kabupaten Purworejo

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	SEKRETARIAR DAERAH	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141 Tahun 2022
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022
3	INSPEKTORAT DAERAH	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 119 Tahun 2022
5	DINAS KESEHATAN DAERAH	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 143 Tahun 2022
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2022
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2022
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 125 Tahun 2022
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 126 Tahun 2022
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022
14	DINAS PERHUBUNGAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 128 Tahun 2022
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 129 Tahun 2022
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2022
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2022
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022
20	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2024
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2022
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 138 Tahun 2022
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2022
27	KECAMATAN	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023
43	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A TJOKRONEGORO	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2020

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo,
31 Desember 2024

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, penyelenggaraannya berdasarkan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Sekretariat Daerah	Fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya	16	35	72	123
2	Sekretariat DPRD	Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	5	3	22	30
3	Staf Ahli	Fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya	3	0	0	3
4	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	9	37	17	63
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	6	1	13	20
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan	5	16	8	29
7	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan	7	15	10	32
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sub urusan bencana	6	5	11	22
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan	20	5	48	73
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan	10	5168	165	5343
11	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	9	9	15	33
12	Dinas Kesehatan Daerah	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	9	1270	104	1383
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	7	11	8	26
14	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral	6	24	10	40
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	7	1	13	21
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, bidang olahraga dan bidang pariwisata	10	1	32	43

BAB I

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan	3	16	9	28
18	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Urusan pemerintahan bidang sosial bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana	11	8	13	32
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	6	8	26	40
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian	11	132	35	178
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	8	9	53	70
22	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang Kelautan dan Perikanan	10	13	67	90
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	3	4	8	15
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	10	4	15	29
25	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	18	29	72	119
26	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran	12	25	34	71
27	Rsud Dr. Tjitrowardojo Kelas B Dinas Kesehatan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	13	356	62	431
28	Rsud Kelas C Raden Adipati Arya Tjokronegoro	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	11	278	32	321
29	Kecamatan Bagelen	Urusan Kewilayahan	7	2	7	16
30	Kecamatan Banyuurip	Urusan Kewilayahan	18	1	11	30
31	Kecamatan Bayan	Urusan Kewilayahan	11	2	9	22
32	Kecamatan Bener	Urusan Kewilayahan	7	2	6	15
33	Kecamatan Bruno	Urusan Kewilayahan	8	2	7	17
34	Kecamatan Butuh	Urusan Kewilayahan	7	3	11	21
35	Kecamatan Gebang	Urusan Kewilayahan	13	2	8	23
36	Kecamatan Grabag	Urusan Kewilayahan	8	2	10	20
37	Kecamatan Kaligesing	Urusan Kewilayahan	6	2	5	13
38	Kecamatan Kemiri	Urusan Kewilayahan	8	2	10	20
39	Kecamatan Kutoarjo	Urusan Kewilayahan	34	2	21	57
40	Kecamatan Loano	Urusan Kewilayahan	8	1	6	15
41	Kecamatan Ngombol	Urusan Kewilayahan	6	1	9	16
42	Kecamatan Pituruh	Urusan Kewilayahan	6	1	10	17
43	Kecamatan Purwodadi	Urusan Kewilayahan	7	2	8	17

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
44	Kecamatan Purworejo	Urusan Kewilayahan	69	2	23	94
JUMLAH			474	7512	1135	9121

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purworejo, 31 Desember 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah ASN di Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 9.121 pegawai yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan rincian Struktural 474 orang, Fungsional 7.512 orang dan Pelaksana 1.135 orang.

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel 1.5 di bawah ini :

Tabel 1.6
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.436.474.409.065,00	2.408.812.796.754,00	98,86
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	455.552.275.285,00	448.842.283.387,00	98,53
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	108.888.556.465,00	104.217.550.433,00	95,71
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	323.475.535.932,00	319.419.586.283,00	98,75
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.119.649.872,00	16.119.649.871,00	100,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	7.068.533.016,00	9.085.496.800,00	128,53
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.979.509.633.780,00	1.958.558.013.367,00	98,94
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.330.714.780,00	1.812.249.208.453,00	99,50
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	1.427.117.110.780,00	1.418.035.604.453,00	99,36
4 . 2 . 1 . 2	Insentif Fiskal	7.523.866.000,00	7.523.866.000,00	100,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	386.689.738.000,00	386.689.738.000,00	100,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	158.178.919.000,00	146.308.804.914,00	92,50
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	134.884.297.000,00	123.330.794.714,00	91,43
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	23.294.622.000,00	22.978.010.200,00	98,64
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00
5	BELANJA DAERAH	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.740.377.613.618,32	1.647.047.620.760,00	94,64
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.017.582.326.691,32	966.146.061.626,73	94,95
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	592.705.112.895,00	554.737.434.404,27	93,59

BAB I

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	0,00	0,00	---
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	125.247.124.032,00	121.455.043.609,00	96,97
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	4.843.050.000,00	4.709.081.120,00	97,23
5 . 2	BELANJA MODAL	204.021.963.655,00	195.518.897.274,00	95,83
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	---
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.277.300.019,00	82.515.623.101,00	93,47
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.505.777.168,00	24.424.808.327,00	95,76
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.902.731.088,00	84.341.053.291,00	98,18
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.336.155.380,00	4.162.412.555,00	95,99
	Belanja Modal Aset Lainnya	93.648.900,00	75.000.000,00	
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.707.053.100,00	0,00	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	1.707.053.100,00	0,00	0,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	98,40
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	13.603.763.700,00	12.745.328.782,00	93,69
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	565.158.752.728,00	556.755.560.777,00	98,51
		-88.394.737.736,32	-3.254.610.839,00	3,68
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.488.386.636,32	88.488.386.636,32	100,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.488.386.636,32	88.488.386.636,32	100,00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	---
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	---
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	---
6 . 2 . 3	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	---
	PEMBIAYAAN NETTO	88.488.386.636,32	88.488.386.636,32	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		85.233.775.797,32	

Sumber : Sumber : BPKPAD Kab.Purworejo, Per Tanggal 30 Februari 2025

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar **Rp88.488.386.636,32** (*delapan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam koma tiga puluh dua rupiah*) dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar **Rp0,00** (*nol rupiah*).

Dengan demikian, berarti terdapat relisasi pembiayaan netto sebagai selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar **Rp88.488.386.636,32** (*delapan puluh delapan miliar*

empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam koma tiga puluh dua rupiah).

Karena dari realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah menyebabkan adanya defisit sebesar **(Rp3.254.610.839,00)** (*tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) ditambah pembiayaan netto sebesar **Rp88.488.386.636,32** (*delapan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam koma tiga puluh dua rupiah*) maka Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan terealisasi sebesar **Rp85.233.775.797,32** (*delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah*)

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Rincian realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.7
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.436.474.409.065,00	2.408.812.796.754,00	98,86
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	455.552.275.285,00	448.842.283.387,00	98,53
4.1.1	Pajak Daerah	108.888.556.465,00	104.217.550.433,00	95,71
4.1.2	Retribusi Daerah	323.475.535.932,00	319.419.586.283,00	98,75
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.119.649.872,00	16.119.649.871,00	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7.068.533.016,00	9.085.496.800,00	128,53
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.979.509.633.780,00	1.958.558.013.367,00	98,94
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.330.714.780,00	1.812.249.208.453,00	99,50
4.2.1.01	Dana Perimbangan	1.427.117.110.780,00	1.418.035.604.453,00	99,36
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26.914.608.400,00	29.857.280.000,00	110,93
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.034.956.526.200,00	1.028.441.374.978,00	99,37
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.492.715.300,00	86.119.209.955,00	96,23
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	275.753.260.880,00	273.617.739.520,00	99,23
4.2.1.05	Dana Desa	386.689.738.000,00	386.689.738.000,00	100,00
4.2.1.05.01	Dana Desa	386.689.738.000,00	386.689.738.000,00	100,00
4.2.1.06	Insentif Fiskal	7.523.866.000,00	7.523.866.000,00	100,00
4.2.1.06.01	Insentif Fiskal	7.523.866.000,00	7.523.866.000,00	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	158.178.919.000,00	146.308.804.914,00	92,50
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	134.884.297.000,00	123.330.794.714,00	91,43
4.2.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.884.297.000,00	123.330.794.714,00	91,43
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	23.294.622.000,00	22.978.010.200,00	98,64
4.2.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	23.294.622.000,00	22.978.010.200,00	98,64
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	100,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.412.500.000,00	-	-
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	1.412.500.000,00	100,00

Sumber : BPKPAD Kab.Purworejo, Per Tanggal 30 Februari 2025

Sesuai tabel 1.6 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 mencapai **Rp2.408.812.796.754,00** (*Dua trilyun empat ratus delapan milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*) dengan capaian **98,86%** dari target APBD **Rp2.436.474.409.065,00** (*Dua trilyun empat ratus tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu enam puluh lima rupiah*).

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Rincian realisasi pendapatan menurut jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	95,53
5,1	BELANJA OPERASI	1.740.377.613.618,32	1.647.047.620.760,00	94,64
5.1.1	Belanja Pegawai	1.017.582.326.691,32	966.146.061.626,73	94,95
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	592.705.112.895,00	554.737.434.404,27	93,59
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	125.247.124.032,00	121.455.043.609,00	96,97
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.843.050.000,00	4.709.081.120,00	97,23
5,2	BELANJA MODAL	204.115.612.555,00	195.518.897.274,00	95,79
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.277.300.019,00	82.515.623.101,00	93,47

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.505.777.168,00	24.424.808.327,00	95,76
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.902.731.088,00	84.341.053.291,00	98,18
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.336.155.380,00	4.162.412.555,00	95,99
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	93.648.900,00	75.000.000,00	80,09
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.707.053.100,00	-	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.707.053.100,00	-	-
5,4	BELANJA TRANSFER	578.762.516.428,00	569.500.889.559,00	98,40
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.603.763.700,00	12.745.328.782,00	93,69
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	565.158.752.728,00	556.755.560.777,00	98,51
	Surplus / (Defisit)	(88.488.386.636,32)	(3.254.610.839,00)	3,68

Sumber : BPKPAD Kab.Purworejo, Per Tanggal 30 Februari 2025

Secara keseluruhan realisasi belanja daerah dapat tercapai sebesar **95,53%** atau **Rp2.412.067.407.593,00** (*Dua trilyun empat ratus dua belas miliar enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah*) dari target yang dianggarkan sebesar **Rp2.524.962.795.701,32** (*Dua trilyun lima ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus satu koma tiga puluh dua rupiah*). Dengan demikian, berarti terdapat sisa belanja daerah sebesar **Rp112.895.388.108,32** (*Seratus dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan koma tiga puluh dua rupiah*).

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran yang direncanakan. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila sebaliknya, yaitu anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah.

Tabel 1.9
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.488.386.636,32	88.488.386.636,32	100
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.488.386.636,32	88.488.386.636,32	100
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	100,00
	Pembiayaan Netto	88.488.386.636,32	88.488.386.636,32	100
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		85.233.775.797,32	

Sumber : BPKPAD Kab.Purworejo, Per Tanggal 30 Februari 2025

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Dalam pelaksanaan program penganggaran tahun 2024 dijabarkan berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel I.10
Rincian Program berdasarkan urusan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan		729.341.246.526,32	689.515.925.041,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	579.010.041.385,32	544.371.664.912,00
b	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	150.117.195.241,00	144.956.092.289,00
c	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	79.258.200,00	76.130.600,00
d	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	33.295.400,00	30.868.700,00
e	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	19.469.400,00	11.471.600,00
f	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	81.986.900,00	69.696.940,00
2	Kesehatan		551.900.089.233,00	522.860.956.113,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	439.410.328.599,00	420.540.040.857,00

BAB I

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	109.728.541.829,00	100.073.127.958,00
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.401.754.535,00	1.169.640.231,00
d	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	506.148.445,00	342.073.208,00
e	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	853.315.825,00	736.073.859,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		131.059.560.841,00	127.010.955.770,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.740.581.877,00	13.468.971.094,00
b	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	11.418.949.300,00	11.305.081.479,00
c	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.540.682.700,00	12.858.567.455,00
d	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.684.441.000,00	5.604.175.828,00
e	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	945.360.000,00	935.263.750,00
f	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	187.500.980,00	185.861.408,00
g	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0	0
h	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	83.794.526.384,00	81.968.235.749,00
i	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	206.362.100,00	171.743.107,00
j	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	541.156.500,00	513.055.900,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		10.306.156.141,00	10.036.986.698,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.094.061.238,00	3.007.418.188,00
b	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	286.542.373,00	282.029.751,00
c	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	243.970.100,00	234.307.030,00
d	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.104.516.400,00	1.023.394.976,00
e	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	5.577.066.030,00	5.489.836.753,00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		24.286.819.848,00	23.444.076.754,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.339.384.117,00	7.199.837.693,00
b	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.464.850.664,00	5.263.544.999,00
c	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.045.718.600,00	2.964.688.109,00
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.531.539.967,00	3.386.860.724,00
e	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	4.905.326.500,00	4.629.145.229,00
6	Sosial		9.978.677.984,00	9.598.007.370,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.077.672.784,00	4.875.945.557,00
b	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	26.389.200,00	20.635.020,00

BAB I

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
c	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.000.000,00	3.114.200,00
d	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	252.963.100,00	188.222.878,00
e	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.373.109.300,00	4.316.154.015,00
f	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	175.572.100,00	131.812.950,00
g	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	68.971.500,00	62.122.750,00
7	Tenaga Kerja		3.601.592.041,00	3.406.212.878,00
a	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.919.200,00	23.769.100,00
b	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.280.236.141,00	3.133.781.950,00
c	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	152.978.600,00	105.037.138,00
d	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	144.458.100,00	143.624.690,00
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		5.546.395.184,00	5.337.858.145,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.468.716.004,00	4.261.290.357,00
b	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	466.276.980,00	466.240.278,00
c	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	367.605.860,00	367.071.314,00
d	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	8.258.200,00	7.958.200,00
e	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	29.771.340,00	29.722.896,00
f	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	192.042.140,00	191.933.200,00
g	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	13.724.660,00	13.641.900,00
9	Pangan		18.996.195.984,00	18.428.902.673,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.717.501.584,00	18.160.985.697,00
b	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	132.574.800,00	132.103.666,00
c	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	106.794.000,00	96.813.550,00
d	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.325.600,00	38.999.760,00
10	Pertanahan		183.396.560,00	178.228.046,00
a	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	87.137.960,00	85.457.038,00
b	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	96.258.600,00	92.771.008,00
11	Lingkungan Hidup		20.705.953.937,00	19.638.289.539,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.802.735.027,00	8.588.472.184,00
b	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	146.951.400,00	141.143.688,00
c	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	319.860.900,00	316.781.386,00
d	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.107.511.183,00	4.037.844.865,00
e	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.959.100,00	10.874.000,00

BAB I

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
f	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	72.388.300,00	72.268.740,00
g	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	310.154.400,00	294.072.700,00
h	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93.256.000,00	91.376.604,00
i	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65.000.000,00	62.849.429,00
j	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13.033.500,00	13.033.500,00
k	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	6.764.104.127,00	6.009.572.443,00
12	Administrasi Kependudukan dan Capil		6.776.912.379,00	6.583.155.082,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.540.544.256,00	5.356.461.019,00
b	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	949.106.865,00	944.827.642,00
c	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	128.400.260,00	123.904.400,00
d	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131.386.538,00	130.971.821,00
e	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.474.460,00	26.990.200,00
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa		8.613.810.860,00	8.209.166.265,00
a	Program Penataan Desa	Program Penataan Desa	70.000.000,00	69.951.256,00
b	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	71.934.440,00	71.885.556,00
c	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.965.858.340,00	5.566.949.763,00
d	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.506.018.080,00	2.500.379.690,00
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10.057.791.900,00	9.559.178.012,00
a	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	647.124.400,00	606.256.450,00
b	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.302.874.500,00	4.869.617.146,00
c	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	4.107.793.000,00	4.083.304.416,00
15	Perhubungan		27.182.526.787,00	24.230.064.039,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.315.905.103,00	4.788.715.752,00
b	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	21.866.621.684,00	19.441.348.287,00
16	Komunikasi dan Informatika		10.377.779.530,00	10.235.049.375,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.626.582.720,00	3.573.925.003,00
b	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.314.739.410,00	1.312.855.173,00
c	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.436.457.400,00	5.348.269.199,00
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		12.291.230.019,00	10.822.712.741,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.380.705.407,00	7.946.912.074,00

BAB I

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
b	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.499.000,00	2.374.000,00
c	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	4.649.000,00	3.689.200,00
d	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	24.629.600,00	24.549.900,00
e	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	516.346.000,00	501.612.544,00
f	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	66.808.000,00	66.763.900,00
g	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1.519.561.552,00	1.507.458.833,00
h	Program Pengembangan Umkm	Program Pengembangan Umkm	776.031.460,00	769.352.290,00
18	Penanaman Modal		4.129.740.882,00	3.670.155.642,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.492.744.197,00	2.389.386.741,00
b	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.893.720,00	74.469.925,00
c	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	277.716.990,00	241.279.526,00
d	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	413.711.450,00	408.666.905,00
e	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	798.985.000,00	494.037.340,00
f	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.689.525,00	62.315.205,00
19	Kepemudaan dan Olah Raga		14.304.743.331,00	13.820.422.112,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.058.893.265,00	4.876.887.529,00
b	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	595.474.838,00	462.174.450,00
c	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.303.980.648,00	8.136.245.133,00
d	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	346.394.580,00	345.115.000,00
20	Statistik		109.973.800,00	109.793.012,00
a	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	109.973.800,00	109.793.012,00
21	Persandian		156.516.700,00	135.769.071,00
a	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	156.516.700,00	135.769.071,00
22	Kebudayaan		7.672.487.400,00	7.410.202.517,00
a	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	5.077.854.700,00	4.931.860.429,00
b	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	55.851.500,00	52.758.800,00
c	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	613.827.000,00	604.502.500,00
d	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	429.407.300,00	402.060.188,00
e	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	1.495.546.900,00	1.419.020.600,00
23	Perpustakaan		6.149.495.241,00	5.782.387.002,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.484.505.711,00	4.164.540.700,00
b	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	1.648.047.530,00	1.601.330.427,00
c	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	16.942.000,00	16.515.875,00

BAB I

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
24	Kearsipan		427.185.530,00	419.258.542,00
a	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	377.181.430,00	370.003.042,00
b	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	50.004.100,00	49.255.500,00
25	Kelautan dan Perikanan		1.283.094.400,00	1.262.132.004,00
a	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.245.400,00	29.217.288,00
b	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.121.861.900,00	1.101.956.776,00
c	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	26.115.800,00	25.779.900,00
d	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	105.871.300,00	105.178.040,00
26	Pariwisata		13.774.979.747,00	12.892.543.939,00
a	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.488.649.705,00	8.858.655.134,00
b	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	3.016.305.920,00	2.807.961.438,00
c	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	41.937.400,00	41.246.900,00
d	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.228.086.722,00	1.184.680.467,00
27	Pertanian		26.128.428.850,00	24.247.470.225,00
a	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.310.408.450,00	12.035.419.120,00
b	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.430.509.400,00	10.044.137.850,00
c	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	903.917.300,00	744.576.156,00
d	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	115.990.200,00	105.043.080,00
e	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	1.367.603.500,00	1.318.294.019,00
28	Perdagangan		5.860.869.560,00	5.648.972.233,00
a	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.104.227.900,00	4.897.018.177,00
b	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	81.453.200,00	81.157.078,00
c	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	424.155.510,00	422.571.800,00
d	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	240.313.550,00	237.715.278,00
e	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10.719.400,00	10.509.900,00
29	Perindustrian		9.076.451.719,00	8.783.554.169,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.722.106.819,00	6.462.659.902,00
b	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.334.486.600,00	2.301.145.967,00
c	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.848.300,00	4.778.300,00
d	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.010.000,00	14.970.000,00
30	Transmigrasi		116.960.800,00	111.112.995,00
a	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	116.960.800,00	111.112.995,00
31	Sekretariat Daerah		35.051.497.561,00	34.208.540.858,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.359.553.641,00	25.577.403.645,00

BAB I

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
b	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.084.022.100,00	8.054.049.953,00
c	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	607.921.820,00	577.087.260,00
32	Sekretariat DPRD		65.083.915.065,00	58.970.724.286,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.036.324.705,00	31.822.592.378,00
b	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	32.047.590.360,00	27.148.131.908,00
33	Perencanaan		5.725.826.477,00	5.534.729.028,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.512.813.727,00	4.333.451.128,00
b	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	743.183.250,00	736.836.100,00
c	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	469.829.500,00	464.441.800,00
34	Keuangan		601.996.075.344,00	588.635.120.985,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.972.002.069,00	13.203.581.203,00
b	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	581.616.021.362,00	570.624.004.431,00
c	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.041.648.870,00	871.031.452,00
d	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.366.403.043,00	3.936.503.899,00
35	Kepegawaian		5.162.106.956,00	4.988.759.155,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.105.593.739,00	4.001.094.160,00
b	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	1.056.513.217,00	987.664.995,00
36	Pendidikan dan Pelatihan		1.483.594.500,00	1.443.323.383,00
a	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.483.594.500,00	1.443.323.383,00
37	Penelitian dan Pengembangan		1.166.516.500,00	1.148.013.740,00
a	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.166.516.500,00	1.148.013.740,00
38	Inspektorat		15.155.568.897,00	14.251.897.637,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.974.851.031,00	11.473.126.221,00
b	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.735.052.766,00	1.450.800.321,00
c	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.445.665.100,00	1.327.971.095,00
39	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		82.087.472.371,00	78.746.692.989,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.120.208.093,00	54.558.072.069,00
b	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	633.786.800,00	583.137.380,00
c	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.219.525.878,00	20.697.880.069,00
d	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	599.758.100,00	541.287.621,00
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	675.282.600,00	649.178.650,00
f	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.838.910.900,00	1.717.137.200,00
40	Kesatuan Bangsa dan Politik		41.653.158.316,00	40.750.107.528,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.781.043.759,00	2.687.519.029,00
b	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.643.439.300,00	1.297.191.352,00
c	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	32.212.154.157,00	32.198.573.137,00
d	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.796.077.700,00	3.695.521.290,00
e	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	383.576.500,00	287.244.050,00
f	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	836.866.900,00	584.058.670,00
			2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00

Sumber : BPKPAD Kab. Purworejo 2025

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Purworejo yang sedang dan akan dihadapi tahun 2024 dan harus diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan yang Berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama

- Beberapa Identifikasi Permasalahan yang Berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:
- a) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo
 - b) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang stagnan mengakibatkan capaian belum optimal.
 - c) Pertumbuhan Ekonomi yang belum optimal
 - d) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang masih perlu ditingkatkan.

2) Permasalahan yang Berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

- Beberapa Identifikasi Permasalahan yang Berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah antara lain:
- a) Belum optimalnya rata-rata lama sekolah
 - b) Harapan Lama Sekolah yang belum optimal
 - c) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
 - d) Belum optimalnya Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga yang aktif

- e) Masih tingginya kelompok RT 20% berpenghasilan terendah
- f) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang belum optimal
- g) Belum optimalnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- h) Belum optimalnya PDRB per Kapita
- i) Indeks Desa Membangun (IDM) yang belum optimal
- j) Masih rendahnya Nilai SAKIP
- k) Indeks Pelayanan Publik yang masih perlu ditingkatkan
- l) Belum optimalnya peningkatan Indeks Inovasi Daerah
- m) Indeks Infrastruktur Daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian karena capaiannya belum optimal.

3) Permasalahan yang Berhubungan dengan Program Pembangunan Daerah

Beberapa Identifikasi Permasalahan yang Berhubungan dengan Program Pembangunan Daerah antara lain :

- a) Belum optimalnya Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD
- b) Belum optimalnya Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
- c) Belum Optimalnya Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama
- d) Masih rendahnya Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan
- e) Masih rendahnya Ketersediaan Pangan Utama
- f) Belum Optimalnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- g) Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif belum optimal
- h) Belum optimalnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
- i) Masih rendahnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
- j) Masih rendahnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
- k) Masih rendahnya Pertumbuhan PMTB

Dari hasil identifikasi permasalahan-permasalahan strategis tersebut, terdapat lima isu strategis dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini, yaitu:

- 1) Kualitas sumber daya manusia;
- 2) Tata kelola kelembagaan;
- 3) Kemiskinan;
- 4) Pertumbuhan ekonomi; serta
- 5) Kebencanaan dan pelestarian lingkungan.

Selanjutnya, dari isu-isu strategis tersebut, ditentukan tema pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 yakni **“Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Penguatan Sektor Ekonomi yang Unggul dan Berwawasan Lingkungan Global”**.

Selanjutnya, tema pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2024 akan dicapai melalui 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut:

a. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan

Prioritas daerah Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Pertumbuhan Ekonomi”. Prioritas ini diarahkan pada program peningkatan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; program peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan; program peningkatan nilai tambah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; program peningkatan nilai tambah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; program peningkatan investasi daerah; serta program pembangunan perdesaan. Prioritas pembangunan ini di tahun 2024 difokuskan pada:

1. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan sebagai sektor dominan di Kabupaten Purworejo yang diukur dengan kenaikan nilai PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan target sebesar 2.983.634,70 (dalam juta rupiah) pada tahun 2024, dicapai melalui program unggulan Tani Rejo Joyo dan Purworejo Tuwuh Ngunduh.
2. Peningkatan sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Purworejo yang diukur melalui Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan yang ditargetkan sebesar 6,41% pada tahun 2024.
3. Peningkatan daya saing sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil &

Sepeda yang ditargetkan sebesar 5,18% pada tahun 2024.

- 4. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dan kebudayaan berbasis sumber daya lokal dan mendukung pada pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum dengan target sebesar 6,03% pada tahun 2024.
- 5. Peningkatan investasi daerah direpresentasikan melalui pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan target sebesar 5,99% pada tahun 2024.
- 6. Peningkatan pembangunan perdesaan dengan mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan yang diukur melalui Persentase Desa Mandiri dan Maju dengan target sebesar 64,82% pada tahun 2024.

b. Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana

Prioritas daerah Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Kebencanaan dan Pelestarian Lingkungan”. Prioritas ini diarahkan pada program akses infrastruktur, program pengelolaan lingkungan hidup, serta program penanggulangan dan penanganan bencana. Prioritas pembangunan ini di tahun 2024 difokuskan pada:

- 1. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan permukiman yang meliputi jaringan transportasi, air bersih, air limbah, drainase, energi kelistrikan, telekomunikasi dan persampahan yang diukur melalui Indeks Infrastruktur Daerah dengan target 91,47 pada tahun 2024.
- 2. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan target 75,86 pada tahun 2024, yang dapat dijabarkan dalam IKA, IKU, dan IKTL.
- 3. Peningkatan kapasitas daerah serta masyarakat dalam penanggulangan dan penanganan bencana daerah yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,80 pada tahun 2024.

c. Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas daerah Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran merupakan

tindak lanjut dari isu strategis “Kemiskinan”. Prioritas ini diarahkan pada program penanganan PPKS dan program peningkatan kesempatan kerja. Prioritas pembangunan ini di tahun 2024 difokuskan pada:

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2024. Dilakukan pendekatan pemenuhan *basic need access* untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Sasaran program ini terutama untuk penduduk miskin dan rentan miskin dan kelompok rentan lainnya.
2. Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memperluas kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran terbuka diukur dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 96,93%.

d. Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Prioritas daerah Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Kualitas Sumber Daya Manusia”. Prioritas ini diarahkan pada program pendidikan, program literasi, program kesehatan, program pemenuhan ketersediaan pangan, program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, program pemberdayaan gender dan perlindungan anak, serta program pembangunan pemuda dan olahraga. Prioritas pembangunan ini di tahun 2024 difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang diukur dengan persentase partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang pada tahun 2024 ditargetkan masing-masing sebesar 100%.
2. Guna menunjang kualitas pendidikan perlu didorong melalui peningkatan minat baca dan literasi masyarakat yang diukur dengan peningkatan pengunjung perpustakaan ditargetkan sebesar 5% yang pada tahun 2024.
3. Pembangunan kesehatan melalui peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan yang diukur dengan peningkatan angka harapan hidup yang ditargetkan sebesar 75,30 pada tahun 2024.
4. Peningkatan ketersediaan pangan utama yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka

- menciptakan pemerataan pangan yang ditargetkan sebesar 255 kilogram per kapita pada tahun 2024.
5. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dengan indikator *total fertility rate* (TFR) atau angka kelahiran total ditargetkan sebesar 1,16 yang pada tahun 2024.
 6. Peningkatan kesetaraan gender serta pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator indeks pemberdayaan gender yang ditargetkan sebesar 74,70 pada tahun 2024.
 7. Pembangunan pemuda dan olahraga diukur dengan indikator persentase organisasi kepemudaan dan olahraga yang aktif yang ditargetkan sebesar 100,00% pada tahun 2024.

e. Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan

Prioritas daerah Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Tata Kelola Kelembagaan”. Prioritas ini diarahkan pada program manajemen berbasis risiko, program peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, program peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, program manajemen sumber daya aparatur, program peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program peningkatan inovasi daerah. Prioritas pembangunan ini di tahun 2024 difokuskan pada:

1. Peningkatan efektivitas manajemen berbasis risiko dalam pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah yang diukur melalui Manajemen Risiko Index (MRI) pada tahun 2024 ditargetkan 2,80.
2. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah yang diukur indikator pencapaian opini BPK pada tahun 2024 ditargetkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang sinergi, sinkron, dan terintegrasi dalam pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang diukur dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 99,24.
4. Penguatan manajemen sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan indikator Indeks Sistem Merit ditargetkan sebesar 0,76 pada tahun 2024.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi dan informasi serta berorientasi pada

kebutuhan masyarakat diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik ditargetkan sebesar 4,25 pada tahun 2024.

- 6. Penguatan inovasi daerah melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal yang memberikan manfaat bagi masyarakat diukur dengan indikator Indeks Inovasi Daerah ditargetkan sebesar 67 pada tahun 2024.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Purworejo yaitu:

“Purworejo Berdaya Saing 2025.”

Visi tersebut, dijabarkan kedalam 5 Misi disebut juga “*Panca Daya Saing*”, yaitu:

- 1) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
- 2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.
- 3) Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
- 4) Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 5) Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pememerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Guna mewujudkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tersebut, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah dikelompokkan sesuai masing-masing urusan.

Anggaran belanja program dalam rangka mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tersebut tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, dirinci sebagai berikut :

Tabel I.11
Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

No	Program Prioritas	Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pendidikan	150.117.195.241,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kurikulum	79.258.200,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	33.295.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	19.469.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	81.986.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6	Program Pengembangan Kebudayaan	5.077.854.700,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	55.851.500,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8	Program Pembinaan Sejarah	613.827.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	429.407.300,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10	Program Pengelolaan Permuseuman	1.495.546.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	109.728.541.829,00	Dinas Kesehatan Daerah
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.401.754.535,00	Dinas Kesehatan Daerah
13	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	506.148.445,00	Dinas Kesehatan Daerah
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	853.315.825,00	Dinas Kesehatan Daerah
15	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	11.418.949.300,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.540.682.700,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.684.441.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
18	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	945.360.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
19	Program Penataan Bangunan Gedung	187.500.980,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
20	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BAB I

No	Program Prioritas	Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4
21	Program Penyelenggaraan Jalan	83.794.526.384,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
22	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	206.362.100,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
23	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	541.156.500,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
24	Program Pengembangan Perumahan	286.542.373,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
25	Program Kawasan Permukiman	243.970.100,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
26	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.104.516.400,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
27	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	5.577.066.030,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
28	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	87.137.960,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
29	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	96.258.600,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
30	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.464.850.664,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
31	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.045.718.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
32	Program Penanggulangan Bencana	4.905.326.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Program Pemberdayaan Sosial	26.389.200,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
34	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.000.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
35	Program Rehabilitasi Sosial	252.963.100,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
36	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.373.109.300,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
37	Program Penanganan Bencana	175.572.100,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
38	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	68.971.500,00	Dinas Sosial, Pengendalian

BAB I

No	Program Prioritas	Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4
			Penduduk Dan Keluarga Berencana
39	Program Pengendalian Penduduk	647.124.400,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
40	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.302.874.500,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
41	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	4.107.793.000,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
42	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	466.276.980,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
43	Program Perlindungan Perempuan	367.605.860,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
44	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	8.258.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
45	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	29.771.340,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
46	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	192.042.140,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
47	Program Perlindungan Khusus Anak	13.724.660,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
48	Program Penataan Desa	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
49	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	71.934.440,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
50	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.965.858.340,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Program Prioritas	Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4
			Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
51	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.506.018.080,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
52	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	132.574.800,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
53	Program Penanganan Kerawanan Pangan	106.794.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
54	Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.325.600,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
55	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.310.408.450,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
56	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.430.509.400,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
57	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	903.917.300,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
58	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	115.990.200,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
59	Program Penyuluhan Pertanian	1.367.603.500,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
60	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	146.951.400,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
61	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	319.860.900,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
62	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.107.511.183,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
63	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.959.100,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
64	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	72.388.300,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
65	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	310.154.400,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
66	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93.256.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
67	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
68	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13.033.500,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan

No	Program Prioritas	Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4
69	Program Pengelolaan Persampahan	6.764.104.127,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
70	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.245.400,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
71	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.121.861.900,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
72	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	26.115.800,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
73	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	105.871.300,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
74	Program Pendaftaran Penduduk	949.106.865,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
75	Program Pencatatan Sipil	128.400.260,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
76	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131.386.538,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
77	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.474.460,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
78	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	21.866.621.684,00	Dinas Perhubungan
79	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.314.739.410,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
80	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.436.457.400,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
81	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	109.973.800,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
82	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	156.516.700,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
83	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.499.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
84	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	4.649.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
85	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	24.629.600,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
86	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	516.346.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
87	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	66.808.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
88	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	1.519.561.552,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
89	Program Pengembangan Umkm	776.031.460,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
90	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.104.227.900,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

No	Program Prioritas	Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4
91	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	81.453.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
92	Program Pengembangan Ekspor	424.155.510,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
93	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	240.313.550,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
94	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10.719.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
95	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.893.720,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
96	Program Promosi Penanaman Modal	277.716.990,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
97	Program Pelayanan Penanaman Modal	413.711.450,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
98	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	798.985.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
99	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.689.525,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	595.474.838,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
101	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.303.980.648,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
102	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	346.394.580,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
103	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.488.649.705,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
104	Program Pemasaran Pariwisata	3.016.305.920,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
105	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	41.937.400,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
106	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.228.086.722,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
107	Program Pembinaan Perpustakaan	1.648.047.530,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
108	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	16.942.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
109	Program Pengelolaan Arsip	377.181.430,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Program Prioritas	Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4
110	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	50.004.100,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
111	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.919.200,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
112	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.280.236.141,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
113	Program Penempatan Tenaga Kerja	152.978.600,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
114	Program Hubungan Industrial	144.458.100,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
115	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.334.486.600,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
116	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.848.300,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
117	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.010.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
118	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	116.960.800,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
119	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.084.022.100,00	Sekretariat Daerah
120	Program Perekonomian Dan Pembangunan	607.921.820,00	Sekretariat Daerah
121	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	32.047.590.360,00	Sekretariat Dprd
122	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	743.183.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
123	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	469.829.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
124	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.166.516.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
125	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	581.616.021.362,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
126	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.041.648.870,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
127	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.366.403.043,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
128	Program Kepegawaian Daerah	1.056.513.217,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
129	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.483.594.500,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
130	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.735.052.766,00	Inspektorat Daerah

No	Program Prioritas	Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4
131	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.445.665.100,00	Inspektorat Daerah
132	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	633.786.800,00	Kecamatan Grabag
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.219.525.878,00	Kecamatan Grabag
134	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	599.758.100,00	Kecamatan Grabag
135	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	675.282.600,00	Kecamatan Grabag
136	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.838.910.900,00	Kecamatan Grabag
137	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.643.439.300,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
138	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	32.212.154.157,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
139	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.796.077.700,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
140	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	383.576.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
141	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	836.866.900,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
142	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.260.481.689.830,00	Semua Perangkat Daerah

Selain Indikator kinerja Program dan Kegiatan yang ditargetkan dalam RKPD tahun 2023, Kabupaten Purworejo juga telah menetapkan indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Tabel 1.12
Target kinerja indikator Program Pembangunan Daerah pada tahun 2024

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ PPD	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	
M	T	S	P				Semula	Menjadi
1				2	3	4	5	6
1				Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul Dalam Arti Luas, Mengedepankan Kompetensi Keahlian dan Keilmuan yang Berbasis pada Religiusitas Masyarakat				
	1			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
		1		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat				

BAB I

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ PPD	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	
M	T	S	P				Semula	Menjadi
1				2	3	4	5	6
			1	Program Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	100,00
					Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	100,00	100,00
					Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	100,00	100,00
			2	Program Literasi	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	5,00	10,00*
		2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				
			3	Program Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	75,30	75,40*
		3		Meningkatnya Ketahanan Pangan				
			4	Program Pemenuhan Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	kg/ kapita	250,00	255,00*
		4		Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk				
			5	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,10	1,16
		5		Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender				
			6	Program Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,18	73,18
		6		Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga				
			7	Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	98,81	100,00*
	2			Penurunan Angka Kemiskinan				
		7		Berkurangnya Penduduk Miskin				
			8	Program Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Tertangani	%	100	100
	3			Pengurangan Tingkat Pengangguran				
		8		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja				
			9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,93	96,93
2				Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian dalam Arti Luas yang Sinergi dengan Pengembangan UMKM, Perdagangan, dan Industri				

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ PPD	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	
M	T	S	P				Semula	Menjadi
1				2	3	4	5	6
	4			Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
		9		Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
			10	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	2.983.634,70	2.983.634,70
3				Meningkatkan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis UMKM, Perdagangan, Industri, serta Potensi Pariwisata dan Seni Budaya				
	5			Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi				
		10		Meningkatnya PDRB Per Kapita				
			11	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,41	6,41
			12	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	%	5,18	5,18
			13	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	6,03	9,78*
			14	Program Peningkatan Investasi Daerah	Pertumbuhan PMTB	%	5,99	5,99
		11		Meningkatnya Pembangunan Perdesaan				
			15	Program Pembangunan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	33,26	64,82*
4				Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)				
	6			Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia				
		12		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
			16	Program Manajemen Berbasis Risiko	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	2,80	3,033*
			17	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK	opini	WTP	WTP
			18	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks	92	99,24*
		13		Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel				
			19	Program Manajemen Sumber Daya Aparatur	Indeks Sistem Merit	indeks	0,68	0,76*
		14		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima				
			20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,25	4,25
			21	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	indeks	67	67
5				Meningkatkan Daya Saing Sarana Prasarana dan Infrastruktur yang Didukung Kemajuan Teknologi Informasi				

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ PPD	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	
M	T	S	P				Semula	Menjadi
1				2	3	4	5	6
	7			Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan				
		15		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum				
			22	Program Akses Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	91,47	91,47
		16		Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan				
			23	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	65,71	75,86*
		17		Meningkatnya Ketahanan Deaerah terhadap Bencana				
			24	Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,60	0,80*

Keterangan: M = Misi S = Sasaran Daerah
T = Tujuan Daerah P = Program Pembangunan Daerah
*Perubahan Target atas Evaluasi Tahun 2023
Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	277.571.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	938.567.900,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	229.990.620,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	1.462.679.300,00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.378.060.200,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	8.743.512.528,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8.610.797.140,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	764.343.780,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.041.200,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	789.883.510,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	96.274.200,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.448.723.387,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27.581.100,00
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	757.061.300,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	202.313.700,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.265.409.353,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	365.231.300,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.637.029.890,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.111.595.500,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.111.595.500,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	636.313.500,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.265.409.353,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	1.462.679.300,00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.378.060.200,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.815.683.936,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8.610.797.140,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	764.343.780,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.881.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	232.231.700,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	96.274.200,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30.973.466.394,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.411.600,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	145.300.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	86.870.200,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	202.313.700,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.637.029.890,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	915.047.150,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	365.231.300,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	938.567.900,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	86.627.950,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.753.180.670,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	93.185.100,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	991.773.460,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	437.969.900,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.700.016.800,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	18.950.100,00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.679.872.473,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	202.313.700,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	915.047.150,00
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	227.500.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	142.323.500,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	121.722.900,00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.744.800.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	202.313.700,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.637.029.890,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.111.595.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	62.118.000,00
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	17.140.200,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24.352.900,00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.942.500,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4.669.000,00
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4.400.900,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3.501.000,00
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3.501.000,00
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3.397.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	39.599.500,00
		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	42.387.400,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	649.492.000,00
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.330.871.040,00
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.657.430.197,00
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	354.875.000,00
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.520.355.963,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	34.686.040,00
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	17.680.920,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.304.057.700,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	566.220.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	150.665.800,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.383.600,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	613.372.040,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	101.452.500,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.912.300,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.290.570,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.460.323.900,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.184.500,00

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.345.032.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	53.785.150,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	22.795.313,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	22.947.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.885.030.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.758.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	778.514.100,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	315.484.350,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7.450.000,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.146.587.588,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	41.996.800,00
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	13.732.200,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.364.783.720,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.370.470.433,00
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	9.197.500,00
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	66.462.937,00
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	404.190.200,00
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.300.000,00
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	25.170.000,00
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	92.790.641,00
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	432.744.924,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	115.965.500,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	32.403.500,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	842.794.800,00
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.515.516.000,00
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.439.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	161.415.238,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	21.022.215,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	42.072.650,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.148.200,00
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	48.210.440,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.736.900,00
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	86.897.145,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.228.761.850,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	209.490.595,00
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.356.800,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	15.057.050,00
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	193.514.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	136.850.125,00
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	33.384.500,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	683.081.200,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.269.664.800,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	373.530.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.240.000,00
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	12.003.000,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.540.890.600,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.635.595.720,00
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	120.011.900,00
		Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	51.273.000,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	59.175.080,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	21.150.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	110.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10.537.489.900,00
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	40.500.000,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.831.542.800,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	229.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	45.250.000,00
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	732.160.000,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.650.531.000,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	27.500.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	945.360.000,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	187.500.980,00

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	187.500.980,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	187.500.980,00
		Rekonstruksi Jalan	187.500.980,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	2.474.000.000,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	113.000.000,00
		Rehabilitasi Jalan	23.958.495.000,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	22.710.031.384,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	92.368.200,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	25.000.000,00
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	88.993.900,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	64.195.500,00
		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	26.550.000,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	51.375.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar	125.961.000,00
		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	103.740.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	82.701.000,00
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	39.310.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	9.006.000,00
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	38.318.000,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4.000.000,00
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	8.031.800,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	53.985.200,00
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.060.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2.405.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	204.961.333,00
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5.099.040,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	243.970.100,00
	KUMUH Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.069.516.400,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.573.058.030,00
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	4.008.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4.180.722.200,00
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	157.437.700,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	84.764.600,00
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	324.608.900,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan	6.500.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	568.146.424,00
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	128.331.140,00
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	14.339.700,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	839.590.900,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	40.380.800,00
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	147.420.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.813.354.900,00
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.386.700,00
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	15.816.900,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	16.568.900,00
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	19.181.100,00
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	149.018.400,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	91.711.800,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	135.560.980,00
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	226.863.080,00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	107.767.280,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.985.454.620,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	21.693.780,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	444.469.500,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	730.046.400,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.876.300,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	836.628.000,00
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	137.612.100,00
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35.475.200,00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	56.406.900,00
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	34.725.460,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	13.498.500,00
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	31.536.600,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.000.000,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8.281.200,00
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	16.108.000,00
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.000.000,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	69.465.300,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7.000.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	62.050.000,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	109.447.800,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	425.320.000,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	339.152.800,00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.700.800,00
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.217.624.800,00
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.385.310.900,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	91.656.100,00
		Penyediaan Sandang	30.000.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.000.000,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	8.675.000,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	9.257.000,00
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	17.984.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32.651.300,00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36.320.200,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	23.919.200,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.988.908.941,00
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	230.181.200,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.735.100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2.845.700,00
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	25.841.800,00
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	19.723.400,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	48.727.400,00
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.751.450,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	31.297.650,00
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	63.202.100,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	9.747.700,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.662.100,00
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	118.048.300,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	103.960.600,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.973.120,00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	349.343.260,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.305.000,00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	317.300.860,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.258.200,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	29.771.340,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	77.326.920,00
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.715.220,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	13.724.660,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu	
1	2	3	4	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	28.884.800,00	
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	27.223.000,00	
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	24.350.000,00	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	52.117.000,00	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	106.794.000,00	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.624.000,00	
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	13.329.600,00	
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	15.372.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.829.360,00	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		76.308.600,00		
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	6.799.600,00		
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	89.459.000,00		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	32.500.000,00		
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	114.451.400,00		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	79.963.800,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	40.171.200,00
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	199.725.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	192.615.000,00
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.704.350.531,00
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	210.545.652,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.959.100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	35.817.100,00
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.571.200,00
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	110.154.400,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	200.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	65.021.800,00
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	28.234.200,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.000.000,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	13.033.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	695.791.400,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	192.785.300,00
		Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4.283.527.427,00
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.750.000,00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	432.302.295,00
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	3.504.180,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	266.386.900,00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6.904.090,00
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	195.339.400,00
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	31.250.000,00
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	3.670.000,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	72.636.620,00
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.323.940,00
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	35.439.700,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	33.773.753,00
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	14.184.900,00
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.598.400,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.829.485,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5.493.840,00
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	21.980.620,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	70.000.000,00
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	44.382.000,00
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	27.552.440,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	19.495.500,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.462.840.900,00
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	80.042.020,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	30.050.740,00
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3.549.500,00
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	58.983.120,00
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	19.239.940,00
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	11.359.060,00
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	58.449.500,00
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	188.334.300,00
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	33.513.760,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.997.432.900,00
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12.299.040,00
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	101.030.520,00
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.426.920,00
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	393.828.700,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	11.278.400,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	19.046.000,00

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	364.800.000,00
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	192.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	793.600.000,00
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240.000.000,00
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	128.382.900,00
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	258.124.400,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.482.000.000,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	15.517.800,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.300.000,00
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.419.999.400,00
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.700.000,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	645.500.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	7.313.800,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000,00
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	19.686.600,00
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000,00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35.292.600,00
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.779.000.000,00
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.956.900.000,00
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.256.455.400,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	6.695.605.564,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	150.878.250,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	104.372.000,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.996.995.160,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	62.843.710,00
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	120.237.700,00
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	53.108.800,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.190.160,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	834.066.460,00
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7.511.400,00
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	293.671.100,00
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	29.830.400,00
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	7.040.000,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	65.244.380,00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.252.000,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	23.319.200,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	241.726.800,00
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	59.726.400,00
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	381.337.400,00
		Pelayanan Informasi Publik	134.661.310,00
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	497.287.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.914.002.680,00
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.900.220,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	136.711.100,00
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	351.253.400,00
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	11.590.000,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.237.500,00
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.261.500,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	4.649.000,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.629.600,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	516.346.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	66.808.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	13.737.600,00
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20.253.100,00
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.123.157.252,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12.413.600,00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	350.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	776.031.460,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.626.660,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	61.267.060,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	277.716.990,00
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.500.000,00
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	256.687.250,00
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	58.494.700,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	96.029.500,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	119.847.000,00
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	439.443.000,00
		Pengawasan Penanaman Modal	239.695.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	64.689.525,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	45.567.310,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	28.852.850,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	68.298.900,00
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	36.456.760,00
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	57.936.300,00
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	46.512.938,00
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	311.849.780,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1.628.276.650,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4.075.979.398,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	360.492.250,00
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	166.183.350,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	45.788.250,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.000.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	27.260.750,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	346.394.580,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	71.761.500,00
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	12.334.000,00
		Pengembangan Infrastruktur	25.878.300,00
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	122.219.500,00
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.781.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.516.200,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	346.053.800,00
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4.707.932.900,00
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	23.868.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	55.851.500,00
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	613.827.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	113.175.900,00
		Pelindungan Cagar Budaya	190.075.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya	126.156.000,00
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	46.018.000,00
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1.230.168.500,00
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	219.360.400,00
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	312.683.500,00
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	593.233.100,00
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19.128.400,00
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	1.343.400,00
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.307.950,00
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	168.725.640,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Pengembangan Bahan Pustaka	292.155.720,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	12.060.500,00
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.608.520,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	80.386.900,00
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.246.000,00
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	13.482.200,00
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	53.448.350,00
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.237.350,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	10.013.200,00
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	6.928.800,00
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66.216.550,00
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	208.653.630,00
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	102.311.250,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	12.337.800,00
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	19.877.300,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7.632.150,00
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10.156.850,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	7.291.600,00
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	11.353.800,00
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	8.100.000,00
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	2.500.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	971.600,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.502.500,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	994.862.100,00
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.239.200,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	87.286.500,00
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	22.699.200,00
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3.416.600,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	7.388.800,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.944.300,00
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.538.200,00
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	55.721.613,00
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		515.000.000,00	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	223.517.150,00	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.537.558.049,00	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.116.729.330,00	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	40.123.563,00	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	64.395.900,00
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.132.375.720,00
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	819.534.300,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran	32.548.950,00
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	9.388.450,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	308.786.663,00
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	251.353.700,00
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	22.376.359,00
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	645.570.000,00
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.013.172.650,00
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	388.424.000,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.681.828.200,00
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	494.288.700,00
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.732.694.900,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.852.723.800,00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	330.000.000,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.422.320.100,00
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.649.945.900,00

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	30.019.600,00
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	558.837.500,00
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	240.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	105.079.800,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	115.990.200,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	393.392.400,00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	888.731.100,00
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	85.480.000,00
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.704.141.100,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	33.365.800,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15.943.100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36.079.800,00
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	11.650.800,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.779.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	56.734.910,00
		Pameran Dagang Lokal	367.420.600,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	207.706.550,00
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	32.607.000,00
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10.719.400,00
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	168.658.200,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.165.828.400,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	4.848.300,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15.010.000,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.686.600,00
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.790.200,00
		Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	23.484.000,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	208.191.900,00
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	43.934.800,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	325.639.900,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.668.165.100,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	28.550.600,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	173.898.300,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	135.868.900,00
		Fasilitasi Bantuan Hukum	412.816.600,00
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	46.382.800,00
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	37.414.800,00
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3.158.400,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	80.777.300,00
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5.421.600,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	39.488.220,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	122.838.800,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	18.154.700,00
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	99.517.700,00
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	74.131.800,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	59.553.600,00
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44.393.700,00
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	43.874.700,00
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	11.667.300,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4.343.200,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3.759.200,00
	4.02 SEKRETARIAT DPRD		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.760.000,00
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.213.336.560,00
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	252.742.000,00
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	472.524.000,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	211.693.000,00
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	80.886.300,00
		Pembahasan APBD	424.527.600,00
		Pembahasan APBD Perubahan	138.114.200,00
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13.600.000,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.500.000,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.625.000,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.500.000,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.500.000,00
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.450.000,00
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	-
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	75.495.000,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	256.500.000,00
		Pendalaman Tugas DPRD	772.248.000,00
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	187.725.600,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	254.239.200,00
		Penyusunan Program Kerja DPRD	2.385.000,00
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	824.943.200,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.125.000,00
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.050.000,00
		Pelaksanaan Reses	6.039.238.500,00
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	1.700.000,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.856.787.100,00
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.060.000,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	19.610.000,00
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.927.725.100,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	43.928.680,00
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.653.470,00
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	20.840.900,00
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	52.344.600,00
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	19.382.600,00
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	14.225.000,00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	347.000.500,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	26.322.900,00
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	55.428.400,00
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	13.604.800,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	18.544.300,00
		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	12.180.900,00
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.726.200,00

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.222.600,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.106.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.961.200,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	14.152.800,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.860.400,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.120.800,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.400.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.917.600,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.420.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.632.300,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.129.900,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	33.568.400,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.371.800,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.728.200,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.129.900,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	13.538.400,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.288.600,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.350.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.500.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	19.955.000,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.861.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.000.000,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.500.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.114.600,00
5.02	KEUANGAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	53.200.200,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	51.674.100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	223.226.400,00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	219.039.050,00
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	47.849.150,00
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	117.285.184,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	35.570.700,00
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	39.466.800,00
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.010.000,00

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	18.665.000,00
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	55.700.700,00
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	40.900.500,00
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	21.674.800,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6.120.000,00
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	7.155.000,00
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	9.146.800,00
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	102.285.800,00
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.287.200,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	37.999.500,00
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2.650.000,00
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	21.734.550,00
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	20.810.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	95.122.400,00
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.661.600,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.468.400,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	95.620.600,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	173.492.550,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah	580.329.720,00
		Penilaian Barang Milik Daerah	59.978.400,00
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.077.800,00
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.485.800,00
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3.578.400,00
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3.918.000,00
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.915.200,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	-
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	65.812.500,00
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	443.645.556,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	124.626.800,00
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	548.019.518,00
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.900.816,00
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	186.346.000,00
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	292.740.790,00
		Penagihan Pajak Daerah	2.462.643.387,00
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	28.062.300,00
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	26.699.200,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	147.906.176,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	565.158.752.728,00
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.707.053.100,00
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.603.763.700,00
5.03	KEPEGAWAIAN		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	509.008.400,00
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	20.564.262,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.267.850,00
		Pengelolaan Data Kepegawaian	26.823.232,00
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	153.996.537,00
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79.518.787,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	2.954.000,00
		Pengelolaan Assessment Center	-
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	25.247.250,00
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32.169.662,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	43.666.200,00
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	23.417.662,00
		Pembinaan Disiplin ASN	77.879.375,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.433.594.500,00
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	50.000.000,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	103.616.900,00
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	80.634.800,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.316.900,00
		Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87.496.900,00
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	94.316.900,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	94.316.900,00
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	94.316.900,00
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	91.616.900,00
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	94.316.900,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	115.204.500,00
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	48.548.500,00
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	89.126.600,00

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
		Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.495.700,00
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	28.191.200,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	233.295.400,00
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215.616.200,00
		Reviu Laporan Kinerja	20.896.500,00
		Reviu Laporan Keuangan	101.134.200,00
		Pengawasan Desa	309.468.216,00
		Kerja Sama Pengawasan Internal	37.751.400,00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	516.090.300,00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.884.950,00
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	247.915.600,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	72.356.500,00
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	9.040.200,00
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10.557.100,00
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	366.115.600,00
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	797.787.100,00
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	189.808.600,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	298.870.600,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.465.900,00

BAB I

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	249.827.700,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.404.230.400,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	405.454.100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	456.722.600,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	224.368.700,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	383.050.200,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	865.063.400,00
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	70.681.100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	66.380.000,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	45.147.700,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	170.507.400,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150.285.000,00
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	66.235.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	54.822.400,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.400.700,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	89.659.100,00
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	78.323.500,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	108.128.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.375.000,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.419.600,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23.796.600,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.155.000,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6.245.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.975.000,00
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	47.333.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73.320.800,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13.554.860.478,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.937.286.500,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.105.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2.040.000,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	170.830.900,00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	56.307.700,00
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	16.655.000,00
		Pembentukan Paskibraka	1.389.612.300,00
		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-
		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	10.033.400,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	31.902.180.757,00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	309.973.400,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.520.357.600,00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	275.720.100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85.177.400,00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	298.399.100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	601.400.700,00

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	SubKegiatan	Pagu
1	2	3	4
	KONFLIK SOSIAL Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	235.466.200,00

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purworejo mendasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” serta dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial”

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjamin akses masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM sebagai berikut :

- a. kesesuaian kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan kabupaten menurut pembagian Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Dasar;
- b. ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia;
- c. keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia;
- d. kesinambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terus-menerus;
- e. keterukuran, barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan
- f. ketepatan sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga Negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait.

Dasar hukum penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- 14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/44/2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai peraturan perundang-undangan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan daerah selama 1 tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal juga harus tertuangkan dalam

dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (RKPD dan APBD). Berkaitan dengan masih awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dimana indikator capaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum tercantum di dalamnya. Maka komitmen daerah dalam upaya penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.13
Target penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
A.	SPM PENDIDIKAN		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).	100%
3	Pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
B.	SPM KESEHATAN		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Prosentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Prosentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di fasilitas Kesehatan	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Prosentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas Kesehatan	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Prosentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Prosentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lansia	Prosentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Prosentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Prosentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Presentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan kesehatan terduga tuberculosis	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Prosentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
		mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	
C.	SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari- hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
D.	SPM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/kota	Prosentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	100%
E.	SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Prosentase Penanganan gangguan ketentrman dan ketertiban umum	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	100%
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
		layanan informasi rawan bencana	
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
F.	SPM SOSIAL		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Purworejo	Cakupan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Purworejo	100%

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Bupati atas pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan indikator kinerja daerah. Pada Tahun 2024 pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II.1
Capaian Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan %
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,35	75,16	1,09
2	Angka Kemiskinan	11,33	10,87	-4,06
3	Angka Pengangguran	4,02	3,89	-3,23
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,05	4,79	-5,15
5	Pendapatan Perkapita	29.416.354,80	31.194.843,48	6,05
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,337	0,354	5,04

Sumber : Purworejo Dalam Angka, BPS Kab. Purworejo, 2025

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

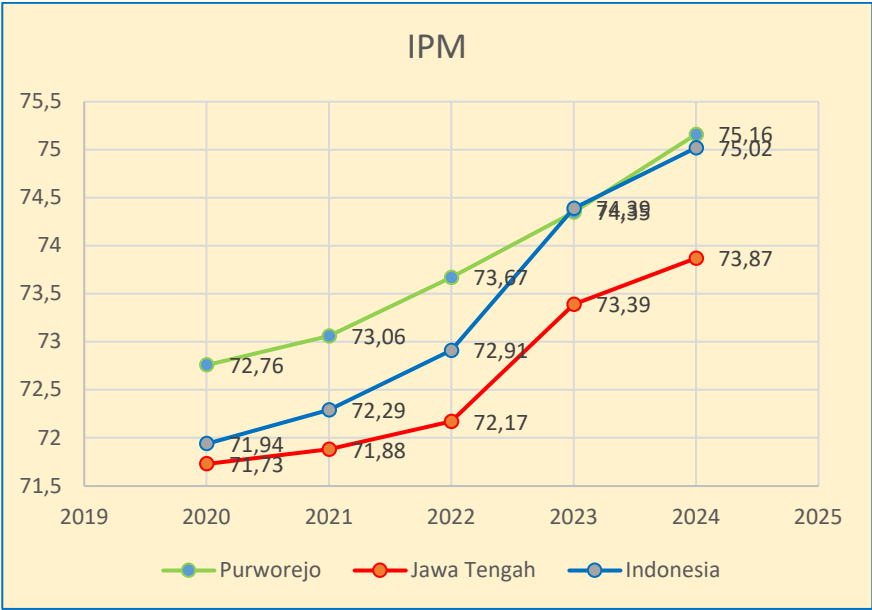
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. IPM mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu: umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup, tingkat pengetahuan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita.

IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun serta selalu berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Capaian IKM Kabupaten Purworejo tahun 2024 sebesar 75,16 atau naik 1,09% dari tahun 2023 yang sebesar 74,35.

BAB II

Selama kurun waktu 2021-2024, IPM Purworejo rata-rata meningkat sebesar 0,81 persen. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan, sebagaimana dijabarkan dalam grafik berikut.

Gambar 2.1
Capaian IPM Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024



Sumber : Purworejo Dalam Angka, BPS Kab. Purworejo, 2025

Peningkatan IPM Purworejo tahun 2024 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir di Purworejo pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga mencapai usia 75,64 tahun, dengan peningkatan 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Purworejo yang berusia 7 tahun ke atas pada 2024, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,55 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I atau Diploma II. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,53 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,19 tahun, dari 8,46 tahun pada tahun 2023 menjadi 8,65 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 474 ribu rupiah (4,27 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2020 – 2024 ditunjukkan grafik berikut ini.

Gambar 2.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Setelah pandemi mereda, pada bulan Maret 2022 hingga Maret 2024 jumlah penduduk miskin semakin menurun. Program bantuan sosial, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta sangat berpengaruh, terutama bagi penduduk lapisan bawah, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo menurun sebesar 0,46 poin, dari 11,33 persen pada tahun 2023 menjadi 10,87 persen pada tahun 2024.

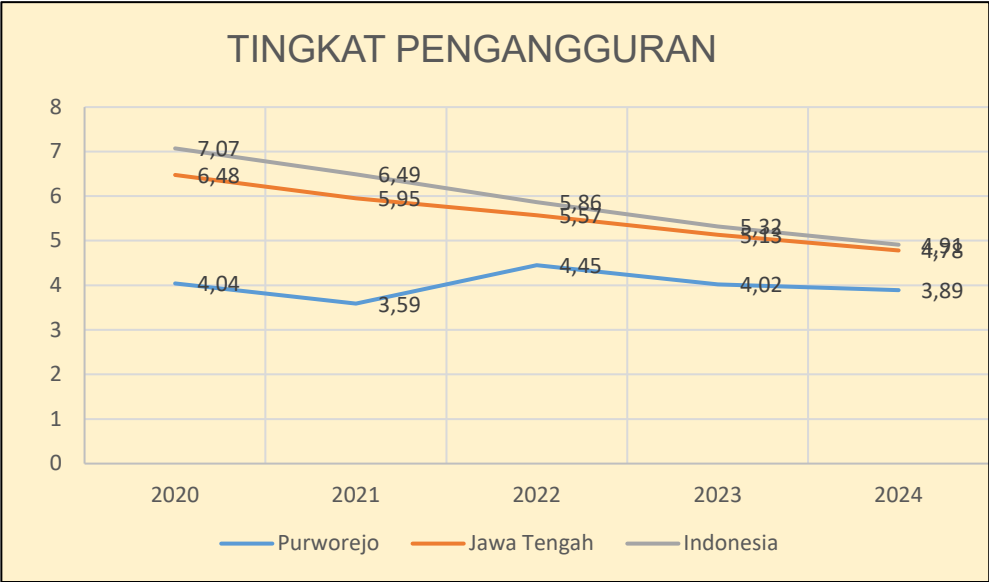
Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode 2023-2024 antara lain adalah: Pandemi Covid-19 dengan kasus yang semakin turun dan pemberlakuan era new normal memberikan dampak pada kelonggaran kegiatan masyarakat di tempat umum maupun tempat kerja sehingga aktivitas ekonomi penduduk terus menggeliat.; Ekonomi purworejo tahun 2023 terhadap tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen (y-to-y). Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 5,36 persen (y-o-y), pertumbuhan ekonomi pada 2023 sedikit melambat.; Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Purworejo tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,97 persen, meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun 2022. Selama periode Agustus 2023 - Agustus 2024 terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,40 poin, yaitu dari 4,45 persen menjadi 4,05 persen.; UMK Purworejo mengalami

peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 88.738,67 dari tahun 2023 yang bernilai sebesar Rp. 2.043.902,33 menjadi Rp 2.127.641,00.; Harga Gabah Kering Gilingan (GKG) per Kwintal di tingkat petani berdasarkan hasil Survei SHPED diketahui bahwa harga gabah Bulan Februari 2023 sebesar Rp. 633.499,80 mengalami peningkatan 37,88 persen pada tahun 2024 menjadi Rp. 873.499,90. Sedangkan harga GKG bulan Maret 2023 sebesar Rp. 580.500,00 mengalami peningkatan 26,47 persen pada tahun 2024 menjadi Rp. 734.166,70. Peningkatan harga gabah di level petani tentunya memberikan dampak positif terhadap pendapatan penduduk Kabupaten Purworejo yang mayoritas bergerak di sektor pertanian.; Berbagai macam kegiatan untuk menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian serta pengentasan kemiskinan juga terus digalakkan melalui program pemerintah Kabupaten Purworejo. Disamping itu program penanggulangan kemiskinan oleh swasta turut memberikan andil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo

2.1.3 Angka Pengangguran

Angka Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Purworejo tahun 2024 sebesar 3,89 persen, turun 3,23 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Dilihat dari prosentase tersebut dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023.

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

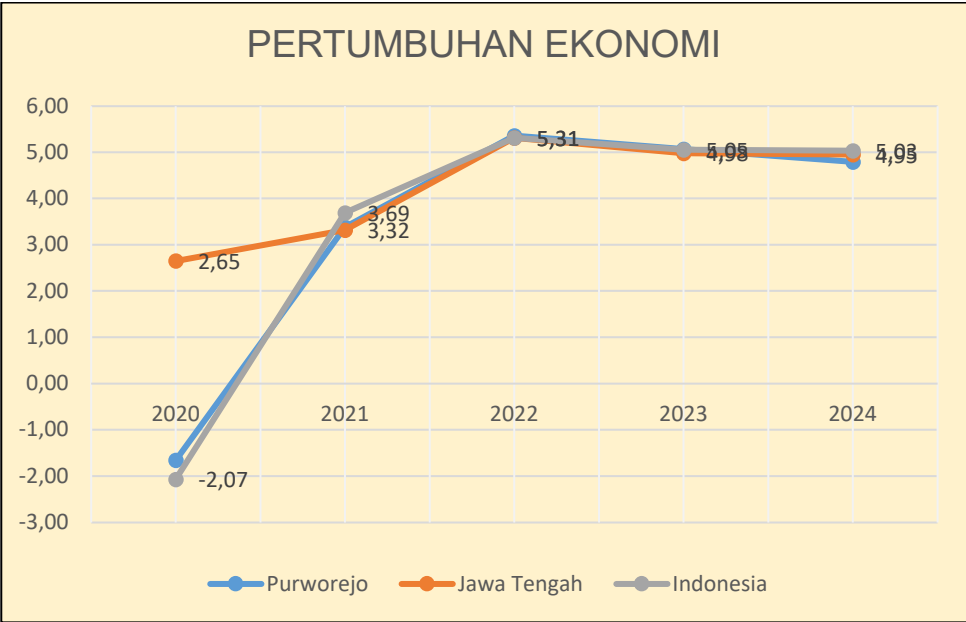
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 468 ribu orang, berkurang 1,98 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2023.

Demikian pula dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat menurun sebesar 1,04 persen poin, menjadi 73,72 persen pada Agustus 2024. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 3,89 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 449,81 ribu orang, berkurang sebanyak 1,30 ribu orang dari Agustus 2023. Dilihat dari lapangan pekerjaan, sektor pertanian mengalami peningkatan tenaga kerja sebesar 0,61 persen poin (2,36 ribu orang), sektor manufaktur juga mengalami peningkatan sebanyak 0,78 persen poin (3,21 ribu orang). Sedangkan sektor jasa mengalami penurunan sebesar 1,39 persen poin (6,87 ribu orang). Sebanyak 314,37 ribu orang (69,89 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,18 persen poin dibanding Agustus 2023 (70,07 persen), hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 135,44 ribu orang (30,11 persen) pada Agustus 2023 naik 0,18 persen poin dibanding Agustus 2023 (29,93 persen), utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Purworejo pada tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 24.800,93 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 15.745,98 miliar. Perekonomian Purworejo pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,79 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang tumbuh 5,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 8,87 persen. Pada tahun 2024, seluruh kategori lapangan usaha di Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya kecuali kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 0,08 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 13,09 persen. Secara struktur, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur ekonomi Purworejo pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 20,91 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 79,01 persen, kondisi pertumbuhan ekonomi ini dapat diamati pada gambar berikut. Lebih lanjut, kondisi pertumbuhan ekonomi ini dapat diamati pada Gambar 2.4 berikut ini :

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Ekonomi Purworejo tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,79 persen, melambat dibandingkan capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Konstruksi sebesar 8,87 persen; Jasa Pendidikan sebesar 8,55 persen dan Informasi Komunikasi sebesar 7,78 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran paling dominan di Kabupaten Purworejo mengalami kontraksi di tahun 2024. Lapangan usaha ini adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,08 persen. Lebih lanjut

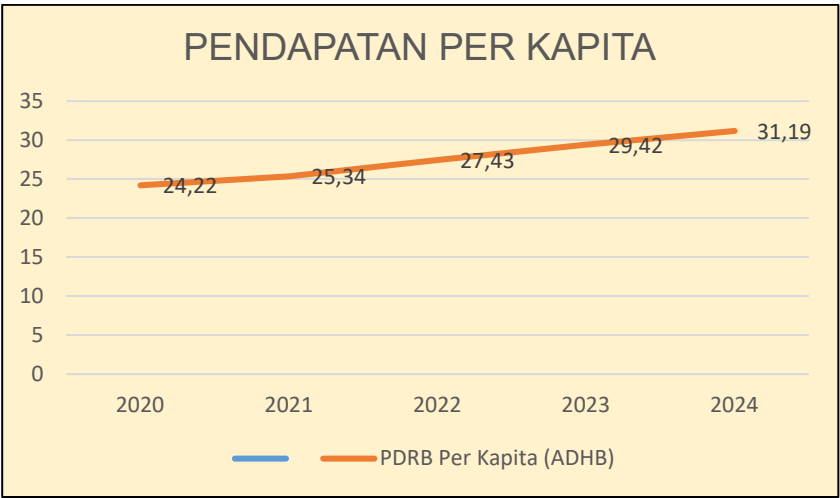
2.1.5 Pendapatan Perkapita

Ekonomi Purworejo tahun 2024 tumbuh meskipun melambat dibanding tahun 2023. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR) sebesar 13,09 persen; diikuti Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,63 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,89 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,09 persen. Struktur PDRB Purworejo menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Purworejo masih didominasi oleh Komponen PK-RT yaitu sebesar 79,01 persen; diikuti komponen PMTB sebesar 26,14 persen; Komponen PK-P sebesar 8,63 persen; Komponen PK-LNPR sebesar 2,22 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,01 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa

BAB II

Antar Daerah sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar -17,00 persen. PDRB per kapita tersaji pada grafik berikut ini.

Gambar 2.5
PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023

Struktur PDRB Purworejo menurut lapangan usaha pada tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,91 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 20,06 persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,04 persen; dan Konstruksi sebesar 9,68 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Purworejo mencapai 62,69 persen.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kabupaten Purworejo Tahun 2024 naik dibandingkan 2023, yaitu dari 0,337 menjadi 0,354, atau naik sebesar 0,017 poin atau 5,04 persen. Naiknya Gini Ratio merupakan indikasi bahwa perbedaan pendapatan antar penduduk semakin besar. Bantuan sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah belum sepenuhnya membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran yang kemudian berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.

BAB II

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	84,264%	DINDIKBUD	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,082%	DINDIKBUD	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	85,829%	DINDIKBUD	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	26,632%	DINDIKBUD	
2	KESEHATAN	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,286%	DINKES	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100%	DINKES	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,343%	DINKES	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	DINKES	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	DINKES	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	DINKES	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88.829%	DINKES	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55.711%	DINKES	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	82.142%	DINKES	
		10	Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	DINKES	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	DINKES	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	DINKES	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	0	DPUPR	Surat Keterangan Nomor 100.1.7/1195/2025 tanggal 21 Januari 2025
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPR	Surat Keterangan Nomor 100.1.7/1195/2025 tanggal 21 Januari 2025
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	73.765%	DPUPR	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98.742%	DPUPR	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95.209%	DPUPR	
		6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100%	DPUPR	
		7	Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota	63.279%	DPUPR	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	103.773%	DPUPR	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPR	
4	PERUMAHAN RAKYAT	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	DINPERKIMTAN	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	DINPERKIMTAN	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	86.807%	DINPERKIMTAN	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5.533%	DINPERKIMTAN	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	43.235%	DINPERKIMTAN	
5	TRANTIBUMLINMAS	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP DAMKAR	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP DAMKAR	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	SATPOL PP DAMKAR	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6.12 menit	SATPOL PP DAMKAR	
6	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	DINSOSDALDUKKB	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	DINSOSDALDUKKB	
7	TENAGA KERJA	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DINPERINTRANSNAKER	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.363%	DINPERINTRANSNAKER	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	DINPERINTRANSNAKER	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1,875%	DINPERINTRANSNAKER	
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	67.893%	DINPERINTRANSNAKER	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13.879%	DPPPAPMD	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	DPPPAPMD	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13.006%	DPPPAPMD	
9	PANGAN	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	5.552%	DKPP	
10	PERTANAHAN	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DINPERKIMTAN	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0	DINPERKIMTAN	
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	DINPERKIMTAN	
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	DINPERKIMTAN	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	11.859%	DINPERKIMTAN	
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	DINPERKIMTAN	
11	LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	66.33	DLHP	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	49.917	DLHP	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	43.243	DLHP	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Perekaman KTP-el	99,699%	DINDUKCAPIL	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	96.351%	DINDUKCAPIL	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	100%	DINDUKCAPIL	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	82.927%	DINDUKCAPIL	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	DPPPAPMD	
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0%	DPPPAPMD	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	0.918	DINSOSDALDUKKB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65.661%	DINSOSDALDUKKB	
		3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	9.378%	DINSOSDALDUKKB	
15	PERHUBUNGAN	1	Rasio konektivitas Kabupaten	93%	DINHUB	
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,32	DINHUB	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DINKOMINFOSTASANDI	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DINKOMINFOSTASANDI	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	59.291%	DINKOMINFOSTASANDI	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	25.523%	DKUKMP	
		2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirasausaha	1.515%	DKUKMP	
18	PENANAMAN MODAL	1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	-9.531%	DPMPTSP	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.350%	DINPORAPAR	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.525%	DINPORAPAR	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	30 Nasional dan 2 Internasional	DINPORAPAR	
20	STATISTIK	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DINKOMINFOSTASANDI	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DINKOMINFOSTASANDI	
21	PERSANDIAN	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	84.858%	DINKOMINFOSTASANDI	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
22	KEBUDAYAAN	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	DINDIKBUD	
23	PERPUSTAKAAN	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70.24%	DINPUSIP	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78.32%	DINPUSIP	
24	KEARSIPAN	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	54.83%	DINPUSIP	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	75.35%	DINPUSIP	
	URUSAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100.067%	DLHP	
2	PARIWISATA	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	46.535%	DINPORAPAR	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	24.159%	DINPORAPAR	
		3	Tingkat hunian akomodasi	21.480%	DINPORAPAR	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2.296	DINPORAPAR	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.330%	DINPORAPAR	
3	PERTANIAN	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6.903 /ha	DKPP	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-16.137%	DKPP	
4	KEHUTANAN		-	-	-	
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Wewenang Provinsi	DPMPTSP	
6	PERDAGANGAN	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DKUKMP	
		2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	93.568%	DKUKMP	
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	DKUKMP	
7	PERINDUSTRIAN	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	-33.870%	DINPERINTRANSNAKER	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	43.12%	DINPERINTRANSNAKER	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DINPERINTRANSNAKER	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DINPERINTRANSNAKER	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0%	DINPERINTRANSNAKER	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75	DINPERINTRANSNAKER	

Sumber : Diolah Bagian Pemerintahan dari perangkat Daerah, Maret 2025

BAB II

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	8.558%	BPKPAD	
		2	Rasio PAD	18.633%	BPKPAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.317	INSPEKTORAT	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.11	INSPEKTORAT	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures)	63.053%	BPKPAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	10x WTP	BPKPAD	
2	PENGADAAN	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	86.099%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan KoperasiPada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-19.632%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3	KEPEGAWAIAN	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61.085%	BKPSDM	

BAB II

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16.847%	BKPSDM	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33.435%	BKPSDM	
4	MANAJEMEN KEUANGAN	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0.313%	BPKPAD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10.544%	BPKPAD	
		3	Assets Management	4	BPKPAD	
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	3.732%	BPKPAD	
5	TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1	Informasi tentang Sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan	95.529%	DINKOMINFOSTASANDI	
		2	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	DINKOMINFOSTASANDI	

Sumber: Diolah Bagian Pemerintahan, Maret 2025

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Sebagai wujud pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengemban amanah dari semua stakeholder melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo, hal ini merupakan bentuk aspek pelaporan agen ke principal untuk memberitahukan atas kinerja keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Melalui pelaporan kinerja diharapkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat monitoring, evaluasi dan pengendalian untuk perbaikan kinerja baik indikator kinerja tujuan, sasaran dan program di tahun-tahun selanjutnya.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh kepala perangkat daerah untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu berdasarkan ekspektasi yang dilakukan dari dialog kinerja, tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya adalah:

BAB II

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024, berisi muatan indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/552/2023 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
	Visi I : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat			
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,77
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,89
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	75,30
3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	89,77
4.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,26
5.	Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,00
6.	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	98,81
7.	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	29,75

BAB II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
8.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	77,23
	Misi ke II : Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industry			
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	Juta Rupiah	2.983.634,70
	Misi III : Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya			
1.	Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	20,68
2.	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,738
	Misi ke IV : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	Skor	3,130
		Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai SAKIP	Nilai	67,00
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,3
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	67
	Misi ke V : Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi			
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	91,47
2.	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	65,69
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,60

Anggaran belanja program dalam rangka mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tersebut tercantum dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, dirinci sebagai berikut ini:

Tabel 2.5
Belanja program dalam rangka mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	150,117,195,241.00
2.	Program Pengembangan Kurikulum	79,258,200.00
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	33,295,400.00
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	19,469,400.00
5.	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	81,986,900.00
6.	Program Pengembangan Kebudayaan	5,077,854,700.00
7.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	55,851,500.00
8.	Program Pembinaan Sejarah	613,827,000.00
9.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	429,407,300.00
10.	Program Pengelolaan Permuseuman	1,495,546,900.00
11.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	109,728,541,829.00
12.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,401,754,535.00
13.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	506,148,445.00
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	853,315,825.00
15.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	11,418,949,300.00
16.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14,540,682,700.00
17.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5,684,441,000.00
18.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	945,360,000.00
19.	Program Penataan Bangunan Gedung	187,500,980.00
20.	Program Penyelenggaraan Jalan	83,794,526,384.00
21.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	206,362,100.00
22.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	541,156,500.00
23.	Program Pengembangan Perumahan	286,542,373.00
24.	Program Kawasan Permukiman	243,970,100.00
25.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1,104,516,400.00
26.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	5,577,066,030.00
27.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	87,137,960.00
28.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	96,258,600.00
29.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5,464,850,664.00
30.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,045,718,600.00
31.	Program Penanggulangan Bencana	4,905,326,500.00
32.	Program Pemberdayaan Sosial	26,389,200.00

BAB II

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
33.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4,000,000.00
34.	Program Rehabilitasi Sosial	252,963,100.00
35.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4,373,109,300.00
36.	Program Penanganan Bencana	175,572,100.00
37.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	68,971,500.00
38.	Program Pengendalian Penduduk	647,124,400.00
39.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5,302,874,500.00
40.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	4,107,793,000.00
41.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	466,276,980.00
42.	Program Perlindungan Perempuan	367,605,860.00
43.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	8,258,200.00
44.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	29,771,340.00
45.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	192,042,140.00
46.	Program Perlindungan Khusus Anak	13,724,660.00
47.	Program Penataan Desa	70,000,000.00
48.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	71,934,440.00
49.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5,965,858,340.00
50.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2,506,018,080.00
51.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	132,574,800.00
52.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	106,794,000.00
53.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	39,325,600.00
54.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13,310,408,450.00
55.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10,430,509,400.00
56.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	903,917,300.00
57.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	115,990,200.00
58.	Program Penyuluhan Pertanian	1,367,603,500.00
59.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	146,951,400.00
60.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	319,860,900.00
61.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4,107,511,183.00
62.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10,959,100.00
63.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	72,388,300.00

BAB II

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
64.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	310,154,400.00
65.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93,256,000.00
66.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65,000,000.00
67.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13,033,500.00
68.	Program Pengelolaan Persampahan	6,764,104,127.00
69.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29,245,400.00
70.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,121,861,900.00
71.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	26,115,800.00
72.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	105,871,300.00
73.	Program Pendaftaran Penduduk	949,106,865.00
74.	Program Pencatatan Sipil	128,400,260.00
75.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131,386,538.00
76.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27,474,460.00
77.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	21,866,621,684.00
78.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,314,739,410.00
79.	Program Aplikasi Informatika	5,436,457,400.00
80.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	109,973,800.00
81.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	156,516,700.00
82.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2,499,000.00
83.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	4,649,000.00
84.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	24,629,600.00
85.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	516,346,000.00
86.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	66,808,000.00
87.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	1,519,561,552.00
88.	Program Pengembangan Umkm	776,031,460.00
89.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5,104,227,900.00
90.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	81,453,200.00
91.	Program Pengembangan Ekspor	424,155,510.00
92.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	240,313,550.00
93.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10,719,400.00
94.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81,893,720.00
95.	Program Promosi Penanaman Modal	277,716,990.00
96.	Program Pelayanan Penanaman Modal	413,711,450.00
97.	Program Pengendalian	798,985,000.00

BAB II

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
98.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64,689,525.00
99.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	595,474,838.00
100.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8,303,980,648.00
101.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	346,394,580.00
102.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9,488,649,705.00
103.	Program Pemasaran Pariwisata	3,016,305,920.00
104.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	41,937,400.00
105.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1,228,086,722.00
106.	Program Pembinaan Perpustakaan	1,648,047,530.00
107.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	16,942,000.00
108.	Program Pengelolaan Arsip	377,181,430.00
109.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	50,004,100.00
110.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2,334,486,600.00
111.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	4,848,300.00
112.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15,010,000.00
113.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23,919,200.00
114.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,280,236,141.00
115.	Program Penempatan Tenaga Kerja	152,978,600.00
116.	Program Hubungan Industrial	144,458,100.00
117.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	116,960,800.00
118.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8,084,022,100.00
119.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	607,921,820.00
120.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	32,047,590,360.00
121.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	743,183,250.00
122.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	469,829,500.00
123.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,166,516,500.00
124.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	581,616,021,362.00
125.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,041,648,870.00
126.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,366,403,043.00
127.	Program Kepegawaian Daerah	1,056,513,217.00
128.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,483,594,500.00
129.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,735,052,766.00
130.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,445,665,100.00

BAB II

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
131.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	633,786,800.00
132.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21,219,525,878.00
133.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	599,758,100.00
134.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	675,282,600.00
135.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,838,910,900.00
136.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,643,439,300.00
137.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	32,212,154,157.00
138.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3,796,077,700.00
139.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	383,576,500.00
140.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	836,866,900.00
141.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,280,676,940,824.32

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah digunakan kriteria penilaian berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤100%	Sangat Tinggi

BAB II

2	76 %≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Data realisasi atau capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Keterangan	Sumber Data
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,77	8,65	98,63	Sangat tinggi	BPS
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,89	13,55	97,55	Sangat tinggi	BPS
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	75,4	75,64	100,32	Sangat tinggi	BPS
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	89,77	90,42	100,72	Sangat tinggi	DKPP
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,26	1,70	15,29	Sangat rendah	Dinsos PPKB
5	Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	95,69	NA	NA	NA	BPS
6	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	Dinpora par
7	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	29,75	17,63	168,75	Sangat tinggi	Dinsos PPKB
8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	77,23	73,72	95,46	Sangat tinggi	BPS
9	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	BPS	juta rupiah	2.983.634,70	NA	NA	NA	BPS
10	Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	juta rupiah	20,68	NA	NA	NA	BPS

BAB II

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Keterangan	Sumber Data
11	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,738	0,7352	99,62	Sangat tinggi	Kemendesa PDTT (DPPPA PMD)
12	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	skor	3,310	3,317	100,21	Sangat tinggi	BPKP (Inspektorat)
		Opini BPK	opini	WTP	WTP	100,00	Sangat tinggi	BPK (BPKPAD)
		Nilai SAKIP	nilai	67,00	65,58	97,88	Sangat tinggi	Kementerian PANRB (Bag. Org Setda)
13	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	84,11	82,25	97,79	Sangat tinggi	BKN (BKPSDM)
14	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,25	4,33	84,47	Sangat tinggi	Kementerian PANRB (Bag. Org Setda)
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	64	61,72	96,44	Sangat tinggi	Kemendagri (Bappedalitbang)
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	91,47	82,90	90,63	Tinggi	Bappedalitbang
16	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	75,86	66,33	87,44	Tinggi	DLHP
17	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,80	0,84	105,00	Sangat tinggi	BNPB (BPBD)

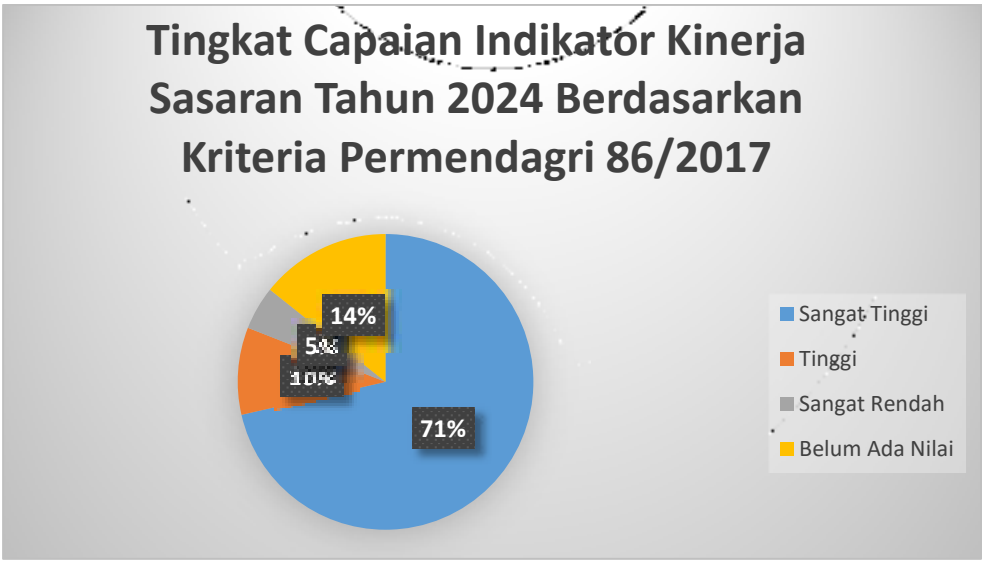
Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan data sebagaimana tersaji pada tabel tersebut di atas, dari 17 Sasaran Strategis dan 21 Indikator Kinerja Sasaran yang diukur pada tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **sangat tinggi** sejumlah **15 indikator** atau 71.43%.
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **tinggi** sejumlah **2 indikator** atau 9,52 %.
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria

BAB II

- sangat **rendah** sejumlah 1 indikator atau 4,76 %.
- d. Terdapat 3 indikator yang belum diperoleh nilai capaiannya atau 14,29% yaitu penilaian BPS untuk indicator Indeks Pembangunan Gender (IPG), PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan PDRB Per Kapita.

Gambar 2.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran



Selanjutnya apabila data dipilah berdasarkan tingkat ketercapaian realisasi indikator kinerja terhadap target kinerja maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja di atas 100% (**melampaui target**) sejumlah 5 indikator atau 23,81%.
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja sama dengan 100% (sesuai target) sejumlah 2 indikator atau 9,52%.
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja **di bawah target** dengan rentang antara 10% s/d 99,99% sejumlah 11 indikator atau 52,38%.
- d. Terdapat 3 indikator yang belum diperoleh nilai capaiannya atau 14,29%.
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya**

Data realisasi atau capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi atau capaian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB II

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Capaian 2023 (%)
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8.46	8.65	102.25
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13.53	13.55	100.15
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	75.21	75.64	100.57
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	89.4	90.42	101.14
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.29	1.7	131.78
5	Terwujudnya Kesenjangan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	95.59	NA	NA
6	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	98.81	100	101.20
7	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	32.12	17.63	182.19
8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74.76	73.72	98.61
9	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	2.899.954,73	NA	NA
10	Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	juta rupiah	18.38	NA	NA
11	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0.7229	0.7352	101.70
12	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	skor	skor	3,014	3,317
		Opini BPK	opini	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	nilai	64.47	65.58	101.72

BAB II

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Capaian 2023 (%)
13	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	75.36	82.25	109.14
14	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	3.59	4.33	120.61
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	48.76	61.72	126.58
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	82.35	82.9	100.67
16	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	67.81	66.33	97.82
17	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0.69	0.84	121.74

Ikhtisar realisasi atau capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi atau capaian kinerja tahun 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan capaian kinerja sejumlah 16 indikator atau 76,19%.
- b. Indikator kinerja yang sama dengan capaian kinerja Tahun 2023 sejumlah 1 indikator atau 4,76%.
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan penurunan capaian kinerja sejumlah 2 indikator atau 9,52 %.
- d. Terdapat 3 indikator yang belum diperoleh nilai capaiannya atau 14,29% yaitu penilaian BPS untuk indicator Indeks Pembangunan Gender (IPG), PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan PDRB Per Kapita.

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target RPJMD	Capaian 20 terhadap Target RPJMD (%)
1		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8.65	9.1	95.05

BAB II

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target RPJMD	Capaian 20 terhadap Target RPJMD (%)
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13.55	14.09	96.17
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	75.64	75.59	100.07
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	90.42	91.7	98.60
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.7	0.26	15.29
5	Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	NA	95.02	NA
6	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	100	100	100.00
7	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	17.63	26.67	66.10
8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73.72	80.82	91.22
9	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	NA	3.211.458.12	NA
10	Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	juta rupiah	NA	21.89	NA
11	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0.7352	0.7688	95.63
12	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	skor	3,317	3,500	94.77
		Opini BPK	opini	WTP	WTP	100.00
		Nilai SAKIP	nilai	65.58	70	93.69
13	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	82.25	80.5	102.17
14	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4.33	4.35	99.54
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	61.72	73	84.55
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	82.9	94.34	87.87
16	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	66.33	65.75	100.88

BAB II

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target RPJMD	Capaian 20 terhadap Target RPJMD (%)
17	Meningkatnya Ketahanan Deaerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0.84	0.73	115.07

Ikhtisar realisasi atau capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat tinggi sejumlah 7 indikator atau 33,33%.
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria tinggi sejumlah 10 indikator atau 47,62 %.
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat rendah sejumlah 1 indikator atau 4,76 %.
- d. Terdapat 3 indikator yang belum diperoleh nilai capaiannya atau 14,29% yaitu penilaian BPS untuk indicator Indeks Pembangunan Gender (IPG), PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan PDRB Per Kapita.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai

Pada Sub Bab ini akan menguraikan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai pada setiap sasaran. Adapun uraian pada masing-masing sasaran strategis tersaji sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,46% atau sebesar Rp.40.192.429.724,32 dari anggaran sebesar Rp. 735.490.741.767,32 digunakan sebesar Rp.695.298.312.043,00.
- 2) Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,26% atau sebesar Rp.29.039.133. dari anggaran sebesar Rp. 551.900.098.233,00 digunakan sebesar Rp.522.860.956.113,00
- 3) Sasaran 3 : Meningkatnya Ketahanan Pangan
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran

BAB II

untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,99% atau sebesar Rp.567.293.311,00 dari anggaran sebesar Rp. 18.996.195.984,00 digunakan sebesar Rp.18.428.902.673,00.

- 4) Sasaran 4 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 7.97% atau sebesar Rp.474.125.304,00 dari anggaran sebesar Rp. 5.949.998.900,00 digunakan sebesar Rp. 5.475.873.596,00.
- 5) Sasaran 5 : Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,76% atau sebesar Rp.208.573.039,00 dari anggaran sebesar Rp. 5,546.395.184,00 digunakan sebesar Rp.5.337.858.145,00,
- 6) Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,40% atau sebesar Rp.746.606.102,00 dari anggaran sebesar Rp. 21.997.230.731,00 digunakan sebesar Rp. 21.230.624.629,00.
- 7) Sasaran 7 : Berkurangnya Penduduk Miskin
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,58% atau sebesar Rp.360.300.103,00 dari anggaran sebesar Rp. 13.958.888.184,00 digunakan sebesar Rp. 13.598.489.081,00.
- 8) Sasaran 8 : Berkurangnya Penduduk Miskin Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,42% atau sebesar Rp.195.379.163,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.601.592.041,00 digunakan sebesar Rp. 3.406.212.878,00.

- 9) Sasaran 9 : Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,19% atau sebesar Rp.2.015.788.842,00 dari anggaran sebesar Rp. 38.830.472.550,00 digunakan sebesar Rp. 36.814.683.708.
- 10) Sasaran 10 : Meningkatnya PDRB Per Kapita
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 7,27% atau sebesar Rp.3.353.114.939,00 dari anggaran sebesar Rp. 46.144.367.360,00 digunakan sebesar Rp.42.791.252.421,00
- 11) Sasaran 11 : Meningkatnya Pembangunan Perdesaan
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4,70% atau sebesar Rp.14.455.723.068,00 dari anggaran sebesar Rp. 8.613.810.860,00 digunakan sebesar Rp. 8.209.166.265,00.
- 12) Sasaran 12 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,32% atau sebesar Rp.14.455.723.068,00 dari anggaran sebesar Rp. 622.877.470.718,00 digunakan sebesar Rp. 3.406.212.878,00.
- 13) Sasaran 13 : Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,21% atau sebesar Rp.213.618.918,00 dari anggaran sebesar Rp. 6.645.701.456,00 digunakan sebesar Rp. 6.432.082.538,00
- 14) Sasaran 14 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target

sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4.64% atau sebesar Rp.12.012.554.599,00 dari anggaran sebesar Rp.258.809.852.633,00 digunakan sebesar Rp. 246.797.298.034,00.

- 15) Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4.56% atau sebesar Rp.7.123.756.219,00 dari anggaran sebesar Rp.156.301.595.596,00 digunakan sebesar Rp. 149.177.839.377,00.
- 16) Sasaran 16 : Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5.16% atau sebesar Rp.1.067.664.398,00 dari anggaran sebesar Rp.20.705.953.937,00 digunakan sebesar Rp.19.638.289.539,00.
- 17) Sasaran 17 : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5.39% atau sebesar Rp.464.619.664,0000 dari anggaran sebesar Rp.8.612.438.567,00 digunakan sebesar Rp. 8.147.818.903,00.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai pada Tahun 2024 sebesar 4.47% atau sebesar Rp.112.895.388.108.32 dari anggaran sebesar Rp.2.524.962.795.701,32 digunakan sebesar Rp. 2.412.067.407.593,00.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pada Sub Bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja pada sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2024. Adapun uraian pada masing-masing sasaran strategis berdasarkan INdikator, Definisi Operasional, Formula, Satuan dan Sumber data berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/552/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja dalam Rencana

BAB II

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. tersaji sebagai berikut :

1) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian sangat tinggi yaitu sebesar 98.09, pencapaian sasaran ini didukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 5) Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra;
- 6) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 7) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan dan terdapat orang tua terbebani putra-putrinya bersekolah karena keterbatasan sarana transportasi, biaya transportasi, dan merasa tidak nyaman jika anaknya menuju sekolah yang jauh.
- 2) Masih ada penduduk usia 7-25 tahun yang tidak bersekolah dan putus sekolah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi kurang mampu, Anak berkebutuhan Khusus, kurangnya motivasi dan faktor geografis.
- 3) Terdapat penduduk usia 25 tahun keatas yang tidak mau melanjutkan pendidikannya karena banyak yang sudah bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga dan merasa tidak membutuhkan ijazah.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam pencapaian target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara komprehensif dan peningkatan keterjangkauan akses pendidikan bagi seluruh siswa menuju sekolah serta mengoptimalkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat

2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Analisis Program dan Kegiatan

BAB II

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) dengan capaian sangat tinggi yaitu sebesar 100.32, pencapaian sasaran ini g Dinas Kesehatan dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui DAK bidang Kesehatan.
- 2) Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan dengan:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan melalui promotif dan preventif.
2. Mengoptimalkan kader kesehatan desa.
3. Menyediakan sarana kesehatan dengan standar kesehatan.
4. Memenuhi tenaga medis dan tenaga paramedis.

3) Meningkatnya Ketahanan Pangan

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) dengan capaian sangat tinggi yaitu sebesar 100.72, pencapaian sasaran ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 2) Program Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 3) Program Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan tanaman pangan utama di Kabupaten Purworejo dalam jumlah yang memadai.
- 2) Jumlah anggota keluarga yang mendekati ideal.

- 3) Tingkat Pendidikan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Purworejo yang terus meningkat.

Kedepan Pemerintah kabupaten Purworejo tetap konsisten untuk melakukan peningkatan ketersediaan pangan utama yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan dengan mengoptimalkan penganekaragaman konsumsi pangan.

- 4) Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

- a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian sangat rendah atau sebesar 15.29, pencapaian sasaran ini didukung Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Penduduk;
 - 2) Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Jumlah kelahiran (fertilitas) lebih tinggi dari kematian (mortalitas) serta tingginya angka migrasi datang lebih besardari yang keluar (imigrasi dan emigrasi).
 - 2) Belum adanya *Grand Desain Pembangunan Kependudukan* (GDPK) tingkat kabupaten.
 - 3) Pasangan Usia Subur di Kabupaten Purworejo relatif tinggi sebesar 25%.
 - 4) Masih rendahnya rasio akseptor KB
 - 5) Masih rendahnya peserta KB aktif.
 - 6) Masih tingginya persentase *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
 - 7) Masih rendahnya jumlah peserta KB mandiri.

Kedepan Pemerintah kabupaten Purworejo harus fokus dalam melakukan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan mengendalikan *total fertility rate* (TFR) atau angka kelahiran total guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB). Melakukan edukasi kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Melakukan kerjasama dengan PKK, Dawis dan Kader PPKDB

dalam melaksanakan program KB. Menyusun *Grand Desain Pembangunan Kependudukan* (GDPK) tingkat kabupaten

5) Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum dapat diukur capaiannya karena BPS belum mengeluarkan nilai, pencapaian sasaran ini didukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Program Perlindungan Khusus Anak;
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 2) Diimplementasikannya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui GAP (*Gender Analisis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*) pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Kedepan Pemerintah kabupaten Purworejo tetap konsisten melakukan peningkatan kesetaraan gender serta pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dengan mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender melalui GAP (*Gender Analisis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*) pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Perlu menyusun Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Menyusun *grand desain* analisis gender Kabupaten Purworejo.

6) Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga

a. Analisis Program dan Kegiatan

BAB II

Sasaran Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga dengan indikator Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 100 pencapaian sasaran ini didukung Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 3) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 5) Program Pembinaan Sejarah;
- 6) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 7) Program Pengelolaan Permuseuman;
- 8) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Kinerja KONI yang semakin baik sebagai mitra kerja DINPORAPAR.
- 2) Pembangunan Stadion Sarwo Edi Wibowo yang berjalan.
- 3) Penyelenggaraan PORCAB dan PORCAM untuk mendapatkan bibit-bibit atlet yang unggul daerah.
- 4) Penyelenggaraan POPDA yang berjenjang mulai dari SD s.d. SMA.
- 5) Hari Jadi Purworejo menjadi momentum vital dalam kegiatan kebudayaan di Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Kabupaten Purworejo kedepan tetap konsisten meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan melalui:

- 1) Meningkatkan event olahraga untuk masyarakat penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah.
- 2) Meningkatkan jumlah kewirausahaan pemuda.
- 3) Meningkatkan jumlah pemuda pelopor kabupaten.
- 4) Meningkatkan peran pemuda dalam event budaya daerah dan menumbuhkan kesenian tradisional.

7) Berkurangnya Penduduk Miskin

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Berkurangnya Penduduk Miskin dengan indikator Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 168,75 pencapaian sasaran ini didukung Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dengan Program sebagai berikut :

BAB II

- 1) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
 - 2) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
 - 3) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - 4) Program Pemberdayaan Sosial;
 - 5) Program Rehabilitasi Sosial;
 - 6) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:
- 1) Masyarakat di Kabupaten Purworejo masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19*.
 - 2) Bantuan sosial yang diberikan (PKH, BPNT, dan Bantuan Sosial lain) bersumber dari pusat belum menyeluruh.
 - 3) DINSOSDALDUKKB Kabupaten Purworejo dalam rangka program penuntasan kemiskinan masih menyajikan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang validitasnya masih kurang.
 - 4) Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo belum optimal.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo kedepan fokus pada penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Penggunaan data kemiskinan ekstrem untuk tematik penanggulangan kemiskinan harus dipedomani. Program “Sanding Erat Desa Kita” harus terus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan koordinasi yang intensif dari TKPKD.
- 8) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
- a. Analisis Program dan Kegiatan
- Sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 95.46 pencapaian sasaran ini didukung Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Program sebagai berikut :
- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
 - 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - 4) Program Hubungan Industrial.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

BAB II

- 1) Masih adanya penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
- 2) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang belum tercapai.
- 3) Banyaknya lulusan SMA sederajat yang belum siap kerja karena belum memiliki sertifikat keterampilan atau kompetensi kerja.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam menyiapkan sumber daya manusia masyarakatnya yang mampu bersaing dibidang tenaga kerja yang handal, dengan melatih masyarakat sebagai tenaga terampil melalui BLK dan menyelenggarakan *job fair* dan pendidikan sekolah yang berorientasi pada *link and match* dengan dunia usaha.

9) Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan indikator PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan belum dapat diukur capaiannya karena BPS belum mengeluarkan nilai, pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 6) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 7) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 9) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 10) Program Penyuluhan Pertanian.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Produksi dan produktivitas hasil pertanian terus meningkat.
- 2) Pembangunan infrastruktur irigasi yang didukung dengan pendanaan IPDMIP atau hibah *reimbursement* dari Pemerintah Pusat.
- 3) Hibah kepada kelompok tani untuk sarana dan prasarana serta bibit ternak dan tanaman yang memadai.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas,

perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan memberikan fasilitasi, sarana dan prasarana kepada kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian, serta mencegah penyakit pada ternak melalui vaksinasi secara tepat

10) Meningkatnya PDRB Per Kapita

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya PDRB Per Kapita dengan indikator PDRB Per Kapita belum dapat diukur capaiannya karena BPS belum mengeluarkan nilai, pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
- 6) Program Pengembangan Ekspor;
- 7) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
- 8) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 9) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 10) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- 11) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi;
- 12) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- 13) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
- 14) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- 15) Program Pengembangan UMKM;
- 16) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 17) Program Pemasaran Pariwisata;
- 18) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 19) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- 20) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 21) Program Promosi Penanaman Modal;
- 22) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 23) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 24) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

BAB II

- 25) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - 26) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
 - 27) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 28) Program Pengembangan Perumahan;
 - 29) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - 30) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - 31) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:
- 1) Beberapa sektor ekonomi masih dalam masa pemulihan pasca Pandemi *Covid-19* seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda serta sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
 - 2) Tingkat inflasi yang tinggi.
 - 3) Roda perekonomian daerah yang masih lesu pasca Pandemi *Covid-19*.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam peningkatan PDRB Perkapita melalui kegiatan-kegiatan daerah yang menjadi pemicu roda perekonomian meningkat dan berbagai kegiatan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik investasi dari luar serta kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai produk daerah dengan mengoptimalkan UMKM di Kabupaten Purworejo.

11) Meningkatnya Pembangunan Perdesaan

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Pembangunan Perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 99,62 pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 2) Program Penataan Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

BAB II

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) ketersediaan anggaran pembangunan yang memadai untuk desa melalui Dana transfer diantaranya Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ke desa dan Alokasi Dana Desa.
- 2) Ketersediaan Sarjana Pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
- 3) Kesadaran yang tinggi dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan desanya dimulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pertanggungjawaban pembangunan.
- 4) Terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi desa BUMDes.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten fokus dalam pendampingan desa dalam pelaksanaan dana desa dan APBDes, meningkatkan fasilitasi kerjasama antar desa, meningkatkan pembinaan BUMD serta fasilitasi untuk meningkatkan Desa Mandiri dan Maju.

12) Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Maturitas SPIP, Opini BPK, Nilai SAKIP dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 100,21 untuk indikator Maturitas SPIP, 100 untuk indikator Opini BPK dan 97,88 untuk indikator Nilai SAKIP pencapaian sasaran ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Sekretariat Daerah, dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;
- 3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 6) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 7) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB II

Kabupaten/Kota Inspektorat.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Unsur penilaian SAKIP yang terdiri dari: Perencanaan kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal; dan Capaian Kinerja belum tercapai secara optimal.
- 2) Belum optimalnya kinerja SPIP Perangkat Daerah.
- 3) Penyusunan Pohon Kinerja yang belum tepat;
- 4) Penyusunan Indikator yang belum SMART-C;
- 5) Penyusunan *cascading* belum berdasarkan proses bisnis.
- 6) Belum optimalnya perbaikan kinerja level kabupaten sampai individu, dan belum tersistematisnya pelaporan kinerja.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam pencapaian target sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan berbagai hal yaitu :

- 1) Pemerintah Kabupaten Purworejo akan konsisten mengembangkan aplikasi Pengendalian Terpadu Pemerintah Kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk mengintegrasikan data-data pengendalian pembangunan antar Perangkat Daerah yang pada akhirnya bermuara dalam peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Purworejo.
- 2) Pendampingan dan monitoring pelaksanaan SPIP pada seluruh Perangkat Daerah.
- 3) Mengoptimalkan peran APIP sebagai *consultant*, *catalyst* dan *quality assurance*.
- 4) Memaksimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- 5) Menyediakan media pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan
- 6) Mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai dengan potensi pendapatan daerah.
- 7) Mengimplementasikan SIPD RI dalam perencanaan, penganggaran penatausahaan dan pelaporan yang terintegrasi.
- 8) Mengelola aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan aset daerah dalam rangka mendukung ketercapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 9) Mengoptimalkan fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah.
- 10) Mengoptimalkan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju *Good Governance*.
- 11) Meningkatkan gerakan revolusi mental melalui reformasi birokrasi meliputi integritas, budaya kerja dan kerjasama di kalangan birokrasi.
- 12) Peningkatan kompetensi sumber daya perencana.

- 13) Workshop perencanaan dan penganggaran yang terpadu.
- 13) Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel
- a. Analisis Program dan Kegiatan
- Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 97,79, pencapaian sasaran ini didukung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Program sebagai berikut :
- 1) Program Kepegawaian Daerah;
 - 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
- 1) Belum tercukupinya jam standar pelatihan dan pengembangan SDM ASN dalam satu tahun.
 - 2) Administrasi data dukung pelatihan dan pengembangan SDM ASN belum terdokumentasi dengan baik oleh masing-masing ASN.
- Kedepan untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang memiliki ASN yang berkompeten dalam kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini.
- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan (Diklatpim, diklat fungsional dan Diklat Teknis) bimbingan teknis dan kursus-kursus teknis.
 - 2) Melakukan integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian secara menyeluruh yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian.
 - 3) Melaksanakan Manajemen Talenta sebagai salah satu penerapan Sistem Merit di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
 - 4) Melaksanakan sistem pengembangan SDM ASN berdasarkan Pola Karier yang jelas.
 - 5) Membuka peluang peningkatan Pendidikan formal kepada semua PNS di lingkungan Kabupaten Purworejo.
- 14) Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima
- a. Analisis Program dan Kegiatan
- Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi Daerah dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 84,47 untuk indikator Indeks Pelayanan Publik dan 96,44 untuk indikator Indeks Inovasi Daerah, pencapaian sasaran ini didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas

BAB II

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan, dengan Program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 3) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 4) Program Pendaftaran Penduduk;
- 5) Program Pencatatan Sipil;
- 6) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 7) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- 8) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- 9) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 10) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
- 11) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- 12) Program Pengelolaan Arsip;
- 13) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
- 14) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- 15) Program Perekonomian Dan Pembangunan;
- 16) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 17) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- 18) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- 19) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- 20) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 21) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- 22) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- 23) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 24) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 25) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- 26) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
- 27) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- 28) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

BAB II

- 29) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 30) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 31) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah;
 - 32) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 33) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 34) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
- 1) Tingkat kematangan inovasi daerah belum optimal, yaitu dari aspek mutu inovasi dan dampak inovasi.
 - 2) Mall Pelayanan Terpadu belum digunakan secara optimal.
 - 3) Belum semua Unit Pelayanan melakukan reviu Standar Pelayanan yang dimiliki.
 - 4) Belum semua Unit Pelayanan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.
 - 5) Belum semua Perangkat Daerah menganalisis dan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi alat untuk perbaikan pelayanan di waktu mendatang.
- Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam pencapaian target pelayanan publik yang prima melalui optimalisasi Mall Pelayanan Terpadu, perbaikan pelayanan dengan menggunakan kajian analisis hasil SKM, meningkatkan berbagai kegiatan inovasi daerah dan krenova dengan bekerjasama dengan *stakeholder pentahelik*. Pemerintah Kabupaten Purworejo harus menyusun Peraturan Bupati pelaksanaan dari peraturan daerah tentang inovasi daerah.

15) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Umum

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Umum dengan indikator Indeks Infrastruktur Daerah dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 91.47, pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan Program sebagai berikut:

BAB II

- 1) Program Kawasan Permukiman;
 - 2) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
 - 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - 6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - 7) Program Penataan Bangunan Gedung;
 - 8) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
 - 9) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - 11) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - 12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
- 1) Pendanaan pembangunan infrastruktur publik kurang dari 40% dari total belanja APBD.
 - 2) Pendanaan pembangunan infrastruktur publik masih sangat bergantung pada sumber dana DAK
- Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten fokus dalam peningkatan kualitas infrastruktur umum dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur umum yang dibutuhkan masyarakat. Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya memenuhi *mandatory spending* infrastruktur sebesar 40% dari total APBD.
- 16) Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan
- a. Analisis Program dan Kegiatan
- Sasaran Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 87.44, pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, dengan Program sebagai berikut:
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
 - 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin

Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 9) Program Pengelolaan Persampahan;
 - 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan limbah domestik.
 - 2) Mulai tertibnya pengolahan air limbah oleh penghasil limbah industri.
 - 3) Meningkatnya konservasi lahan kritis dan gerakan Indonesia Hijau.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, memberikan sanksi terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah beroperasi tetapi tidak memiliki dokumen lingkungan hidup, meningkatkan konservasi lahan kritis dan gerakan Indonesia Hijau.

17) Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana

a. Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 100.5, pencapaian sasaran ini didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Program sebagai berikut:

- 1) Program Penanggulangan Bencana;
 - 2) Program Penanganan Bencana;
 - 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
- 1) Kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan semakin meningkat.
 - 2) Dukungan Desa Tangguh Bencana.
 - 3) Dukungan dari TAGANA dan BNPB.
 - 4) Adanya rencana *kontijensi* bencana.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam penanganan bencana dan siap dengan berbagai situasi dan kondisi

BAB II

dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan guna pemenuhan *response time* kebencanaan. Penerapan *early warning system* untuk menghadapi bencana di daerah.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal ini berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 **Urusan Pendidikan**

Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Purworejo dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 119 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

4.1.1 **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten Purworejo terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara usia 5-6 tahun dalam 1 (satu) tahun
- b. Pendidikan Dasar Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara usia 7-15 tahun dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pendidikan Kesetaraan Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara usia 7-18 tahun dalam 1 (satu) tahun.

4.1.2 **Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Purworejo menetapkan target dan pembiayaan pencapaian SPM dari jumlah warga negara yang harus diayani sebagai berikut:

--	--

BAB IV

Tabel 4.1
Target Dan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA						ANGGARAN (RP.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	21.345	Des 2024	Angka partisipasi sekolah	88,46	Des 2024	20.524.301.320
					Angka partisipasi Murni	87,10		
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	80,52		
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	73,16		
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	25		
					Kecukupan formasi guru ASN	100		
					Indeks distribusi guru	100		
					Proporsi PTK bersertifikat	30,01		
					Proporsi PTK penggerak	2,01		
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Sekolah Dasar (SD/Mi / SMP / Mts)	98.568	Des.2024			Des.2024	122.203.159.832
		Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang	105.727	Des 2024	Angka partisipasi kasar	99,24	Des 2024	78.366.159.447



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA						ANGGARAN (RP.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		Berpartisipasi Dalam Sekolah Dasar (SD/Mi)						
					Angka partisipasi sekolah	99,24		
					Kemampuan literasi	65,62		
					Kemampuan numerasi	49,14		
					Perbedaan Skor Literasi	6,16		
					Perbedaan Skor numerasi	5,54		
					Indeks iklim keamanan	75,51		
					Indeks iklim kebinekaan	75,62		
					Indeks iklim inklusivitas	58,17		
					Kecukupan formasi guru ASN	100		
					Indeks distribusi guru	100		
					Proporsi PTK bersertifikat	44,38		
					Proporsi PTK penggerak	7,7		
		Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Sekolah Dasar (SMP/MTs)	34.760	Des 2024	Angka partisipasi kasar	99,24	Des.2024	43.837.000.385
					Angka partisipasi sekolah	99,24		
					Kemampuan literasi	79,18		
					Kemampuan numerasi	68,77		
					Perbedaan Skor Literasi	6,16		



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA						ANGGARAN (RP.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Perbedaan Skor numerasi	8,95		
					Indeks iklim keamanan	70,14		
					Indeks iklim kebinekaan	74,21		
					Indeks iklim inklusivitas	58,54		
					Kecukupan formasi guru ASN	100		
					Indeks distribusi guru	100		
					Proporsi PTK bersertifikat	37,71		
					Proporsi PTK penggerak	4,19		
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	1.169	Des 2024	2 . Angka partisipasi sekolah	10,86	Des 2024	2.219.331.137

4.1.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Realisasi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Purworejo tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 4.2
Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini;	21.345	21345	100%	21.137.530.303	20.524.301.320	97,10
2	Pendidikan Dasar;	98.568	98.568	100%	126.482.562.738	122.203.159.832	96,62
3	Pendidikan Kesetaraan;	1.169	1.169	100%	2.497.102.200	2.219.331.137	88,88
	total				150.117.195.241	144.946.792.289	96,56

- b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Hasil capaian SPM Bidang Pendidikan pada tabel diatas, dijabarkan kembali melalui penghitungan IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar, pada masing-masing jenis pelayanan dasar yaitu:
- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- Capaian IP SPM penerima layanan Pendidikan Anak Usia Dini (AUD) setelah pembobotan adalah 80%, sedangkan capaian IP mutu minimal pelayanan dasar adalah 20%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)	(4:3 x 100%)	(5 x 80%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	21.345	21.345	100,00%	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar



BAB IV

		Jumlah Mutu yang harus dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Tersedia	(4:3 x 100%)	(5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi sekolah	88,46	88,46	100.00 %	20
2	Angka partisipasi Murni	87,10	87,10	100.00 %	20
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	80,52	80,52	100.00 %	20
4	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	73,16	73,16	100.00 %	20
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	25	25	100.00 %	20
6	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100.00 %	20
7	Indeks distribusi guru	100	100	93.00 %	20
8	Proporsi PTK bersertifikat	30,01	30,01	100.00 %	20
9	Proporsi PTK penggerak	2,01	2,01	100.00 %	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

2) Pendidikan Dasar

Capaian IP SPM penerima layanan Pendidikan Dasar setelah pembobotan adalah 80%, sedangkan capaian IP mutu minimal pelayanan dasar adalah 20%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Pendidikan Dasar	98.568	98.568	100,00%	80



BAB IV

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Sekolah Dasar				
1	Angka partisipasi kasar	99,24	99,24	100,00%	20,00
2	Angka partisipasi sekolah	99,24	99,24	100,00%	20,00
3	Kemampuan literasi	65,62	65,62	100,00%	20,00
4	Kemampuan numerasi	49,14	49,14	100,00%	20,00
5	Perbedaan Skor Literasi	6,16	6,16	100,00%	20,00
6	Perbedaan Skor numerasi	5,54	5,54	100,00%	20,00
7	Indeks iklim keamanan	75,51	75,51	100,00%	20,00
8	Indeks iklim kebinekaan	75,62	75,62	100,00%	20,00
9	Indeks iklim inklusivitas	58,17	58,17	100,00%	20,00
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100,00%	20,00
11	Indeks distribusi guru	100	100	100,00%	20,00
12	Proporsi PTK bersertifikat	44,38	44,38	100,00%	20,00
13	Proporsi PTK penggerak	7,7	7,7	100,00%	20,00
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6



BAB IV

	Sekolah Menengah Pertama				
1	Angka partisipasi kasar	99,24	99,24	100,00%	20,00
2	Angka partisipasi sekolah	99,24	99,24	100,00%	20,00
3	Kemampuan literasi	79,18	79,18	100,00%	20,00
4	Kemampuan numerasi	68,77	68,77	100,00%	20,00
5	Perbedaan Skor Literasi	6,16	6,16	100,00%	20,00
6	Perbedaan Skor numerasi	8,95	8,95	100,00%	20,00
7	Indeks iklim keamanan	70,14	70,14	100,00%	20,00
8	Indeks iklim kebinekaan	74,21	74,21	100,00%	20,00
9	Indeks iklim inklusivitas	58,54	58,54	100,00%	20,00
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100,00%	20,00
11	Indeks distribusi guru	100	100	100,00%	20,00
12	Proporsi PTK bersertifikat	37,71	37,71	100,00%	20,00
13	Proporsi PTK penggerak	4,19	4,19	100,00%	20,00
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20,00

3) Pendidikan Kesetaraan

Capaian IP SPM penerima layanan Pendidikan Dasar Kesetaraan setelah pembobotan adalah 80%, sedangkan capaian IP mutu minimal pelayanan dasar adalah 20%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)	(4:3 x 100%)	(5 x 80%)
1	2	3	4	5	6
3	Pendidikan Kesetaraan	1.169	1.169	100,00	80,00



BAB IV

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	(4:3 x 100%)	(5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi kasar	10,86	10,86	100,00%	20,00
2	Angka partisipasi sekolah	10,86	10,86	100,00%	20,00
3	Kemampuan literasi	56,19	56,19	100,00%	20,00
4	Kemampuan numerasi	51,56	51,56	100,00%	20,00
5	Perbedaan skor literasi	3,42	3,42	100,00%	20,00
6	Perbedaan skor numerasi	4,44	4,44	100,00%	20,00
7	Indeks iklim keamanan	67,74	67,74	100,00%	20,00
8	Indeks iklim kebinekaan	69,06	69,06	100,00%	20,00
9	Indeks iklim inklusivitas	55,85	55,85	100,00%	20,00
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100,00%	20,00
11	Indeks distribusi guru	100	100	100,00%	20,00
12	Proporsi PTK bersertifikat	5	5	100,00%	20,00
13	Proporsi PTK penggerak	5	5	100,00%	20,00
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20,00

c. Capaian IP SPM

Capaian IP SPM pendidikan pada tiap jenis pelayanan dasar diperoleh dengan menjumlahkan IP layanan dan IP mutu sehingga diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.6
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar	TOTAL IP	Kategori Indeks SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
2	Pendidikan Dasar	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
3	Pendidikan Kesetaraan	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
	TOTAL IP BIDANG PENDIDIKAN	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna



Adapun capaian IP SPM Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata tiga indikator pelayanan dasar sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemda yang bersumber dari APBD, APBN & Sumber lain yang sah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Alokasi anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp. 000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1	Pendidikan Anak Usia Dini;		21.137.530.303	
2	Pendidikan Dasar;		126.482.562.738	
3	Pendidikan Kesetaraan;		2.497.102.200	
	Total Anggaran		150.117.195.241	

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Berikut penjelasannya :

Tabel 4.8
Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenjang Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Pendidikan Anak Usia Dini;	1.393
2	Pendidikan Dasar;	6.578
3	Pendidikan Kesetaraan;	102

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	Pendataan	Warga yang dipesantren tidak ikut ke data dalam siswa pendidikan formal	Pendataan menyeluruh
II	EKSTERNAL		
1	Penduduk Usia	Pada saat mendaftar ke jenjang	Kerjasama dengan



	Paud belum semua paud	Sekolah Dasar, belum adanya persyaratan surat keterangan lulus dari sekolah PAUD	desa untuk sosialisasi pendidikan paud
2	Masih ada anak usia sekolah belum bersekolah atau putus sekolah.	Warga yang berkebutuhan khusus tidak berani bersekolah, Warga usia sekolah tidak melanjutkan sekolah karena sudah bekerja dan sudah menikah	Sosialisasi Pendidikan Inklusi dan pentingnya pendidikan dasar ke masyarakat

4.2 **Urusan Kesehatan**

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo

4.2.1 **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah ibu hamil dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah ibu bersalin dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah bayi baru lahir dalam 1 (satu) tahun.
- d. Pelayanan kesehatan balita indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah balita dalam 1 (satu) tahun.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai



BAB IV

dengan jumlah warga negara usia pendidikan dasar dalam 1 (satu) tahun.

- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif dalam 1 (satu) tahun.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut dalam 1 (satu) tahun.
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas dalam 1 (satu) tahun.
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas dalam 1 (satu) tahun.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat dalam 1 (satu) tahun.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat dalam 1 (satu) tahun.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga



BAB IV

negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) dalam 1 (satu) tahun.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dari jenis pelayanan dasar tersebut, Kabupaten Purworejo menetapkan target dan pembiayaan pencapaian SPM Kesehatan yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.10
Target Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/ kota yang mendapat pelayanan / jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/ kota	100% (6441 Ibu hamil)	Setiap tahun	Vaksin Tetanus Dipteri (Td)	4688	Des - 24	1.304.057.700
					Tablet tambah darah	792367		
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil	6462		
					Test Kehamilan, Pemeriksaan HB	6366		
					Pemeriksaan Golongan Darah	5141		
					Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3884		
					Skrining Triple Eliminasi (Hepatitis, Sifilis & Sifilis	6170		
					Kartu ibu/rekam medis ibu	5849		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6513		
					Media Promosi Komunikasi	2893		
					Gel USG	640		
					Tenaga Dokter	50		
					Tenaga Perawat	306		
					Tenaga Bidan	546		
					Tenaga Kefarmasian	45		
					Tenaga Gizi	47		
					Kunjungan 6 Kali	7306		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah ibu bersalin mendapat	100% (6515	Setiap tahun	Formulir Partograf	6515	Des - 24	566.220.400
					Kartu ibu (rekam	6515		



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bersalin	pelayanan / jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin)		medis)			
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6515		
					Media promosi			
					komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	2828		
					Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	51		
					Bidan	534		
					Perawat	335		
					Tenaga Kefarmasian	46		
					Tenaga Gizi	47		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan / Jumlah bayi baru lahir	100% (6348 bayi)	Setiap tahun	Vaksin Hepatitis B0	6348	Des - 24	150.665.800
					Vitamin K1 injeksi	6273		
					Salep/tetes mata antibiotic	6489		
					Formulir bayi baru lahir	6489		
					Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	6489		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8784		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5089		
					Dokter/dokter spesialis Anak	51		
					Bidan	530		
					Perawat Kefarmasian	337 46		
					Tenaga Promosi	36		
					Tenaga gizi	47		
					Kader Kesehatan	5900		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah balita usia 12 - 59 bulan	100% (39999 balita)	Setiap tahun	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	36364	Des - 24	34.383.600
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	38437		
					Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	34762		
					Vitamin A Biru	5365		
					Vitamin A Merah	37024		
					Vaksin imunisasi : BCG	8585		
					Polio Tetes	20279		
					IPV	10658		
					DPT HB Hib	15578		



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Campak rubella	8704		
					Imunisasi Lanjutan : DPT HB Hib	8320		
					Campak Rubella	8324		
					BHP	85433		
					Peralatan Anafilatik	1938		
					Formula gizi buruk	1929		
					Tenaga Dokter	41		
					Tenaga bidan	543		
					Tenaga gizi	47		
					Guru PAUD	1063		
					Kader Kesehatan	6080		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan / Jumlah anak usia pendidikan dasar	100% (93183 anak)	Setiap tahun	Buku raport kesehatanku	71155	Des - 24	613.372.040
					Buku pemantauan Kesehatan	69262		
					Kuesioner skrining Kesehatan	75932		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	39902		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	14507		
					Tablet tambah darah	417116		
					Alat pemeriksaan HB	59		
					Strip Hb	8399		
					Media promosi	9642		
					Vaksin Campak Rubella DT, Td Untuk BIAS	17110		
					Dokter/Dokter gigi	64		
					Bidan	533		
					Perawat	303		
					Tenaga Gizi	47		
					Tenaga Kefarmasian	44		
					Tenaga Kesmas	44		
					Tenaga Non Kesehatan (Guru) terlatih	1137		
					Tenaga Non Kesehatan	4253		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten atau kota yang mendapat	100% (28236 7orang)	Setiap tahun	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	8621	Des - 24	101.452.500
					Alat ukur LILA	15717		



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pelayanan skrining kesehatan sesuai standart / Jumlah orang usia 15 - 59 tahun			Tensimeter	15740		
					Glukometer	736		
					Alat pemeriksaan Hb	254		
					Tes tip gla darah, lancet,kapas alcohol	282367		
					KIT IVA Tes	170		
					Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	21601		
					Kit Ophthalmologi Masyarakat	43		
					Kuisisioner PUMA	74204		
					Alat pelayanan KB	110		
					Formulir pencatatan dan pelaporan (SIPTM)	282367		
					Vaksin TD	4322		
					Dokter	55		
					Bidan	540		
					Perawat	315		
					Ahli Gizi	47		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	44		
					Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Kader)	2896		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan / Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas	100% (115685 orang)	Setiap tahun	Alat pemeriksaan deteksi dini	11687	Des - 24	28.912.300
					Glukometer	5219		
					Alat Pemeriksaan kolesterol	5096		
					BMHP	75694		
					Instrumen Skrining	84456		
					Buku Kesehatan Lansia Sederhana (SKILAS)	55030		
					Media KIE	13481		
					Dokter	51		
					Bidan	542		
					Perawat	319		
					Ahli Gizi	46		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	44		
					Kader Kesehatan terlatih	3449		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan /	100% (78280 orang)	Setiap tahun	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi,	85	Des - 24	1.667.216.889



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah penderita hipertensi			Informasi,			
					Edukasi (KIE)	78820		
					Obat Hipertensi	405		
					Tensimeter	78280		
					Formulir SIPTM	11186		
					Dokter	54		
					Bidan	542		
					Perawat	313		
					Tenaga Gizi	47		
					Tenaga Promosi	35		
					Tenaga Kefarmasian	46		
					Tenaga Kesmas	44		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (11375 orang)	Setiap tahun	Obat Diabetes Mellitus	11375	Des - 24	3.111.250.219
					Fotometer atau Glukometer	821		
					BMHP	64386		
					Formulir SIPTM, ASIK	11375		
					Media KIE	718		
					Dokter	54		
					Bidan	542		
					Perawat	313		
					Tenaga Kefarmasian	46		
					Tenaga Kesmas	44		
					Ahli Gizi	47		
					ATLM	38		
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100% (4221 orang)	Setiap tahun	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	81	Des - 24	1.663110.819
					Penyedia Psikofarmaka	1230		
					Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	73619		
					Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan (SIK)	4221		
					Media KIE	291		
					Tenaga Dokter	48		
					Tenaga Lain yang terlatih dan mempunyai	28		



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kopetensi			
					Tenaga terlatih lainnya	69		
					Tenaga Profesional Lainnya	32		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (12139 orang)	Setiap tahun	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	368	Des - 24	1.345.032.000
					Reagen Zn TB	1013		
					Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	4309		
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	7724		
					Catridge tes cepat molekuler	2821		
					Formulir pencatatan dan pelaporan	2699		
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	108		
					Tuberkulin	63		
					Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis Paru	47		
					Perawat	298		
					Kefaramasian	46		
					Tenaga Kemas	44		
					ATLM	38		
					Radigrafer	11		
					Kader Kesehatan	905		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	100% (8292 orang)	Setiap tahun	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	1511	Des -24	53.785.150
					Tes Cepat HIV/RDT	6931		
					BMHP	7244		
					Rekam Medis	5782		
					Tenaga Dokter	68		
					Bidan	540		
					Perawat	298		



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Immunodeficiency Virus)				ATLM	38		
					Tenaga Kesmas	44		
					Tenaga Non Kesehatan	307		

4.2.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian SPM

Capaian penerapan SPM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel. 4.11
Realisasi Pelayanan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			ANGGARAN (RP.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kesehatan ibu hamil	6441	6441	100	1.304.057.700	1.222.650.940	93,8
2	Kesehatan ibu bersalin	6515	6515	100	566.220.400	322.874.300	92,3
3	Kesehatan bayi baru lahir	6348	6348	100	150.665.800	17.188.200	11,4
4	Kesehatan balita	39999	39999	100	34.383.600	31.034.900	90,3
5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar	93183	93183	100	613.372.040	537.437.00	87,6
6	Kesehatan usia produktif	282367	282367	100	101.452.500	99.716.800	98,3
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	115685	115685	100	28.912.300	24.537.400	84,9
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	78280	78280	100	1.667.216.889	1.662.490.719	99,7
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11375	11375	100	3.111.250.219	3.108.218.719	99,9
10	Pelayanan Kesehatan	4221	4221	100	1.663.110.819	1.658.275.319	99,7



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			ANGGARAN (RP.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Orang dengan gangguan jiwa berat						
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	12139	12139	100	1.345.032.000	1.294.902.400	96,3
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	8292	8292	100	53.785.150	38.453.171	71,5

- b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu
- Hasil capaian SPM Bidang Kesehatan pada tabel diatas, dijabarkan kembali melalui penghitungan IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar pada masing-masing jenis pelayanan dasar yaitu:
- 1) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil masing-masing tercapai sebesar 80 % dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.12
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTAS E	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6441	6441	100,00	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTAS E	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3		5	6
1	Vaksin Tetanus Dipteri	4688	4688	100,00	20



BAB IV

	(Td)				
2	Tablet tambah darah	792367	792367	100,00	20
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil	6462	6462	100,00	20
4	Test Kehamilan, Pemeriksaan HB	6366	6366	100,00	20
5	Pemeriksaan Golongan Darah	5141	5141	100,00	20
6	Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3884	3884	100,00	20
7	Skrining Triple Eliminasi (Hepatitis, Sifilis & Sifilis	6170	6170	100,00	20
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	5849	5849	100,00	20
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6513	6513	100,00	20
10	Media Promosi Komunikasi	2893	2893	100,00	20
11	Gel USG	640	640	100,00	20
12	Tenaga Dokter	50	50	100,00	20
13	Tenaga Perawat	306	306	100,00	20
14	Tenaga Bidan	546	546	100,00	20
15	Tenaga Kefarmasian	45	45	100,00	20
16	Tenaga Gizi	47	47	100,00	20
17	Kunjungan 6 Kali	7306	7306	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan ibu hamil					20

2) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTAS E	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6515	6515	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTAS E	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JAS A YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JAS A YANG TERSEDIA		



BAB IV

1	2	3	4	5	6
1	Formulir Partograf	6515	6515	100,00	20
2	Kartu ibu (rekam medis)	6515	6515	100,00	20
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6515	6515	100,00	20
	Media promosi				
4	komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	2828	2828	100,00	20
5	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	51	51	100,00	20
6	Bidan	534	534	100,00	20
7	Perawat	335	335	100,00	20
8	Tenaga Kefarmasian	46	46	100,00	20
9	Tenaga Gizi	47	47	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan ibu bersalin					20

3) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6348	6348	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Vaksin Hepatitis B0	6348	6348	100,00	20
2	Vitamin K1 injeksi	6273	6273	100,00	20
3	Salep/tetes mata antibiotic	6489	6489	100,00	20
4	Formulir bayi baru	6489	6489	100,00	20



BAB IV

	lahir				
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	6489	6489	100,00	20
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8784	8784	100,00	20
7	Dokter/dokter spesialis Anak	51	51	100,00	20
8	Bidan	530	530	100,00	20
9	Perawat	337	337	100,00	20
10	Kefarmasian	46	46	100,00	20
11	Tenaga Promosi	36	36	100,00	20
12	Tenaga gizi	47	47	100,00	20
13	Kader Kesehatan	5900	5900	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					20

4) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Balita Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.15
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Balita
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Balita	39999	39999	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	36364	36364	100,00	20
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	38437	38437	100,00	20



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	34762	34762	100,00	20
4	Vitamin A Biru	5365	5365	100,00	20
5	Vitamin A Merah	37024	37024	100,00	20
6	Vaksin imunisasi : BCG	8585	8585	100,00	20
7	Polio Tetes	20279	20279	100,00	20
8	IPV	10658	10658	100,00	20
9	DPT HB Hib	15578	15578	100,00	20
10	Campak rubella	8704	8704	100,00	20
11	Imunisasi Lanjutan : DPT HB Hib	8320	8320	100,00	20
12	Campak Rubella	8324	8324	100,00	20
13	BHP	85433	85433	100,00	20
14	Peralatan Anafilatik	1938	1938	100,00	20
15	Formula gizi buruk	1929	1929	100,00	20
16	Tenaga Dokter	41	41	100,00	20
17	Tenaga bidan	543	543	100,00	20
18	Tenaga gizi	47	47	100,00	20
19	Guru PAUD	1063	1063	100,00	20
20	Kader Kesehatan	6080	6080	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan balita					20

5) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.16
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		



BAB IV

1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	93183	93183	100,00	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Buku raport kesehatanku	71155	71155	100,00	20
2	Buku pemantauan Kesehatan	69262	69262	100,00	20
3	Kuesioner skrining Kesehatan	75932	75932	100,00	20
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	39902	39902	100,00	20
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	14507	14507	100,00	20
6	Tablet tambah darah	417116	417116	100,00	20
7	Alat pemeriksaan HB	59	59	100,00	20
8	Strip Hb	8399	8399	100,00	20
9	Media promosi	9642	9642	100,00	20
10	Vaksin Campak Rubella DT, Td Untuk BIAS	17110	17110	100,00	20
11	Dokter/Dokter gigi	64	64	100,00	20
12	Bidan	533	533	100,00	20
13	Perawat	303	303	100,00	20
14	Tenaga Gizi	47	47	100,00	20
15	Tenaga Kefarmasian	44	44	100,00	20
16	Tenaga Kesmas	44	44	100,00	20
17	Tenaga Non Kesehatan (Guru) terlatih	1137	1137	100,00	20
18	Tenaga Non Kesehatan	4253	4253	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					20

6) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut.



BAB IV

Tabel 4.17
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan
Kesehatan Pada Usia Produktif Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	282367	282367	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	8621	8621	100	20
2	Alat ukur LILA	15717	15717	100	20
3	Tensimeter	15740	15740	100	20
4	Glukometer	736	736	100	20
5	Alat pemeriksaan Hb	254	254	100	20
6	Tes tip gla darah, lancet,kapas alcohol	282367	282367	100	20
7	KIT IVA Tes	170	170	100	20
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	21601	21601	100	20
9	Kit Opthalmologi Masyarakat	43	43	100	20
10	Kuisisioner PUMA	74204	74204	100	20
11	Alat pelayanan KB	110	110	100	20
12	Formulir pencatatan dan pelaporan (SIPTM)	282367	282367	100	20
13	Vaksin TD	4322	4322	100	20
14	Dokter	55	55	100	20
15	Bidan	540	540	100	20
16	Perawat	315	315	100	20
17	Ahli Gizi	47	47	100	20
18	Tenaga Kesehatan Masyarakat	44	44	100	20
19	Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Kader)	2896	2896	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan pada usia produktif					20,00



BAB IV

7) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.18
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	115685	115685	100,00	20

NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Alat pemeriksaan deteksi dini	11687	11687	100	20
2	Glukometer	5219	5219	100	20
3	Alat Pemeriksaan kolesterol	5096	5096	100	20
4	BMHP	75694	75694	100	20
5	Instrumen Skrining	84456	84456	100	20
6	Buku Kesehatan Lansia Sederhana (SKILAS)	55030	55030	100	20
7	Media KIE	13481	13481	100	20
8	Dokter	51	51	100	20
9	Bidan	542	542	100	20
10	Perawat	319	319	100	20
11	Ahli Gizi	46	46	100	20
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat	44	44	100	20
13	Kader Kesehatan terlatih	3449	3449	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					20



BAB IV

8) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.19
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	78280	78280	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi,	85	85	100	20
2	Edukasi (KIE)	78820	78820	100	20
3	Obat Hipertensi	405	405	100	20
4	Tensimeter	78280	78280	100	20
5	Formulir SIPTM	11186	11186	100	20
6	Dokter	54	54	100	20
7	Bidan	542	542	100	20
8	Perawat	313	313	100	20
9	Tenaga Gizi	47	47	100	20
10	Tenaga Promosi	35	35	100	20
11	Tenaga Kefarmasian	46	46	100	20
12	Tenaga Kesmas	44	44	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					20,00

9) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus



BAB IV

Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11375	11375	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Obat Diabetes Mellitus	11375	11375	100	20
2	Fotometer atau Glukometer	821	821	100	20
3	BMHP	64386	64386	100	20
4	Formulir SIPTM, ASIK	11375	11375	100	20
5	Media KIE	718	718	100	20
6	Dokter	54	54	100	20
7	Bidan	542	542	100	20
8	Perawat	313	313	100	20
9	Tenaga Kefarmasian	46	46	100	20
10	Tenaga Kesmas	44	44	100	20
11	Ahli Gizi	47	47	100	20
12	ATLM	38	38	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus					20,00

10)Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut:



BAB IV

Tabel 4.21
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	4221	4221	100,00	80,00
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	81	81	100,00	20
2	Penyedia Psikofarmaka	1230	1230	100,00	20
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	73619	73619	100,00	20
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan (SIK)	4221	4221	100,00	20
5	Media KIE	291	291	100,00	20
6	Tenaga Dokter	48	48	100,00	20
7	Tenaga Lain yang terlatih dan mempunyai kompetensi	28	28	100,00	20
8	Tenaga terlatih lainnya	69	69	100,00	20
9	Tenaga Profesional Lainnya	32	32	100,00	20



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	4221	4221	100,00	80,00
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					20,00

11)Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan pada orang terduga *tuberkulosis* capaian masing-masing tercapai sebesar 80.% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.22
Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis berat Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12139	12139	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster,	368	368	100,00	20



BAB IV

	Banner)				
2	Reagen Zn TB	1013	1013	100,00	20
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	4309	4309	100,00	20
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	7724	7724	100,00	20
5	Catridge tes cepat molekuler	2821	2821	100,00	20
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	2699	2699	100,00	20
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	108	108	100,00	20
8	Tuberkulin	63	63	100,00	20
9	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis Paru	47	47	100,00	20
10	Perawat	298	298	100,00	20
11	Kefarmasian	46	46	100,00	20
12	Tenaga Kemas	44	44	100,00	20
13	ATLM	38	38	100,00	20
14	Radigrafer	11	11	100,00	20
15	Kader Kesehatan	905	905	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis					20

12)Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.23

Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Kabupaten Purworejo Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6



BAB IV

1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	8292	8292	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	1511	1511	100,00	20
2	Tes Cepat HIV/RDT	6931	6931	100,00	20
3	BMHP	7244	7244	100,00	20
4	Rekam Medis	5782	5782	100,00	20
5	Tenaga Dokter	68	68	100,00	20
6	Bidan	540	540	100,00	20
7	Perawat	298	298	100,00	20
8	ATLM	38	38	100,00	20
9	Tenaga Kesmas	44	44	100,00	20
10	Tenaga Non Kesehatan	307	307	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					20,00

c. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian IP SPM kesehatan pada tiap jenis pelayanan dasar diperoleh dengan menjumlahkan IP layanan dan IP mutu sehingga diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.24
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS SPM (IP LAYANAN + IP MUTU)	KATEGORI INDEKS SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan kesehatan balita;	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	100	Tuntas Paripurna



BAB IV

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	100	Tuntas Paripurna
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	100	Tuntas Paripurna
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	100	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	100	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	Tuntas Paripurna
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan		100	Tuntas Paripurna

4.2.4 Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.25
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN		
		APBN	APBD	SUMBER LAIN YANG SAH
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil		1.304.057.700	
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin		566.220.400	
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir		150.665.800	
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita		34.383.600	
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		613.372.040	
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif		101.452.500	
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut		28.912.300	
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi		1.667.216.889	
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita DM		3.111.250.219	
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		1.663.110.819	
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		1.345.032.000	



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN		
		APBN	APBD	SUMBER LAIN YANG SAH
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		53.785.150	
	Total		10.639.459.417	

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk Pencapaian SPM Bidang Kesehatan pada Tahun 2024 dibutuhkan Sumber Daya Personil Pelaksana Pelayanan sebagai berikut :

Tabel. 4.26
Sumber Daya Personil Pelaksana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SDM YANG TERLIBAT	JUMLAH
1	2	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter/dokter spesialis kebidanan	50
		Bidan	546
		Perawat	306
		Tenaga Kefarmasian	45
		Tenaga Gizi	47
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter/dokter spesialis kebidanan	50
		Bidan	546
		Perawat	306
		Tenaga Kefarmasian	45
		Tenaga Gizi	47
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter/dokter spesialis kebidanan	50
		Bidan	546
		Perawat	306
		Tenaga Kefarmasian	45
		Tenaga Gizi	47
		Tenaga Promosi Kesehatan	38
		Kader Kesehatan	5900
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter	50
		Bidan	546
		Perawat	306
		Ahli Gizi	47
		Guru PAUD	1063
		Kader Kesehatan	6080
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter/Dokter gigi	64
		Bidan	533
		Perawat	303



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SDM YANG TERLIBAT	JUMLAH
1	2	6	7
		Ahli Gizi	47
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	44
		Guru	1137
		Kader Kesehatan	4253
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter	55
		Bidan	540
		Perawat	315
		Ahli Gizi	47
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	44
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2896
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter	51
		Bidan	542
		Perawat	319
		Ahli Gizi	46
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	44
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	3449
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter	54
		Bidan	542
		Perawat	313
		Tenaga Gizi	47
		Tenaga Promosi Kesehatan	35
		Tenaga Kefarmasian	46
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	44
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter	54
		Bidan	542
		Perawat	313
		Tenaga Kefarmasian	46
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	46
		Ahli Gizi	47
		ATLM	38
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter	48
		Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi	28
		Tenaga lain yang terlatih kesehatan jiwa	69
		Tenaga professional lainnya	32
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	47
		Perawat	298
		Kefarmasian	46
		Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	38
		Penata Rontgen	11
		Tenaga kesehatan masyarakat	44
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	905
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	68
		Perawat	298



BAB IV

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SDM YANG TERLIBAT	JUMLAH
1	2	6	7
	Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Bidan	540
		Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	39
		Tenaga kesehatan masyarakat	44
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	307

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024, baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.27
Permasalahan Dan Alternatif Solusi Pelaksana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	Internal		
1	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan SPM sehingga beban kerja menjadi berat krn jumlah sasaran banyak (rasio)- SDM di puskesmas kebanyakan tugas rangkap- Belum semua SDM memiliki kompetensi sesuai standard- Keterbatasan anggaran dalam peningkatan mutu SDM	<ul style="list-style-type: none">- Efisiensi pembagian kerja- Mengusulkan renbut SDM- Peningkatan Kapasitas SDM melalui orientasi dan pelatihan- Pengusulan Anggaran
2	Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan biaya belum mengacu pada sistem pembiayaan SPM (<i>costing</i> SPM)- Keterbatasan anggaran dalam peningkatan mutu SDM- Alokasi anggaran belum sesuai besaran sasaran	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan dan penerapan <i>costing</i> SPM dalam perencanaan- Pengusulan Anggaran- Menentukan skala prioritas
3	Pemenuhan Kebutuhan mutu barang	<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan mutu barang masih kurang dikarenakan sasaran yang sangat besar terutama buku raport Kesehatan dan buku pemantauan Kesehatan lansia	<ul style="list-style-type: none">- Advokasi ke lintas sektor untuk pemenuhan mutu barang
4	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none">- Adanya Perbedaan persepsi dalam penentuan sasaran SPM serta perhitungan pencapaian	Peningkatan surveylans data



BAB IV

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
5	Pelayanan SPM	- Pelaksanaan pelayanan belum seluruhnya secara masif dan intergrasi lintas program	Meningkatkan cakupan pelayanan dengan sinergitas antar program Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelayanan Kesehatan sesuai standar
II	Eksternal		
1	Masyarakat	- Angka partisipasi masyarakat untuk mengakses pelayanan kurang - Adanya penolakan vaksinasi baik pada ibu hamil maupun bayi	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelayanan Kesehatan sesuai standar Koordinasi dengan lintas sektor terkait kehalalan vaksin
2	Lintas Sektor	- Keterlibatan lintas sektor dalam penggerakan masyarakat dan pemenuhan mutu layanan masih kurang - Pembedayaan Masyarakat yang belum optimal	Koordinasi dengan Pemda dan lintas sektor untuk meningkatkan keterlibatan lintas sektor dalam penggerakan masyarakat dan pemenuhan mutu layanan.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, jenis pelayanan dasar dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal (SPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum meliputi :

- a. penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Pekerjaan Umum memuat :
- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten Purworejo berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum



BAB IV

- sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu termasuk pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Indikator, target, anggaran, dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dapat dijelaskan menurut tabel berikut:

Tabel 4.28
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	37.484 orang	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	100%	Des 2024	14.540.682,700
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	371 SR		
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak	371 SR		



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	- Rumah Tangga		
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	- Rumah Tangga		
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5.984 orang	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	100%	Setiap Tahun	5.684.441
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1.496 Rumah Tangga		
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan	- Rumah Tangga		



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					penduduk <25 jiwa/hektar)			
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.496 Rumah Tangga		
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	- Rumah Tangga		
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan).	- Rumah Tangga		

Sumber : PU Tahun 2025



BAB IV

4.3.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah *selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan* rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Realisasi capaian SPM bidang pekerjaan umum tahun 2024 Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar Tahun 2024			Anggaran Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu APBN, APBD, dan Dana Lain	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	37.484 orang atau 9.371 SR	37.484 orang atau 9.371 SR	100,00	43.948.804.000	42.266.688.755	96,17
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	5.984 orang atau 1.496 Rumah Tangga	5.984 orang atau 1.496 Rumah Tangga	100,00	10.181.941.000	10.101.675.828	99,21

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2024 dalam hal target penerima layanan dasar SPM, DPUPR mampu mencapai target yang sudah ditentukan (100% tercapai). DPUPR dalam pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum dengan jenis pelayanan dasar terkait penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar **100 %**; sedangkan terkait penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar **100 %**.

Sedangkan untuk pencapaian akses layanan air minum se-Kabupaten Purworejo yang dihitung dari akumulasi perhitungan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.30
Rekapitulasi Layanan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2024

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/ KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5



BAB IV

Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	278.295	276.457	1.838	99,34
--	---------	---------	-------	-------

Sedangkan untuk pencapaian akses layanan air limbah domestik se-Kabupaten Purworejo yang dihitung dari akumulasi perhitungan akses sanitasi layak ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.31
Rekapitulasi Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Purworejo Tahun 2024

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/ KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	278.295	266.565	11.730	95,785

Dari tabel 4.30 dan 4.31 hasil penghitungan, total KK tahun 2024 sebesar 278.295 KK, total akses air minum ada 276.457 KK (99,34 %) dengan rincian 88.419 KK (31,77 %) jaringan perpipaan dan 188.038 KK (67,57 %) bukan jaringan perpipaan. Ada 1.838 KK (0,66 %) yang belum memiliki akses air minum layak yang menjadi target pemenuhan di tahun-tahun berikutnya.

Dari tabel 4.30 dan 4.31 hasil penghitungan, total KK tahun 2024 sebesar 278.295 KK, akses sanitasi layak 266.565 KK (95,785 %). Ada 11.730 KK (4,215 %) yang belum memiliki akses sanitasi layak yang menjadi target pemenuhan di tahun-tahun berikutnya.

Hasil tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Purworejo mampu **memenuhi** target dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo, serta Renstra dan Renja DPUPR Kabupaten Purworejo. Dalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja termuat indikator target persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di tahun 2024 sebesar 99,24 % dan target persentase Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di tahun 2024 sebesar 95,50 %.

- b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu
 - 1) Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah sebagai berikut :



Tabel 4.32
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Penyediaan Kebutuhan
Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	37484	37484	100,00	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah Mutu yang terlayani (Rumah Tangga)		
1	2	3	4	5	6
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	9371	9371	100,00	
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	9371	9371	100,00	

BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	37484	37484	100,00	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah Mutu yang terlayani (Rumah Tangga)		
1	2	3	4	5	6
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	-	-	100,00	
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	-	-	100,00	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (TOTAL KOLOM 5/JUMLAH MUTU)				100,00	20,00

2) Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut:



BAB IV

Tabel 4.33
Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase(4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar(5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5984	5984	100,00	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah Mutu yang terlayani (Rumah Tangga)		
1	2	3	4	5	6
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1496	1496	100,00	
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	1496	1496	100,00	



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase(4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar(5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5984	5984	100,00	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah Mutu yang terlayani (Rumah Tangga)		
1	2	3	4	5	6
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	-	-	100,00	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (TOTAL KOLOM 5/JUMLAH MUTU)				100,00	20,00

c. Capaian IP SPM

Tabel 4.34
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	Tuntas Paripurna
	Rata-Rata Indeks SPM Bidang Pekerjaan Umum	100	Tuntas Paripurna



BAB IV

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah baik bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lain yang sah. Alokasi anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)					
		APBN TUGAS PEMBANTUAN	APBD DAU	APBD DAK	APBN (DEKON SENTRASI)	Sumber Lain yang Sah	TOTAL
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.400.000	390.302,7	14.150.380	24.508.121,3	2.500.000	43.948.804
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.400.000	925.350	4.759.091	-	3.097.500	10.181.941
	TOTAL	3.800.000	1.315.652,7	18.909.471	24.508.121,3	5.597.500	54.130.745

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.36
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang
Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suranto, S.T., S.Sos., MPA.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Gunarto, S.T.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Riski Khozari, S.T.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Anawati Soewarno, S.P.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Sekretaris
5.	Hana Norma Rakhmawati, S.T.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
6.	Katarina Widhyanti, S.T.	Teknik Penyehatan	Anggota



BAB IV

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Lingkungan Ahli Pertama	
7.	Aditiya Dimas Rakasiwi, S.T.	Pengelola Jasa Konstruksi	ggota
8.	Sukma Adi Pratama, A.Md.T	Pengelola Jasa Konstruksi	ggota
9.	Suyanto	knisi Rancang Bangun	ggota
10.	Hari Purnomosidi	Pengemudi	ggota
11.	Muh. Mukhlas	Pramu Kebersihan	ggota

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh. Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diperlukan dapat dijelaskan menurut tabel berikut:

Tabel 4.37
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Pengumpulan data	Banyaknya jumlah desa/kelurahan (494) menjadikan pendataan holistic banyaknya rumah, jumlah rumah tangga, sumber air baku, kapasitas intake, kapasitas produksi, idle capacity, jenis SPAM, dan jenis bangunan sanitasi yang dimiliki di Kab. Purworejo membutuhkan waktu lama dan melibatkan peran aktif desa.	Pembuatan sistem berbasis internet yang digunakan untuk input data pembangunan secara holistik. Dimana pemerintah desa berperan langsung dalam pengisian aplikasi
	Pengumpulan Data	Pendataan penerapan SPM secara lengkap dan detail baru dilaksanakan di tahun 2022 sehingga pengumpulan data air minum dan sanitasi untuk tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya sulit disajikan karena data yang	Perlu kerja sama dengan pihak pihak terkait yang mempunyai data-data air minum dan sanitasi lengkap di tahun sebelum 2022. Perlu penambahan personil dalam



BAB IV

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
		ada kurang lengkap.	mengerjakan pendataan yang diperlukan dalam penerapan SPM terutama untuk air minum dan sanitasi.
2	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan aktual jumlah rumah/KK, jaringan perpipaan, bukan perpipaan, dan jumlah bangunan sanitasi harus selalu dapat dilakukan pembaruan secara berkala sehingga memerlukan waktu yang lama karena banyaknya desa di Kabupaten Purworejo dan memerlukan banyak data sekunder dari pihak terkait lainnya.	Penghitungan kebutuhan didasarkan pada data sekunder terbaru dari instansi pemerintah yang dapat dipercaya. Ketika aplikasi pengumpulan data siap, hasil data sekunder dan aplikasi dapat dikomparasikan untuk menghasilkan keakuratan data yang lebih baik
	Penghitungan Kebutuhan	Dalam tabel penghitungan kebutuhan terdapat data nama KK dan NIK tiap KK yang tentunya membutuhkan proses yang lama dan kerja sama dengan pihak terkait selama kurun waktu tertentu sehingga untuk pemanfaat air minum dan sanitasi di tahun sebelum 2022 tidak dapat diperoleh. Sedangkan untuk tahun 2024 masih ada beberapa BNBA penerima SPAM yang belum melengkapi data NIK. Data NIK jika diupload dalam website spm bangsa menjadi sesuatu yang rawan akan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Pengumpulan data nama KK dan NIK di tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya tidak perlu ditampilkan maupun diupload dalam laporan penerapan SPM. Data NIK penerima layanan air minum dan sanitasi tahun 2022,2023, dan 2024 juga tidak perlu diupload pada website spm bangsa.
3	Perencanaan dan	Anggaran yang ada (APBN, Provinsi, dan Kabupaten)	Optimalisasi segala sumber pedanaan baik



BAB IV

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
	Penganggaran	belum dapat memenuhi kebutuhan penyediaan/ peningkatan sarana SPAM dan pengelolaan air limbah domestik untuk mencapai target 100% akses air minum dan sanitasi layak.	dari pemerintah maupun CSR dalam pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi
4	Pelaksanaan	Data yang sulit didapatkan secara lengkap sehingga menghambat pembuatan laoporan SPM dan lampirannya.	
II	Eksternal		
5	Keakuratan data	Data sekunder belum dapat dipastikan tingkat keakuratannya terutama pada penghitungan jaringan perpipaan yang dihibahkan kepada KP-SPAMS karena sulitnya koordinasi kepada KP-SPAMS. Data terkait air minum bukan jaringan perpipaan juga sulit kita dapatkan data sekundernya.	Adanya koordinasi yang baik antara KP-SPAMS dan dinas, peningkatan kapasitas KP-SPAMS dalam pengelolaan data SR, dan bantuan pendanaan bagi KP-SPAMS untuk menunjang pendataan yang lebih baik.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dasar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.



BAB IV

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinperkimtan Kabupaten Purworejo melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat kewenangan kabupaten/kota yang meliputi :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.
Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan jasa sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dalam 1 (satu) tahun.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan jasa sesuai dengan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dalam 1 (satu) tahun.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu 1 tahun termasuk perhitungan pembiayaannya. Indikator, target, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan menurut tabel berikut:

Tabel 4. 38.
Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang	Jumlah warga negara korban bencana yang	20 orang	Desember 2024	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban	0	Desember 2024	0



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	memperoleh rumah layak huni dalam 1 (satu) tahun			bencana			
					2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	5		28.000.000
					3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0		0
					4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0		0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dalam 1 (satu) tahun.	-	Desember 2024	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	Desember 2024	0
					2. Subsidi Uang Sewa	0		0
					3. Penyediaan Rumah Layak Huni	0		0

Sumber : Dinperkimtan 2024

4.4.3 Realisasi

- a. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal
- Realisasi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 Kabupaten Purworejo dibagi menjadi 2 uraian. Uraian pertama adalah capaian SPM yang menjelaskan pemberian layanan dasar menurut penerima dan mutu barang. Uraian kedua adalah realisasi anggaran untuk pengumpulan data. Realisasi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 4. 39.
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	20	20	100	28.000.000 76.482.000	28.000.000 75.334.761	100 98,50
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	100	-	-	100

Sumber : Dinperkimtan, 2024

Pada tahun 2024, jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi 100% yaitu dari rencana target 5 unit rumah tertangani dan realisasi penanganan juga 5 unit. Serapan anggaran pada jenis layanan SPM tersebut sebesar Rp. 28.000.000,- atau sebesar 100% dari anggaran Baznas Kabupaten Purworejo untuk 5 penerima yang masuk dalam SK Bupati Purworejo tentang Penetapan Status Kebencanaan Daerah, sedangkan anggaran dari APBD sebesar Rp.76.482.000,- terealisasi sebesar Rp.75.334761,- atau sebesar 98,50 %

Sedangkan pada jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupate/Kota, dikarenakan tidak adanya SK Kepala Daerah tentang penetapan daerah yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten Purworejo, maka tidak ada target yang harus direalisasikan dan capaian dinilai 100%.

- b. Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Layanan Dasar
- Hasil capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada realisasi capaian SPM diatas dijabarkan kembali melalui penghitungan IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar pada masing-masing jenis pelayanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat. Hasil penghitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut.



BAB IV

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
- Capaian IP penerima layanan dasar dan IP mutu minimal layanan dasar untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota masing-masing telah terpenuhi yaitu sebesar 80% dan 20%. Berikut penjelasannya.

Tabel 4. 40

Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	20	20	100	80
Total Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencan Kabupaten/Kota					80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	5	5	100	20
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	-
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	-	-	-	-



BAB IV

Total Indeks Pencapaian Mutu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencan Kabupaten/Kota	20
--	----

Sumber : Dinperkimtan, 2024

2) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar untuk Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing telah terpenuhi yaitu sebesar 80% dan 20%. Dikarenakan tidak adanya SK Kepala Daerah tentang penetapan daerah yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten Purworejo, maka tidak ada target yang harus direalisasikan dan capaian dinilai 100%. Berikut penjelasannya.

Tabel 4.41.

Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	-	-	100	80
Total Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitas penggantian hak atas penguasaan	-	-	-	-



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	tanah dan/atau bangunan				
2	Subsidi uang sewa	-	-	-	-
3	Penyediaan rumah layak huni	-	-	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					20

Sumber : Dinperkimtan, 2024

- c. Capaian Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM)
Hasil capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar pada tabel diatas dijabarkan kembali melalui penghitungan IP SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.42.
Capaian IP SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Penerima Layanan Dasar + IP Mutu Minimal Layanan Dasar)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Dinperkimtan, 2024

Dari hasil penghitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian IP SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo tahun 2024 pada dua jenis pelayanan dasar adalah 100,00% dengan kategori **TUNTAS PARIPURNA**.



4.4.4 Alokasi Anggaran

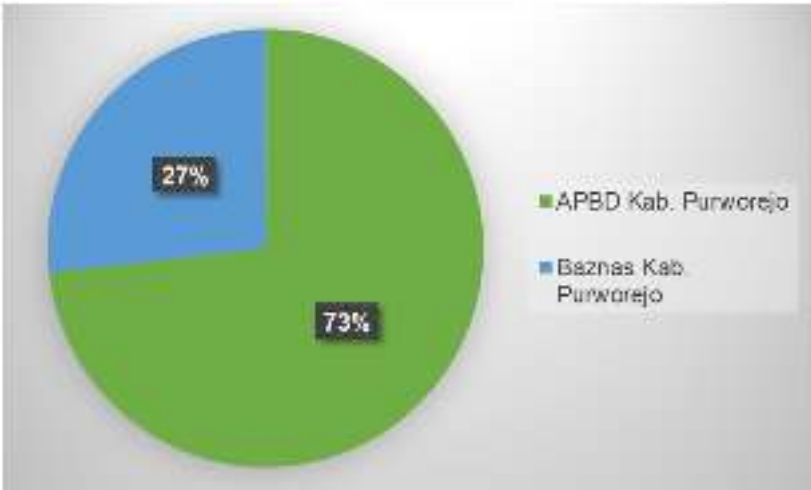
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah baik bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lain yang sah. Alokasi anggaran penanganan rumah korban bencana pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.307.004.000,- dimana Rp. 466.200.000,- atau 44% bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan 9 unit rumah dan Rp. 840.804.000,- atau 56% bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo untuk penanganan 16 unit rumah. Sedangkan alokasi anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2023 sebesar Rp. 184.000.000,- yang seluruhnya berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan 5 unit rumah.

Tabel 4.43.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			
		APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Sumber lain (Baznas Kab. Purworejo)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	-	-	76.482.000	28.000.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	76.482.000	28.000.000

Sumber : Dinperkimtan, 2024

Gambar 4. 1.
Persentase Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024



Sumber : Dinperkimtan, 2024

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 dapat dijelaskan menurut tabel berikut.

Tabel 4. 44.
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah SDM yang Terlibat dalam Penerapan SPM	OPD
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Pegawai ASN dan Non ASN Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat berjumlah 6 orang	Dinperkimtan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Pegawai ASN dan Non ASN Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat berjumlah 6 orang	Dinperkimtan

Sumber : DINPERKIMTAN, 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024, kendala yang dihadapi dan solusi yang diperlukan dapat dijelaskan menurut tabel berikut.

Tabel 4. 45.
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Pengumpulan Data	Belum dilakukan penyusunan database jumlah rumah yang berada bukan pada peruntukannya, sedangkan pendataan rumah yang berada di kawasan rawan bencana baru sebagian kecamatan	Penganggaran segera untuk penyusunan database yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan SPM



BAB IV

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
2	Penghitungan Kebutuhan	Kebutuhan penanganan sudah dilaksanakan terhadap rumah korban bencana yang belum tertangani. Verifikasi telah dilakukan. Namun kejadian bencana selalu bertambah baru setiap tahunnya.	Perhitungan kebutuhan program tiap tahun harus didukung dengan update data berkala terhadap kejadian bencana.
3	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none">Keterbatasan anggaran jika mengacu pada rencana aksi ideal tahunan. Anggaran penanganan fisik masih terkena efisiensi	Peningkatan alokasi anggaran SPM Perumahan rakyat sesuai rencana aksi. Menghindarkan anggaran SPM dari efisiensi/ refocusing.
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya koordinasi antar OPD, desa, masyarakat, maupun swasta dalam pelaksanaan SPM perumahan rakyatPengadaan lahan relokasi rumah korban bencana belum dapat dianggarkan hingga tahun ini	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan koordinasi antar stakeholder pada tiap tahapan pelaksanaan SPM tiap tahunnyaPengajuan tanah negara menjadi hak pakai relokasi perumahan atas nama Pemda Purworejo
II	Eksternal		
	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none">Belum terjalinnya konsolidasi yang kuat antar OPD, desa maupun masyarakat dalam pendataan dan perencanaan SPM perumahan rakyat ke depanAlokasi bantuan SPM antar pos anggaran tiap instansi terkait (pemda, swasta, LSM) belum terkoordinasi berdasarkan data terpadu.	Memulai koordinasi lintas pihak guna membentuk kesepahaman, perencanaan terpadu dan pelaksanaan yang terkoordinir dengan baik demi terwujud penanganan korban bencana/relokasi yang cepat dan merata.

Sumber : Dinperkimtan, 2024

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat terbagi menjadi 3 sub urusan yaitu:

1. Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum)
2. Sub Urusan bencana
3. Sub Urusan kebakaran

Adapun dalam prakteknya ketiga sub urusan dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana



BAB IV

Di Kabupaten Purworejo Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan Oleh :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis dan indikator untuk pelayanan dasar Urusan Pemerintahan bidang trantibumlinmas dilihat dari penerima pelayanan dasar dan mutu minimal pelayanan dasar, yaitu:

- a. Sub Urusan Trantibum :
 - 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun yang memuat :
 - a) Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
 - b) Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
 - c) Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat; dan
 - d) Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada.
- b. Sub Urusan Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

 - 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dalam 1 (satu) tahun. Yang terdiri dari :
 - a) Penusunan Kajian Risiko Bencana



BAB IV

- b) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
 - 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :
 - a) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - c) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
 - d) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
 - e) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - f) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
 - 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :
 - a) Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
 - b) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - c) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - d) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
 - e) Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit
- c. Sub Urusan Kebakaran
- 1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam 1 (satu) tahun, memuat:
 - a) Tingkat waktu tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak



BAB IV

- diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d) Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia;
- e) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100%

- a. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibun Kabupaten Purworejo.
Target Pencapaian SPM Bidang Tranntibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memuat:
 - 1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten
 - a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
 - b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
 - c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat; dan
 - d. Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada.
 - 2. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten
 - a. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba di Lokasi dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi;
 - b. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 - c. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;



BAB IV

- d. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Sumber Daya Manusia;
- e. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran; dan
- f. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada;
2. Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Dari jenis pelayanan dasar tersebut, Satpol PP Damkar Kabupaten Purwoejo menetapkan target dan pembiayaan pencapaian SPM yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.46
Target Indikator Kinerja Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran
Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	JENIS PELAYANA N DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayana n Ketentra man dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	1500	Setiap Tahun	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa:: perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan</i>	271 Unit	Setiap Tahun	5.464.850.664,00



BAB IV

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)			
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	13 Dokumen	Setiap Tahun	
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti	48 orang	Setiap Tahun	



BAB IV

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlin mas)			
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	2 Dokumen	Setiap Tahun	
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda	4 orang	Setiap Tahun	



BAB IV

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)			
					Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	4 orang	Setiap Tahun	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	409	Setiap Tahun	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	76 Layanan	Setiap Tahun	3.045.718.600,00



BAB IV

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	6 Dokumen	Setiap Tahun	
					Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	481 Unit	Setiap Tahun	
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	38 Orang	Setiap Tahun	
					Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	40 Layanan	Setiap Tahun	



BAB IV

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(korban jiwa langsung)			
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	40 Layanan	Setiap Tahun	

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Target Pencapaian dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.47
Target Pencapaian Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Sub Urusan Kebencanaan di Kabupaten Purworejo tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan	530169 jiwa	Des 2024	Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan	1 Dokumen	Des 2024	89.200,4



BAB IV

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bencana			dokumen kajian risiko bencana			
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	530.169	Des 2024	
					Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	420 Orang	Des 2024	
					Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	10 unit	Des 2024	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	65	Des 2024	Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	8 Unit	Des 2024	2.958.067,482
					Peningkatan Kapasitas	65	Des 2024	



BAB IV

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Kebencanaan)	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			sitas Personil/ Sumber Daya Manusia (SDM)			
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Tidak Terjadi Bencana	Des 2024	1.581.877,347
TOTAL								4.629.145,229

4.5.3 Realisasi

- a. Realisasi Capaian
- 1) Realisasi Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibun dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 3.4 Realisasi *Capaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024* sebagai berikut:

Tabel 4.48
Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Trantibum
dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1500	1500	100%	5,464,850,664	5,263,545,009	96,32%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	409	409	100%	3,045,718,600	2,964,688,109	97,34%

Sumber : Satpol PP dan Damkar, Desember 2024



BAB IV

2) Realisasi capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.49
Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	420	420	100%	91.711.800	89.200.400	97,26%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	37	37	100%	3.057.976.460	2.958.067.482	96,73%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tidak Terjadi Bencana	Tidak Terjadi Bencana	100%	1.755.638.000	1.581.877.347	90,10%

b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu
Dalam upaya pencapaian target tersebut di atas, hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas pada tabel diatas, dijabarkan Kembali melalui perhitungan IP penerima layanan dasar dan IP mutu minimal layanan dasar pada masing masing jenis pelayanan dasar.

1. Sub Urusan Trantibun dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diuraikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 4.50
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Trantibum
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1500	1500	100%	80%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa:: perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)</i>	271 unit	271 unit	100%	20%
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* <i>(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</i>	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	20%
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** <i>(jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</i>	48 Orang	48 Orang	83,33%	20%
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material	2 Dokumen	2 Dokumen	78,95%	20%



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	(berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal				
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	4 Orang	4 Orang	100%	20%
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	4 Orang	4 Orang	100%	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/ jumlah mutu)					20%

Tabel 4.51
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Kebakaaran Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	409	409	100%	80%



BAB IV

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
1.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (<i>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar</i>)	76 Layanan	76 Layanan	100%	20%
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (<i>seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.</i>)	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	20%
3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (<i>pos damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.</i>), penyelamatan dan evakuasi (<i>helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.</i>)	481 Unit	481 Unit	100%	20%
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (<i>jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I</i>)	38 Orang	38 Orang	100%	20%
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (<i>korban jiwa langsung</i>)	40 Layanan	40 Layanan	100%	20%
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (<i>korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat</i>	40 Layanan	40 Layanan	100%	20%



BAB IV

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
	kebakaran)				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20%

Sumber : Satpol PP dan Damkar, Desember 2024

Pada tahun 2024 pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) capaian IP Pelayanan Dasar telah terpenuhi yaitu sebesar 80%. Kemudian untuk capaian IP Mutu Layanan pada Mutu Layanan Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil dan Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan, pada tahun 2024 tidak ada aduan masyarakat terkait dengan dampak penegakan Perda dan Perkada. Meski demikian, IP mutu minimal layanan dasar tetap terpenuhi yaitu 20%. Capaian Indeks Pelayanan (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masing-masing IP tercapai yaitu IP Pelayanan Dasar 80% dan IP Mutu Layanan Dasar sebesar 20%.

2. Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diuraikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel.4.52

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	420	420	100%	80%



BAB IV

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
1	Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana	1	1	100%	20%
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	530169	530169	100%	20%
3	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	420	420	100%	20%
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	10	10	100%	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 5/jumlah mutu)					20%

Tabel.4.53
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	37	37	100%	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
1	Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	8	8	100%	20%



BAB IV

2	Peningkatan Kapasitas Personil/ Sumber Daya Manusia (SDM)	65	65	100%	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 5/jumlah mutu)					20%

Tabel.4.54
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
3	penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tidak Terjadi Bencana	Tidak Terjadi Bencana	100%	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 5/jumlah mutu)					20%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					100%
1	PENDATAAN				
	Form 5.A.1 Daftar warga negara yang berada di kawasan rawan bencana				100%
	Form 5.A.2 Daftar kerawanan tempat tinggal individu warga negara				100%
	Form 5.A.3 Rekapitulasi kelompok warga negara berdasarkan kelompok kerawanan desa				100%
	Form 5.A.4 Rekapitulasi aparat dan warga negara di kawasan rawan bencana				100%
	Form 5.A.5 Daftar petugas operasi penanganan darurat bencana berdasarkan lokasi penugasan				100%
	Form 5.A.6 Rekapitulasi warga negara wajib latih				100%
	Form 5.A.7 Daftar ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap				100%



BAB IV

	darurat bencana	
	Form 5.A.8 Daftar ketersediaan stok logistik pengungsian	100%
	Form 5.A.9 Daftar warga negara yang menjadi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)	100%
	Form 5.A.10 Daftar status korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)	100%
	Form 5.A.11 Daftar petugas aktif pada operasi tanggap darurat bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)	100%
	Form 5.A.12 Daftar kejadian bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)	100%
2	PERHITUNGAN	
	Form 5.B.1 Penghitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan terhadap bencana	100%
	Form 5.B.2 Penghitungan kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)	100%
3	PERENCANAAN	
	Form 5.C.1 Rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
	Form 5.C.2 Rencana proyeksi kebutuhan pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 5/jumlah mutu)		100%

Pada Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo tidak terjadi Bencana Alam sehingga tidak ada kegiatan untuk pemenuhan mutu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, namun demikian upaya pemenuhan Mutu Pencapaian SPM telah dilakukan dengan: Pendataan, Perhitungan, dan Perencanaan sehingga mencapai 100%

- c. Capaian IP SPM
- 3) Hasil capaian SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada tabel diatas, dijabarkan kembali melalui penghitungan IP Penerima Layanan Dasar dan IP mutu minimal layanan dasar, sehingga diperoleh IP SPM BidangTrantibumlinmas sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.55
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
----	-----------------------	--	--	-----------------------------------	---------------------



BAB IV

1	2	3	4	5	6
1	Sub Urusan Trantibun	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
2	Sub Urusan Bencana Daerah	80%	20%	100,%	Tuntas Paripurna
3	Sub Urusan Kebakaran	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
	IP TRANTIBUMLINMAS			100%	Tuntas Paripurna

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Sub Urusan Trantibun dan Sub Urusan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.56.

Alokasi Anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lainnya yang Sah
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	5.464.850.664,00	-
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	-	3.045.718.600,00	-

Alokasi anggaran Tahun 2024 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana berjumlah Rp 4.629.145.229 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.57

Alokasi Anggaran BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lainnya yang Sah
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	89.200.400	-
2	Pelayanan Pencegahan dan	-	2.958.067.482	-



BAB IV

	Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	1.581.877.347	-
	TOTAL		4.629.145.229	

4.5.5 Dukungan Personil

- a. Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran
- Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.58
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
ASN Satpol PP		
1	S2	7
2	S1	13
3	D4	3
4	D3	6
5	SMA/SLTA	18
6	SMP	1
	Jumlah	48
Non ASN Satpol PP		
1	S1	6
2	D4	1
3	D3	1
4	SMA/SLTA	10
	Jumlah	18
ASN Damkar		
1.	S1	3
2.	D4	1
3.	D3	3
4.	SMA/SLTA	16
	Jumlah	23
Non ASN Damkar		
1	D3	2
2	SMA/SLTA	22
	Jumlah	24
	Total	113



BAB IV

b. Sub Urusan Bencana

Jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana ada 62 orang yang terdiri dari 22 ASN dan 32 Non-ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.59.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	38
2	Perempuan	16
JUMLAH		54

Tabel 4.60
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana
berdasarkan Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	4
2	S1	20
3	DIII	10
4	SLTA/ sederajat	20

Tabel 4.61
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana
Berdasarkan Jabatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1	JABATAN STRUKTURAL	6
	a. Kepala Pelaksana	0
	b. Kepala Sekretariat	1
	c. Kepala Bidang	3
	d. Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
	e. Kasubag Keuangan	1
2	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	8
	a. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	3
	b. Perencana Ahli Muda	1
	c. Terampil Arsiparis	1
3	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	13
	a. Analis Bencana	3
	b. Bendahara	1
	c. Penyuluh Bencana	1



BAB IV

NO	JABATAN	JUMLAH
	d. Pengadministrasi Umum	2
	e. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2
	f. Verifikator Keuangan	1
	g. Pengadministrasi Keuangan	1
4	Tenaga Teknis Kebencanaan	31
5	Tenaga Kebersihan	1

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas terdapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik Internal maupun Eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.62
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi
a	Sub Urusan Trantibum		
1.	Pengumpulan data	<p>Belum dapat dilaksanakan pendataan secara maksimal terkait dengan:</p> <p>1. Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda dan Perkada;</p> <p>2. Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada</p> <p>dikarenakan dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah personil yang terbatas sehingga pada saat melaksanakan kegiatan/ penegakan perda dan perkada belum sepenuhnya dapat melaksanakan pendataan/ mendata Jumlah Warga Negara dan Fasilitas Sosial Aset Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda dan Perkada, selain itu dari Dinas Capil sendiri tidak berkewenangan untuk memberikan data dikarenakan adanya regulasi baru sehingga data yang diperoleh belum maksimal.</p>	<p>a. Memaksimalkan personil yang ada pada saat melaksanakan kegiatan/ penegakan perda dan perkada dikarenakan adanya regulasi terkait dengan belum diperbolehkannya untuk menambah/ merikrut tenaga;</p> <p>b. Akan melaksanakan MoU dengan Dinas/ instansi terkait untuk identitas warga, juga terkait dengan aset-aset negara.</p> <p>c. Meningkatkan kinerja personil agar dapat diperoleh data secara maksimal.</p>



BAB IV

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi
2.	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan Kebutuhan: 1. Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum; 2. Penyusunan SOP; 3. Sarana dan Prasarana Satpol PP; 4. Pelayanan Dasar Warga Negara yang Terkena Dampak; sudah dilaksanakan akan tetapi untuk Penyusunan SOP belum dilaksanakan pembaharuan SOP; kemudian untuk Pelayanan Dasar Warga yang terkena dampak hingga saat ini belum ada aduan terkait dengan kerugian baik materil maupun pengobatan oleh warga negara akibat penegakan perda dan perkara.	1. Akan melaksanakan pencermatan terkait SOP yang sudah ada; 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan Sarpras dan Personil	a. Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; b. Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP; c. Peningkatan alokasi anggaran SPM Sub Urusan Trantibum serta menghindarkan anggaran yang berkaian dengan penunjang SPM dari efisiensi/ refokusing.
4.	Pelaksanaan	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasaran dan pemenuhan personil dalam menunjang SPM sub urusan Trantibum	a. Memaksimalkan Sarparas dan personil yang ada; b. Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; c. Koordinasi terkait dengan penambahan personil penunjang kegiatan dengan BKPSDM.
b	Sub Urusan Kebakaran		



BAB IV

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan data	Belum maksimal dalam melaksanakan penyusunan database jumlah Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran Kabupaten/Kota diakrenakan keterbatasan personil/ tenaga ahli yang membidangi terkait dengan pendataan dan investigasi kejadian kebakaran sehingga data yang diperoleh untuk mencukupi hal tersebut belum maksimal.	<div><div>a.</div><div>b.</div><div>c.</div><div>d.</div></div> Memaksimalkan personil yang ada pada saat melaksanakan kegiatan; Pengusulan Penambahan personil/ tenaga ahli yang membidangi terakit dengan pendataan dan investigasi kejadian kebakaran melalui seleksi ASN; Pembinaan dan Pelatihan personil; Akan melaksanakan MoU dengan Dinas/ instansi terkait untuk identitas warga.
2.	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan sudah dilaksanakan akan tetapi mekanisme dalam pengisian perhitungan pada form-form perhitungan kebutuhan tersebut belum dapat dipahami secara maksimal	<div><div>a.</div><div>b.</div></div> Memperhitungkan kebutuhan dan mengusulkan kepada TAPD; Mengusulkan agar dapat dilakukan sosialisasi mekanisme perhitungan pada form-form perhitungan kebutuhan tersebut.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan Personil serta belum terpenuhinya jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam pemenuhan layanan Respon Time	<div><div>a.</div><div>b.</div><div>c.</div><div>d.</div></div> Penggadaan sarpras; Pembentukan Relawan Kebakaran; Sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Kebakaran; Peningkatan alokasi anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran, serta menghindarkan anggaran yang berkaitan dengan penunjang SPM dari efisiensi/ refokusing;
4.	Pelaksanaan	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasaran dan pemenuhan personil dalam menunjang SPM sub urusan Kebakaran	<div><div>d.</div><div>e.</div><div>f.</div></div> Memaksimalkan Sarparas dan personil yang ada; Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; Koordinasi terkait dengan penambahan personil penunjang kegiatan dengan BKPSDM.



Tabel 4.63
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Internal 1. Kesulitan dalam merekap data warga di daerah rawan Bencana terutama menggunakan NIK 2. KRB yang sudah disusun belum mencantumkan daerah rawan bencana secara keseluruhan dan terperinci. Hanya berisi jumlah di setiap kecamatan dan tidak menyebutkan nama daerah/ desa	1. Meminta bantuan disdukcapil untuk mendapatkan data warga di daerah rawan bencana 2. Data daerah rawan bencana kolaborasi KRB baru dan KRB lama
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Internal: 1. Kesulitan dalam merekap data warga dan aparatur yang dilatih di daerah rawan Bencana terutama menggunakan NIK 2. Belum bisa menentukan daerah mana yang akan dilatih, karena KRB yang dibuat belum menyebutkan secara terperinci daerah rawan bencana hanya jumlah di setiap kecamatan	1. Meminta bantuan disdukcapil untuk mendapatkan data warga di daerah rawan bencana 2. Data daerah rawan bencana kolaborasi KRB baru dan KRB lama
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Internal: 1. Terdapat banyak data korban yang masuk belum benar dan masih berubah ubah 2. Dalam pemberian bantuan logistik tidak menyebutkan jumlah orang yang dibantu melainkan hanya paket 3. Mendata korban bencana tidak sampai ke NIK korban. Hanya sebatas nama, umur dan jenis kelamin	1. Memvalidasi data sebelum data diaporkan 2. Membuat SOP pemberian bantuan logistik 3. Meminta bantuan disdukcapil untuk mendapatkan data lengkap korban

4.6. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Di Kabupaten Purworejo urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis dan indikator untuk pelayanan dasar bidang sosial dilihat dari penerima pelayanan dasar dan mutu minimal pelayanan dasar, yaitu:



BAB IV

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 (satu) tahun.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 (satu) tahun.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dalam 1 (satu) tahun.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dari jenis pelayanan dasar tersebut, Kabupaten Purworejo menetapkan target dan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dapat dilihat dari tabel berikut:

--	--

BAB IV

Tabel 4.64
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara)	Setiap tahun	



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	bencana kabupaten/kota	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota						

4.6.3 Realisasi

- a. Realisasi Capaian
- Dari target capaian dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran diperoleh capaian sebagai tabel berikut

Tabel 4.65
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	105	105	100 %	130.827.350	130.509.795	99,54
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	139	139	100 %	430.320.000	428.320.000	99,53
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	38	38	100 %	7.000.000	6.750.000	96,42
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	47	47	100 %	62.050.000	61.325.000	98,83
5	Perlindungan	469	469	100 %	148.331.101	146.345.101	98,66



BAB IV

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.						

- b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu
- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Tabel 4.66

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	105	105	100%	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosia	3	3	100%	20%
2	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang	15	15	100%	20%



BAB IV

	berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)				
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	2	2	100%	20%
4	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	100%	20%
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	90	90	100%	20%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100%	20%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlanPemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	2	2	100%	20%



BAB IV

8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	3	3	100%	20%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2	2	100%	20%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	3	3	100%	20%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	2	2	100%	20%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	2	2	100%	20%
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	5	5	100%	20%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				20%

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.67.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	139	139	100%	80%



BAB IV

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	2	2	100%	20%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	5	5	100%	20%
3	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	63	63	100%	20%
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	100%	20%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100%	20%
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	3	3	100%	20%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada	3	3	100%	20%



BAB IV

	keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	16	16	100%	20%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	3	3	100%	20%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	2	2	100%	20%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	2	2	100%	20%
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	3	3	100%	20%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				20%

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.68.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	38	38	100%	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6



BAB IV

1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	2	2	100%	20%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter)	3	3	100%	20%
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	10	10	100%	20%
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	2	2	100%	20%
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	28	28	100%	20%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100%	20%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	4	4	100%	20%



BAB IV

	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	4	4	100%	20%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	3	3	100%	20%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2	2	100%	20%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	3	3	100%	20%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	2	2	100%	20%
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada	3	3	100%	20%



BAB IV

	lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)				
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				20%

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Tabel 4.69.
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	47	47	100%	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	5	5	100%	20%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial	4	4	100%	20%



BAB IV

	dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	3	3	100%	20%
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	100%	20%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100%	20%
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	2	2	100%	20%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang	3	3	100%	20%



BAB IV

	berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	5	100%	20%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2	2	100%	20%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	2	2	100%	20%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	2	2	100%	20%
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	47	47	100%	20%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				20%

5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah

Tabel 4.70
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Purworejo 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6



BAB IV

1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah	469	469	100%	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	297	297	100%	20%
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian khusus perempuan, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian sekolah anak laki-laki, pakaian anak perempuan, pakaian lain sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau penyediaan lainnya sesuai kebutuhan)	120	120	100%	20%
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, tempat tidur, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	1	1	100%	20%
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	32	32	100%	20%
5	Pelayanan dukungan Psikososial	20	20	100%	20%



BAB IV

	(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)				
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				20%

c. Indeks Pencapaian (Ip) Spm Bidang Sosial Tahun 2024

Tabel 4.71.
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	80%	20%	100, %	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
	IP BIDANG SOSIAL			100%	Tuntas Paripurna



4.6.4 Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.72
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		Sumber Lain yang sah
		APBN	APBD	
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	-	130.827.350	200.000.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	-	430.320.000	-
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	-	7.000.000	-
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Geladangan dan Pengemis di Luar Panti.	-	62.050.000	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	-	148.331.101	-

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut

Tabel 4.73
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas (Esselon II)	1
2	Sekertaris Dinas (Esselon III)	1
3	Kepala Bidang Rehabsos (Ess III)	1
4	Kepala Bidang Dayasoslinjamsos (Ess III)	1
5	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1
6	Fungsional Penyuluh Sosial Muda	1
7	Fungsional Pekerja Sosial Muda	1
8	Satuan Bhakti Peksos Anak	3
9	Staf PNS Rehabsos	2
10	Staf PNS Dayasoslinjamsos	2
11	Tenaga kontrak Rehabsos	3
12	Tenaga kontrak Dayasoslinjamsos	2
13	Fungsional Analis Kebijakan Muda	1
14	Fungsional Pekerja Sosial Pertama	2
	Jumlah	22



BAB IV

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.74
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Sosial Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
		Pengampu SPM kesulitan menentukan kriteria penerima layanan dasar (PGOT diluar panti yang mendapatkan bantuan/ warga miskin)	Adanya sumber Data yang akurat.
		Pengampu SPM kurang memahami mutu layanan dasar	Diadakanya Sosialisasi Penyusunan SPM.
		Masih Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.	Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
		Kelompok Jabatan Fungsional khusus sesuai dengan Struktur Organisasi yang belum terisi.	Adanya tambahan Pegawai untuk mengisi formasi jabatan umum/ fungsional
		Kurangnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam Pelayanan Kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.	Diadakanya Pelatihan bagi ASN/ personil yang menangani Kegiatan Pencapaian SPM.
II	Eksternal		
		Kurangnya Komunikasi dengan Instansi /Dinas lain dalam hal pencapaian SPM.	Menjalin komunikasi dengan Instansi/Dinas terkait
		Kurangnya Anggaran	Anggaran Tahun 2024 di tambah

Hasil Capaian IP SPM di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.75.
Indek Pencapaian SPM pada masing-masing Bidang
di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar	TOTAL IP	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Bidang Urusan Pendidikan	80	20	100	Tuntas paripurna
2	Bidang Urusan Kesehatan	80	20	100	Tuntas paripurna



BAB IV

3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	80	20	100	Tuntas paripurna
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	80	20	100	Tuntas paripurna
5	Bidang Urusan Trantibumlinmas	80	20	100	Tuntas paripurna
6	Bidang Urusan Sosial	80	20	100	Tuntas paripurna
	Total IP Kabupaten Purworejo	80	20	100	Tuntas paripurna

4.7. Program dan Kegiatan

Penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2024 telah menggunakan kodefikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rincian penganggaran pada masing-masing bidang SPM dijabarkan sebagai berikut.

4.7.1. Urusan Pendidikan

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Purworejo tahun 2021 – 2026 dan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif tahun 2021 - 2026.

Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator Program Prioritas bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo.

Dalam mengatasi isu tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan misi ke empat yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan public dan pemerintah yang baik guna mewujudkan good governance melalui program inovasi diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dapat berjalan dengan cara cara baru dan inovatif. One Agency One Innovation adalah konsep yang dirancang untuk mengembangkan inovasi pelayanan public di setiap perangkat daerah.

Pada tahun 2021 – 2026 Dinas Pendidikan akan mengembangkan inovasi pelayanan public khususnya dalam hal pelayanan Pendidikan .

Untuk mencapai visi misi pembangunan kabupaten Purworejo



BAB IV

hususnya bidang Pendidikan , maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan
- a. Program Pengembangan Kurikulum
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
2. Urusan Kebudayaan
- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pembinaan Sejarah
- c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- d. Program Pengelolaan Permusiuman

Adapun pelaksanaan program / kegiatan / sub keggiatan pada tahun anggaran 2024 yang mendukung urusan bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.76
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21.137.530.303
		1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	86.627.950
		2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.753.180.670
		3 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	93.185.100
		4 Pengadaan Mebel PAUD	8.400.000
		5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	991.773.460
		6 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	437.969.900
		7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.700.016.800
		8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	18.950.100



BAB IV

		9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.679.872.473
		10	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	163.447.700
		11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	204.106.150
2	Pelayanan Dasar Pendidikan dasar	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar		126.482.562.738
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		81.392.322.978
		1.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	277.571.000
		2.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000
		3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	716.707.900
		4.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	229.990.620
		5.	Pengadaan Mebel Sekolah	511.520.300
		6.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.832.060.200
		7.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	8.743.512.528
		8.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.842.619.200
		9.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	594.066.980
		10.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.041.200
		11.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	789.883.510
		12.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	41.516.500
		13.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.448.723.387
		14.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27.581.100
		15.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	757.061.300
		16.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.000.000
		17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	908.409.353
		18.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	332.355.300



BAB IV

		19.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.202.304.300
		20.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.944.398.300
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		45.090.239.760
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.949.642.200
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	636.313.500
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	357.000.000
		4	Pengadaan Mebel Sekolah	951.159.000
		5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	546.000.000
		6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.815.683.936
		7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.768.177.940
		8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	170.276.800
		9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.881.000
		10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	232.231.700
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	54.757.700
		12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30.973.466.394
		13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.411.600
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	145.300.000
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	86.870.200
		16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.665.200
		17	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	394.725.590
		18	Pembangunan Ruang Kelas Baru	710.941.000
		19	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	32.876.000
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	221.860.000



BAB IV

3	Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.497.102.200
		1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	227.500.000
		2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	142.323.500
		3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	121.722.900
		4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.744.800.000
		5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.200.800
		6. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	40.000.000
		7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	217.555.000
TOTAL			150.117.195.241

4.7.2. Urusan Kesehatan

Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator Program Prioritas bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo. Program, kegiatan, dan sub kegiatan penerapan SPM bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.77
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TERKAIT PELAYANAN DASAR	ANGGARAN
I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.639.459.417
a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.304.057.700
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	566.220.400
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	150.665.800



BAB IV

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TERKAIT PELAYANAN DASAR	ANGGARAN
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.383.600
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	613.372.040
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	101.452.500
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.912.300
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.667.216.889
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.111.250.219
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.663.110.819
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.345.032.000
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	53.785.150

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 serta penerapan SPM yang menjadi tupoksi DPUPR, maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam tahun perencanaan 2021 - 2026. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dimaksud dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.78.
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran APBD dan DAK
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.540.682.700
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	14.540.682.700
		a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	21.150.000
		b Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	110.000.000
		c Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10.537.489.900
		d Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	40.500.000



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran APBD dan DAK
1	2	3		4
			Minum (SPAM) Desa	
		e	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.831.542.800
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		5.684.441.000
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.684.441.000
		a	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	229.000.000
		b	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	45.250.000
		c	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	732.160.000
		d	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.650.531.000
		e	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	27.500.000

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat

Dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 serta penerapan SPM yang menjadi tupoksi Dinperkimtan, maka disusunlah program dan kegiatan tahun mendatang. Program dan kegiatan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4. 79.
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
A	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	25.091.800
		1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000
		a) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.000.000
		b) Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	8.031.800
		c) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	8.060.000
		d) Pendataan dan Verifikasi Calon	



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota a) Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana b) Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dioptimalkan dari sumber pendanaan lain yang sah
B	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	-	-

Sumber : Dinperkimtan, 2024

4.7.5. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

- a. Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran
- Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2023 pada masing- masing Sub Urusan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Tabel 4.80

Program dan Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.464.850.664,00
		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.754.033.400,00



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp.000)
1	2	3			4
			a.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4.180.722.200,00
			b.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	157.437.700,00
			c.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	84.764.600,00
			d.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	324.608.900,00
			e.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	6.500.000,00
		2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		696.477.564,00
			a.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	568.146.424,00
			b.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	128.331.140,00
		3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		14.339.700,00
			a.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	14.339.700,00
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			3.045.718.600,00
		1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.840.746.600,00
			a.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	839.590.900,00
			b.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	40.380.800,00



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
			c. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	147.420.000,00
			d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.813.354.900,00
		2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	4.386.700,00
			a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.386.700
		3.	Investigasi Kejadian Kebakaran	15.816.900,00
			a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	15.816.900
		4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencagahan Kebakaran	184.768.400,00
			a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	16.568.900
			b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	19.181.100
			c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	149.018.400

Sumber: Satpol PP dan Damkar, Desember 2024

- b. Sub Urusan Bencana
- Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Tabel 4.81
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1		2	5
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	89.200.400
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	89.200.400
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	2.837.398.861
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	129.863.800



BAB IV

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	221.843.341
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	101.942.800
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.935.448.500
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	21.211.100
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	427.089.320
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.263.463.055
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	709.521.108
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	11.012.500
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	695.725.139
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	134.957.500
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	30.661.100
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	120.668.621
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	43.275.521
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	33.824.200
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	13.088.800
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	30.480.100

Sumber : BPBD Purworejo 2024

4.7.6. Urusan Sosial

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen penuh untuk dapat melaksanakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan baik jenis pelayanan dasar, mutu dan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut



BAB IV

diatas yang dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.82
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Sub Kegiatan : -Penyediaan Permakanan -Penyediaan Alat Bantu -Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial -Pemberian Bimbingan Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis	130.827.350
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	Sub Kegiatan : -Penyediaan Permakanan -Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak -Penyediaan Alat Bantu -Pemberian Bimbingan Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis	430.320.000
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Sub Kegiatan : -Pemberian Bimbingan Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis -Penyediaan Alat Bantu	7.000.000
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Geladangan dan Pengemis di Luar Panti	Sub Kegiatan : -Layanan Rujukan -Pemberian Bimbingan Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis	62.050.000
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah	Sub Kegiatan : -Penyediaan Permakanan -Penyediaan Sandang -Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan -Pelayanan Dukungan Psikososial	148.331.101

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2024



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan uraian dalam LPPD ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator makro Kabupaten Purworejo Tahun 2024 tercapai sebagai berikut :
 - a. Indikator makro pada umumnya menunjukkan perbaikan yaitu IPM mengalami peningkatan 1,09% dari tahun 2023 sebesar 74,35 naik menjadi 75,16, Angka Kemiskinan dari tahun 2023 turun -0,46% menjadi 10,87%, Angka Pengangguran dari tahun 2023 turun -0,13% menjadi 3,89 % dan PDRB Per kapita mengalami peningkatan sebesar 6,05% dari tahun 2023 sebesar 29,42 juta menjadi 31,19 juta rupiah pada tahun 2023.
 - b. Pertumbuhan Ekonomi mengalami mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,79 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang tumbuh 5,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Konstruksi sebesar 8,87 persen; Jasa Pendidikan sebesar 8,55 persen dan Informasi Komunikasi sebesar 7,78 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran paling dominan di Kabupaten Purworejo mengalami kontraksi di tahun 2024
 - c. Indikator Kinerja Outcome dilaporkan dari 6 Urusan Wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta indikator kinerja urusan penunjang pemerintahan.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjiP) terdiri atas 17 Sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah.
3. Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 tidak terdapat Tugas Pembantuan, namun demikian pelaksanaan kegiatan Pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
4. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Purworejo dengan Indeks Pencapaian (IP) 98,76% atau Kategori Tuntas Utama untuk rincian Indeks Pencapaian (IP) setiap urusan adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Pendidikan : dari 3 indikator SPM urusan pendidikan dengan IP 100% kategori Tuntas Paripurna
 - b. Urusan Kesehatan : dari 12 indikator SPM Kesehatan dengan IP 100% kategori Tuntas Paripurna
 - c. Urusan Pekerjaan Umum : dari 2 indikator SPM Pekerjaan Umum dengan IP 100% kategori Tuntas Paripurna

- d. Urusan Perumahan Rakyat : dari 2 indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dengan IP 100% kategori Tuntas Paripurna
- e. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : dari 5 indikator SPM trantibumlinmas dengan IP 99,74% kategori Tuntas Paripurna
- f. Urusan Sosial : dari 5 indikator SPM dengan IP 100% kategori Tuntas Paripurna

5.2. Saran

Untuk meningkatkan capaian yang tertuang dalam komponen sistematika LPPD dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mempertahankan dan meningkatkan kerjasama serta komitmen bersama yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal di Daerah serta sektor swasta dan meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk dapat memberikan gambaran atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat dikaji dan dievaluasi sehingga memberikan informasi yang akurat sampai sejauh mana pencapaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun anggaran.

Purworejo, Maret 2025
BUPATI PURWOREJO



YULI HASTUTI